



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64,2010

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.08/Menhut-II/2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-K/L) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010 – 2014.**

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010–2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit kerja eselon I dan eselon II lingkup Kementerian Kehutanan, serta Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran Kementerian Kehutanan sampai dengan tahun 2014.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kehutanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : P.08/Menhut-II/2010

Tanggal : 27 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kehutanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Berdasarkan susunan perencanaan, Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah kerangka umum pembangunan sektor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang merupakan periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan untuk seluruh unit kerja pada jajaran Kementerian Kehutanan dalam menyusun Renstra serta Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra Kementerian Kehutanan ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan di daerah yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah di bidang kehutanan.

Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan unit kerja pada jajaran Kementerian Kehutanan, serta instansi kehutanan pada jajaran pemerintah daerah agar didalam menyusun rencana kerja instansi, secara konsisten mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Umum.....	1
1. Landasan Pembangunan Kehutanan.....	1
2. Alur Pikir dan Asumsi	2
3. Sistematika Renstra Tahun 2010-2014	3
B. Kondisi Saat ini.....	3
1. Kawasan, Ekosistem dan Pemanfaatan.....	3
2. Pencapaian Renstra Tahun 2005-2009	6
C. Organisasi	20
D. Permasalahan	20
E. Kondisi Yang Diinginkan	21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2010-2014.....	23
A. Visi, Misi dan Tujuan	23
B. Nilai Dasar Rimbawan	25
C. Analisis Strategis.....	25
D. Sasaran Strategis.....	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	31
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	31
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan... ..	35
1. Kebijakan Prioritas.....	35
2. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	35
C. Pembiayaan.....	56
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	60

DAFTAR SINGKATAN

AAC	: Annual Allowable Cut
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
CITES	: Convention on International Trade in Endangered Species
COP	: Conference of Party
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DR	: Dana Reboisasi
DBH-DR	: Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
DSS	: Decision Support System
FAHHBK	: Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu
FAKB	: Faktur Angkutan Kayu Bulat
FAKO	: Faktur Angkutan Kayu Olahan
Ganis/Wasganis	: Tenaga Teknis / Pengawas Tenaga Teknis
GERHAN/GNRHL	: Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
HA	: Hutan Alam
HH	: Hasil Hutan
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HR	: Hutan Rakyat
HT	: Hutan Tanaman
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
IPPA	: Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam
IPHHK	: Industri Primer Hasil Hutan Kayu
ITTC	: International Timber Trade Council
IUPHHK	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUPHHBK	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHK-RE	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
IUPHHK-HA	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
IUPHHK-HT	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Jasling	: Jasa Lingkungan
KHDTK	: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KSDA	: Konservasi Sumber Daya Alam
LHA	: Laporan Hasil Audit
LOA	: Logged Over Area
MPA	: Masyarakat Peduli Api

MMP	: Masyarakat Mitra Polhut
PHPL	: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PHL	: Pengelolaan Hutan Lestari
PHPL	: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPNS	: Penyidik Pegawai negeri Sipil
Polhut	: Polisi Kehutanan
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
PUHH	: Penata Usahaan Hasil Hutan
RKAKL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga
Renja	: Rencana Kerja
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTk	: Rencana Teknik
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
TPTI	: Tebang Pilih Tanam Indonesia
SAL	: Surat Angkutan Lainnya
Silin	: Silvikultur Intensif
SKAU	: Surat Keterangan Angkutan Asal Usul Kayu
SKSHH	: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SKSKB	: Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat
SPAS	: Stasiun Pengamatan Air Sungai
SPORC	: Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat
SMART	: Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SVLK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
SIMPUHH	: Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan
TN	: Taman Nasional

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 disusun berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta isu-isu strategis dalam pembangunan kehutanan ke depan. Dalam Renstra ini disusun formulasi visi dan misi Kementerian Kehutanan dalam lima tahun kedepan yang merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indikator kinerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan difokuskan pada prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Selain itu, tugas Kementerian Kehutanan terkait dan menjadi pendukung dalam pelaksanaan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, khususnya dalam substansi inti Sumberdaya Manusia yang gayut dengan penataan dan pembinaan pegawai Negeri Sipil (PNS) dan harmonisasi regulasi. Tugas Kementerian Kehutanan juga terkait dan menjadi pendukung dalam pelaksanaan prioritas pembangunan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur, khususnya berhubungan dengan substansi inti pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.

Dari perspektif pelaksanaan prioritas pembangunan bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Prioritas pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian diarahkan pada 2 (dua) prioritas bidang, yaitu:

1. Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan 2 (dua) fokus prioritas, terdiri dari:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri.
 - b. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
2. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, dengan 4 (empat) fokus prioritas, meliputi:
 - a. Pemantapan kawasan hutan.
 - b. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
 - c. Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - d. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di atas ditetapkan visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, yaitu "Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan". Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi Kementerian Kehutanan, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan pada:

1. Pemantapan kawasan hutan.
2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
4. Konservasi keanekaragaman hayati.
5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan.
6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan.
8. Penguatan kelembagaan kehutanan.

Berdasarkan prioritas pembangunan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014, yaitu:

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 1 paket.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Ijin usaha pemanfaatan hutan alam dan restorasi ekosistem pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7. Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafficking* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Pengelolaan konservasi ekosistem, tumbuhan dan satwa liar sebagai potensi plasma nutfah pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya.
9. Rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
15. Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul.
16. Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini "wajar tanpa pengecualian" mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket

Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada Renstra Tahun 2010-2014, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
2. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi.
3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.
4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
5. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan.
6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Kehutanan.
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

Untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, serta guna mencapai indikator-indikator kinerja utama dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, direncanakan pembiayaan sebesar Rp.30.533,90 milyar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

1. Landasan Pembangunan Kehutanan

Pembangunan kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan, yaitu, *pertama* adalah keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional. Entitas yang mencirikan dimensi kawasan adalah mantapnya status hukum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi kondisi serta potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari. Dimensi *kedua* berupa keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Entitas yang mencirikan dalam pengelolaan biofisik hutan adalah revitalisasi dan transformasi manfaat ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hutan menjadi barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan global secara berkelanjutan. Revitalisasi dan transformasi aneka manfaat hutan tersebut meliputi peningkatan pemanfaatan potensi lahan maupun hasil-hasil produksi barang dan jasa, konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, serta pemulihan fungsi hutan melalui upaya-upaya rehabilitasi dalam bentuk reboisasi/restorasi atau penghutanan kembali kawasan hutan yang terdegradasi, dan penghijauan atau penanaman pohon-pohon pada lahan kritis di luar kawasan hutan, serta reklamasi yaitu penanaman pohon pada kawasan hutan bekas penggunaan untuk kegiatan-kegiatan di luar kehutanan. Dimensi *ketiga* adalah tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, kelola ekologi/lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh. Dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat upaya pokok, yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Yang kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 sektor kehutanan dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dll) secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di

dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah dan pengaturan tata air dan udara. Dalam konteks sisi pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

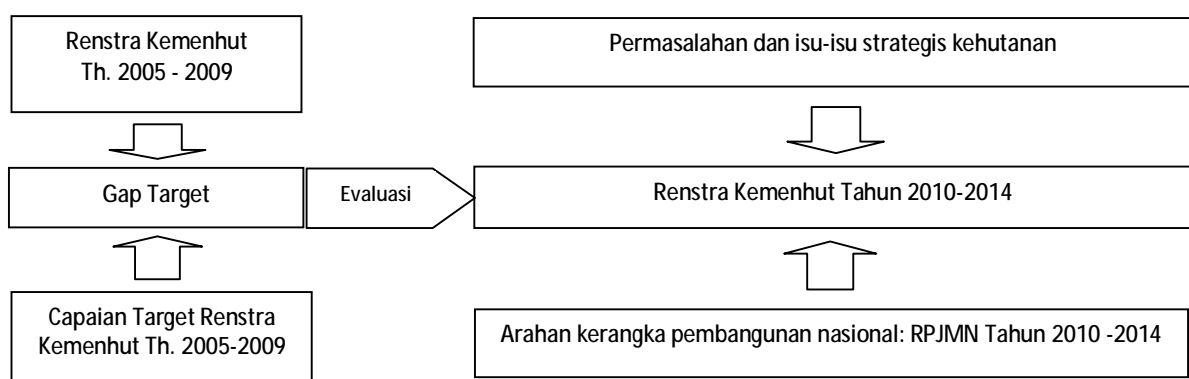
Berdasarkan prinsip keutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan sebelumnya yang secara spesifik dirumuskan: 1) Pemantapan kawasan hutan, 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, 4) Konservasi keanekaragaman hayati, 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, 6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan 8) Penguatan kelembagaan kehutanan.

Kesinambungan penetapan sasaran pembangunan kehutanan tahun 2005-2009 menjadi pertimbangan penting dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2010-2014, yang merupakan bagian dari pelaksanaan periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Perumusan lingkup pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 ini, dilakukan berdasarkan arahan prioritas pembangunan nasional di sektor kehutanan dalam RPJMN Tahun 2010-2014. Guna menjawab permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, Kementerian Kehutanan melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, untuk lebih memperjelas ukuran-ukuran kinerja yang ingin dicapai pada periode lima tahun kedepan, serta mempertajam prioritas-prioritas sasaran sesuai dengan embanan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.

2. Alur Pikir dan Asumsi

Dalam rangka menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil pembangunan di bidang kehutanan, maka proses penetapan sasaran pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 diformulasikan dalam skema sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 1. Skema Proses Perumusan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014



Asumsi dasar yang menjadi kerangka pikir di atas adalah:

- Kebijakan Nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2014 menjadi acuan dalam perumusan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
- Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 menjadi acuan seluruh unit/satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan dan satuan-satuan kerja perangkat daerah di bidang kehutanan.
- Berdasarkan struktur organisasi Kementerian Kehutanan.

- d. Tersedia input proses khususnya sumberdaya manusia (SDM) pelaksana dan dana/anggaran.
- e. Ketersediaan regulasi untuk mendukung struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Sistematika Renstra Tahun 2010-2014

Ruang lingkup isi Renstra Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Menteri Kehutanan.

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat Landasan Pembangunan Kehutanan, Posisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Kehutanan, Alur Penyusunan dan Asumsi dasar, dan Sistematika Renstra Tahun 2010-2014. Selanjutnya disajikan kondisi saat ini untuk menetapkan kondisi yang diinginkan dalam lima tahun mendatang berdasarkan embanan tugas dan fungsi unit kerja Kementerian Kehutanan saat ini, pencapaian Renstra Tahun 2005-2009, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan. Guna penetapan visi, misi, sasaran serta kebijakan, maka dilakukan analisis strategis terhadap kondisi yang telah diuraikan di atas.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2010-2014. Bab ini menyajikan perumusan Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan embanan dalam lima tahun kedepan, yang dimulai dari penetapan pernyataan visi sebagai wujud keinginan yang hendak dicapai, dan pilihan cara mencapai visi berupa pernyataan misi, serta perumusan sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pencapaian Renstra Kementerian Kehutanan dalam lima tahun kedepan sampai dengan akhir tahun 2014.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI. Bagian ini menguraikan arahan kebijakan nasional berupa prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang, serta arahan kebijakan Kementerian Kehutanan yang diawali dengan perumusan kebijakan prioritas yang dilanjutkan dengan perumusan program dan kegiatan serta indikator kinerja utama sebagai sasaran masing-masing program dan kegiatan tersebut.

BAB IV. PENUTUP, merupakan gambaran umum kondisi pelaksanaan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, serta arah dari dokumen Renstra dalam tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.

LAMPIRAN, yang merupakan matriks/tabulasi rencana strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.

B Kondisi Saat Ini

1. Kawasan, Ekosistem dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya disebutkan pula bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Undang-Undang mengamanatkan bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Mandat tersebut merupakan landasan

konstitusi dalam pengurusan dan pemanfaatan hutan di Indonesia yang tercantum di dalam undang-undang tentang kehutanan tersebut.

Saat ini kawasan hutan di Indonesia meliputi areal kurang lebih seluas 136,88 juta hektar, termasuk kawasan konservasi perairan. Sebagai negara yang terletak pada kawasan tropis dunia, hutan Indonesia yang berdasarkan penelitian terdiri dari 15 formasi hutan dimana sebagian besar didominasi oleh tipe hutan hujan tropis. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai tempat *megadiversity* sehingga menjadi pusat konsentrasi keragaman hayati, baik di daratan maupun perairan. Hutan di Indonesia adalah habitat bagi kurang lebih 38.000 jenis tumbuhan termasuk 27.500 spesies tumbuhan berbunga (10% dari tumbuhan berbunga di dunia, yang separuhnya merupakan jenis endemik Indonesia), 515 spesies mamalia (12% jenis mamalia dunia), 511 spesies reptilia (7,3% dari jenis reptilia dunia), 270 spesies amphibia, 1.531 jenis burung (17% spesies burung dunia), 2.827 jenis binatang tak bertulang, kupu-kupu sebanyak 121 spesies (44% jenis endemik), serta lebih dari 25% spesies ikan air laut dan air tawar di dunia. Disamping itu, Indonesia memiliki tumbuhan palma sebanyak 477 spesies (47% endemik) dan kurang lebih 3.000 jenis spesies tumbuhan penghasil bahan berkhasiat obat. Diantara berbagai jenis tumbuhan dan satwa di atas beberapa diantaranya merupakan jenis-jenis yang baru ditemukan, terutama di kawasan-kawasan hutan di daerah Papua.

Untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar dari ancaman kepunahan yang merupakan bagian dari konservasi sumberdaya alam, pemerintah telah menetapkan 58 jenis tumbuhan dan 236 jenis satwa yang terancam punah dan harus dilakukan perlindungan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan dan Satwa. Dalam upaya menangani perdagangan tumbuhan dan satwa yang mendekati kepunahan, Indonesia telah menandatangani konvensi CITES dan mendaftarkan sebanyak 1.053 jenis tumbuhan dan 1.384 jenis satwa dalam Appendix I dan II.

Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman-hayatinya, sampai dengan tahun 2005, pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi daratan dan laut sebanyak 535 unit yang hingga tahun 2009 terdapat sebanyak 527 unit kawasan konservasi daratan dan laut, meliputi 50 unit Taman Nasional (TN), 118 unit Taman Wisata Alam (TWA), 22 unit Taman Hutan Raya (Tahura), 14 unit Taman Buru (TB), 248 unit Cagar Alam (CA), dan 75 unit Suaka Margasatwa (SM). Untuk kawasan konservasi laut telah ditetapkan sebanyak 7 unit Taman Nasional, 5 unit Cagar Alam, 2 unit Suaka Margasatwa, dan 14 unit Taman Wisata Alam. Pengurangan jumlah unit kawasan konservasi tersebut dikarenakan adanya penyerahan 8 unit kawasan konservasi laut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Kepulauan Pieh, TWAL Gili Ayer Gili Meno Gili Trawangan (Gili Matra), TWAL Kapoposang, Cagar Alam Laut (CAL) Banda, CAL Aru Tenggara, SML Kepulauan Raja Ampat, SML Kepulauan Panjang, dan TWAL Padaido.

Tercatat sampai dengan tahun 2004, lahan yang kritis di seluruh wilayah Indonesia seluas 30,19 juta ha, meliputi kategori kritis seluas 23,31 juta ha dan sangat kritis seluas 6,89 juta ha. Sebagian lahan kritis di atas berada pada daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang perlu segera dilakukan rehabilitasi, dimana dari 458 DAS prioritas diantaranya 282 DAS merupakan prioritas I dan II.

Uraian berkenaan dengan konteks lingkungan di atas, sangat erat kaitannya dengan tujuan pembangunan milenium (*millennium development goals/MDGs*) Indonesia, dimana sektor kehutanan termasuk dalam tujuan pembangunan milenium ketujuh, yaitu "memastikan kelestarian lingkungan". Dalam tujuan tersebut ditetapkan target ke-9 yakni "memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang". Pada target tersebut terdapat indikator yang terkait langsung dengan sektor kehutanan, meliputi: 1) rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan, dan 2) rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan,

kawasan lindung dan kawasan konservasi dan hutan rakyat terhadap luas daratan, yang merupakan bagian dari indikator hijau (*green indicator*). Pada tataran global, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas, terlibat secara aktif dalam pembahasan instrumen kehutanan global yang menetapkan kewajiban dan peluang negara anggota di berbagai konvensi internasional, baik yang secara hukum mengikat (*legally binding*) maupun yang tidak mengikat (*non legally binding*). Yang secara hukum mengikat meliputi *Convention on Biological diversity (CBD)*, *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, dan *United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD)*. Sedangkan yang secara hukum tidak mengikat antara lain *Rio Declaration*, *Forest Principle (authoritative Statement of Principles for A Global Consensus on Management, Conservation, and Sustainable Development)*, Agenda 21 tentang rencana komprehensif program pembangunan berkelanjutan memasuki abad 21, dimana masalah kehutanan di elobarasi pada Bab XI mangatasi deforestasi (*combating deforestation*). Peran strategis instrumen kehutanan global tersebut adalah untuk mengamankan kepentingan nasional dalam penyusunan kesepakatan kebijakan dan standar internasional dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan serta sebagai referensi penyusunan kebijakan dan standar pengelolaan hutan nasional yang selaras dan sejalan dengan kehutanan global, yang pada gilirannya menjadi basis kesepakatan kerjasama internasional di bidang kehutanan.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan, memasuki era tahun 1970, yang merupakan periode awal pembangunan lima tahunan nasional, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kayu tropis komersial di dunia. Dalam pemanfaatan kayu tersebut tercatat kurang lebih 120 famili tumbuhan yang terdiri dari 267 spesies sebagai penghasil komoditas kayu. Disamping itu, Indonesia dikenal juga sebagai penghasil terbesar komoditas rotan di dunia. Dalam konteks pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terdapat beberapa jenis produk yang merupakan komoditas penting perdagangan seperti terpentin, gondorukem/getah damar, jelutung, tengkawang, kemiri, sutera alam, gaharu, sarang burung walet, berbagai jenis tanaman obat dan rempah, serta berbagai jenis lain komoditas perdagangan, baik di dalam negeri maupun ekspor.

Pemanfaatan kayu yang dimulai pada tahun 1967 yang didorong dengan diterbitkannya undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), telah menempatkan sektor kehutanan sebagai penggerak ekonomi nasional. Indonesia telah merebut pasar ekspor kayu tropis dunia yang diawali dengan ekspor kayu bulat/log. Sejalan dengan berkembangnya industri pengolahan kayu yang sangat pesat sejak ditetapkan kebijakan larangan ekspor kayu bulat tahun 1985, Indonesia menjadi negara pengeksport kayu gergajian, kayu lapis dan produk industri kayu lainnya. Selama tahun 1992-1997 tercatat perolehan devisa negara sebesar US\$.16,0 milyar sebagai sektor penghasil devisa kedua setelah minyak dan gas bumi. Pada tahun 2003, ekspor hasil hutan tercatat sebesar US\$.6,6 milyar atau sekitar 37% dari ekspor non migas.

Selanjutnya penerimaan negara dari sektor kehutanan yang berasal dari dana reboisasi (DR), provisi sumberdaya hutan (PSDH), iuran hak perusahaan hutan (IHPH) termasuk hutan tanaman industri (HTI), ekspor satwa, denda pelanggaran, pungutan pariwisata alam, pada tahun 1999 mencapai Rp.3,3 trilyun. Kondisi penerimaan tersebut menurun menjadi Rp.2,72 trilyun pada tahun 2003 sejalan dengan pengurangan jatah tebangan dari hutan alam, termasuk penurunan luasan areal pemanfaatan hasil hutan kayu. Meskipun penerimaan negara dibidang kehutanan pada beberapa tahun terakhir relatif sama, namun tidak sebesar dibandingkan dengan penerimaan ketika tingkat produksi kayu sebelumnya yang sangat besar. Akan tetapi kegiatan perekonomian dari usaha-usaha dibidang kehutanan masih tetap memberikan kontribusi penting khususnya pada pembangunan di daerah penghasil kayu dan hasil hutan lainnya. Kondisi selanjutnya, meskipun produksi kayu bulat dari hutan alam cenderung tetap rendah pada beberapa tahun terakhir, namun produksi kayu dari hutan tanaman dan hutan rakyat serta hasil hutan bukan kayu menunjukkan peningkatan yang cukup baik.

Terkait dengan kondisi industri kehutanan, pada tahun 2003 terdapat 1.881 unit industri, terdiri dari 1.618 unit *sawmill* dengan kapasitas *intake* sebesar 11,05 juta m³, 107 unit *plymill* dengan kapasitas *intake* sebesar 9,43 juta m³, 6 unit *pulpmill* dengan kapasitas *intake* sebesar 3,98 juta m³, 78 industri *blockboard* dengan kapasitas sebesar 2,08 juta m³, dan 73 unit industri pengolahan kayu lainnya dengan kapasitas sebesar 3,15 juta m³. Terhadap angka kebutuhan bahan baku berdasarkan kapasitas terpasang industri kehutanan, kondisi saat ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan tersebut dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari produksi kayu bulat. Kondisi ini antara lain mendorong terjadinya pencurian kayu di hutan negara, serta menurunnya kinerja industri yang menyebabkan antara lain menurunnya dan bahkan penghentian produksi oleh beberapa industri pengolahan hasil hutan.

Dengan kondisi sumberdaya hutan yang secara kualitas semakin menurun, maka esensi pembangunan kehutanan dalam 20 tahun kedepan dimulai dari awal periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), adalah mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang masih ada, melalui penerapan secara ketat kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari, termasuk mencegah laju kerusakan, serta melakukan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah terdegradasi guna memulihkan fungsi dan/atau meningkatkan produktivitasnya.

Sejalan dengan upaya-upaya pembinaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dari 220 juta penduduk Indonesia (tahun 2003), 48,8 juta orang diantaranya tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal. Penduduk tersebut sebagian bermata pencaharian langsung dari hutan yang ada disekitarnya, sedangkan yang bekerja disektor swasta kurang lebih 3,4 juta orang. Secara tradisi, pada umumnya masyarakat yang bermata pencaharian langsung dari hutan melakukan pemanfaatan berbagai jenis produk-produk hasil hutan, baik kayu maupun non kayu seperti damar, gaharu, rotan dan lebah madu.

Upaya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dilakukan pemerintah antara lain melalui Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh para pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)/Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di luar Pulau Jawa dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Pulau Jawa, serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya seperti melalui kegiatan hutan kemasyarakatan, hutan rakyat dan hutan desa.

2. Pencapaian Renstra Tahun 2005-2009

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2005-2009 menjadi salah satu acuan dalam penetapan sasaran program dan kegiatan-kegiatan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Disamping itu, Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 disusun dengan mengacu pada kerangka arah kebijakan dan strategi, utamanya terhadap prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, serta berbagai persoalan permasalahan di bidang kehutanan, isu-isu dan lingkungan strategis kehutanan kedepan.

Realisasi pelaksanaan pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2005-2009 merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, yang telah dijabarkan lebih lanjut di dalam berbagai program dan kegiatan-kegiatan pembangunan Kementerian Kehutanan. Gambaran umum pencapaian kegiatan Kehutanan dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Illegal

Implementasi kebijakan di atas ditempuh melalui 2 (dua) program, yaitu 1) Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, dan 2) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.

Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, yang merupakan salah satu fungsi ketertiban dan keamanan, dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan guna menjamin hak-hak negara dan masyarakat atas manfaat sumberdaya hutan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi pengamanan hutan yang lebih ditekankan pada penguatan kelembagaan pengamanan hutan dan operasi-operasi pengamanan hutan.

Penguatan kelembagaan pengamanan hutan meliputi aspek pengembangan kemampuan personil pengamanan hutan baik personil pemerintah maupun pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan. Sampai dengan pertengahan tahun 2009 tercatat jumlah polisi kehutanan (Polhut) sebanyak 7.519 orang, terdiri dari yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pusat sebanyak 3.025 orang dan 4.494 orang adalah PNS pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Sebanyak 1.000 orang dari personil Polhut tersebut telah dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitasnya untuk menjadi personil Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). Basis kerja satuan ini terdapat pada 11 brigade di 11 provinsi yang rawan kejahatan kehutanan, yaitu Brigade Kanguru di Provinsi Papua, Brigade Kasuari di Provinsi Papua Barat, Brigade Anoa di Provinsi Sulawesi Selatan, Brigade Enggang di Provinsi Kalimantan Timur, Brigade Kalaweit di Provinsi Kalimantan Tengah, Brigade Bekantan di Provinsi Kalimantan Barat, Brigade Elang di DKI Jakarta, Brigade Siamang di Provinsi Sumatera Selatan, Brigade Harimau di Provinsi Jambi, Brigade Beruang di Provinsi Riau, dan Brigade Macan Tutul di Provinsi Sumatera Utara. Dari jumlah personil SPORC di atas, telah dilakukan penegakan disiplin akibat melakukan tindakan pelanggaran kepada sebanyak 51 orang personil.

Meskipun Brigade SPORC tersebut berada pada 11 provinsi, namun fungsional tugasnya dapat dilakukan secara lintas provinsi sesuai dengan eskalasi kebutuhan pengamanan hutan dan hasil hutan. Disamping pembentukan satuan khusus, satuan pengamanan hutan Polhut "reguler" senantiasa tetap ditingkatkan kemampuannya melalui pembinaan serta pendidikan dan pelatihan (diklat), baik diklat untuk aspek kepolisian maupun diklat teknis dan administrasi kehutanan yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk terus memperkuat upaya-upaya perlindungan hutan, dalam periode tahun 2005-2009, telah dilakukan rekrutmen Polhut sebanyak 572 orang. Sedangkan untuk tugas-tugas penyidikan atas tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan, sampai dengan akhir tahun 2009 terdapat 1.656 orang tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, penyegaran, magang di kantor Polisi, bimbingan teknis dan supervisi serta pembentukan Forum Komunikasi PPNS di 7 provinsi. PPNS tersebut secara aktif melakukan tugas-tugas penyidikan dan utamanya ditempatkan pada satuan-satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Polhut termasuk SPORC dan PPNS telah diadakan peningkatan sarana prasarana pengamanan, antara lain berupa kendaraan operasional patroli roda-4 sebanyak 193 unit, kendaraan operasional patroli roda-2 sebanyak 549 unit, *speed boat* sebanyak 29 unit, perahu karet sebanyak 19 unit, kapal patroli cepat (36 meter) sebanyak 1 unit, pesawat ultra ringan sebanyak 8 unit, senjata api sebanyak 3.700 pucuk terdiri dari senjata api laras pendek sebanyak 500 pucuk dan laras panjang sebanyak 3.000 pucuk serta molot sebanyak 200 pucuk.

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan, sampai dengan tahun 2009 telah dibentuk 40 unit pengaman hutan swakarsa (Masyarakat Mitra Polhut/MMP). Kepada para personil pada unit-unit MMP tersebut telah diberikan kegiatan pembinaan termasuk pendidikan dan pelatihan, yang tugas dan fungsinya lebih ditekankan pada aspek pengamanan preventif dan persuasif.

Ditingkat lapangan, pengamanan hutan dilakukan melalui berbagai operasi pengamanan baik yang bersifat preventif maupun represif. Operasi pengamanan preventif dilakukan utamanya melalui

kegiatan patroli pengamanan. Sedangkan kegiatan-kegiatan pengamanan represif telah dilakukan operasi reguler dan operasi gabungan terutama di provinsi-provinsi yang rawan pencurian kayu dengan melibatkan anggota Polhut termasuk SPORC, PPNs dan anggota Kepolisian. Untuk kegiatan pro yustisia, dalam kurun waktu tahun 2005-2008 telah dilakukan penyidikan dan pemberkasan lengkap sebanyak 3.423 kasus atas tindakan *illegal logging*, perambahan, perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar (TSL), kebakaran, dan penambangan illegal, diantaranya sebanyak 1.802 kasus telah dilimpahkan kepada pengadilan dengan status berkas lengkap (P.21). Sedangkan vonis pengadilan telah dijatuhkan untuk sebanyak 970 kasus. Khusus penanganan kasus *illegal logging*, dari tahun 2005–2009 terdapat sebanyak 3.083 kasus, diantaranya 1.491 kasus sudah berstatus berkas lengkap (P. 21) dan telah dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan yang telah mendapatkan penjatuhan vonis pengadilan adalah sebanyak 578 kasus.

Dalam rangka meningkatkan dukungan pengamanan hutan dan pemberantasan *illegal logging*, upaya-upaya pembinaan kelembagaan dilakukan antara lain melalui kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Karantina Pertanian, Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Lembaga Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM, serta aparat pengamanan fungsional yaitu Polri, TNI AL dan Kejaksaan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kerjasama kelembagaan utamanya meliputi kegiatan-kegiatan tukar menukar informasi, operasi pengamanan, pembinaan kemampuan personil dan penanganan perkara. Dalam skala internasional, penanggulangan kejahatan yang bersifat transnasional, telah dilakukan diplomasi antar negara serta kerjasama antara pemerintah dengan non pemerintah, antara lain kerjasama bilateral tentang pemberantasan *illegal logging*, kerjasama regional, dan kerjasama internasional.

Program kedua untuk implementasi kebijakan prioritas Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Illegal adalah Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya-upaya penertiban peredaran hasil hutan melalui pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) guna menjamin hak-hak negara atas hasil hutan. Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah Pengendalian Peredaran Hasil Hutan. Sedangkan upaya-upaya strategis yang dilakukan pada tahun 2005-2009 adalah:

- a. Pembuatan dan pengendalian distribusi dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) di seluruh provinsi (33 provinsi). Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2007, rata-rata setiap tahun diadakan pencetakan blanko dokumen SKSHH sebanyak 2 juta set. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka kebutuhan pencetakan blanko dokumen SKSHH berupa SKSKB menjadi berkurang, dan dialihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk mencetak sendiri dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) dan Surat Angkutan Lainnya (SAL), berdasarkan prinsip *self assesment* untuk melakukan pengangkutan kayu bulat, olahan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Untuk pengangkutan kayu milik rakyat digunakan dokumen legalitas berupa blanko dokumen Surat Keterangan Angkutan Asal Usul Kayu (SKAU), dimana sejak tahun 2006 dokumen tersebut dicetak oleh Kementerian Kehutanan. Namun setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2007, sejak tahun 2008 dokumen SKAU dicetak dan didistribusikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- b. Pembuatan dan operasionalisasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan (PUHH) dan iuran kehutanan secara *on-line* antara perusahaan pemegang ijin, instansi kehutanan mulai dari kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Dalam jangka panjang sistem PUHH akan

disempurnakan dengan pengembangan sistem informasi PUHH/PSDH-DR *on-line* yang telah dibangun sejak tahun 2006. Pada tahun 2007 sistem ini dikembangkan dengan dilengkapi *handheld*, *barcode printer* dan pita *barcode* yang ditempatkan di sejumlah IUPHHK-HA. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45/Menhut-II/2009, sejak tanggal 1 September 2009 sistem informasi (SI) PUHH *on-line* wajib dilakukan oleh semua IUPHHK-HA dengan jumlah *annual allowable cut (ACC)* sebanyak 60.000 m³ atau lebih.

- c. Pembentukan dan penyegaran tenaga teknis penguji dan pengawas penguji hasil hutan baik kayu maupun non kayu melalui pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan tenaga teknis pengujian, baik dari unsur masyarakat, perusahaan, dan pengawas penguji pada instansi kehutanan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 58/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008, sampai dengan September 2009 telah dikeluarkan nomor register Tenaga Teknis (Ganis) sebanyak 1.216 orang dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebanyak 1.932 orang.
- d. Pengawasan pengukuran dan pengujian atas seluruh hasil hutan berupa kayu bulat, kayu olahan dan non kayu di seluruh provinsi (33 provinsi)
- e. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang penata-usahaan hasil hutan.

Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan

Kebijakan prioritas Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan Tahun 2005-2009 dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah Pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan, Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam, Pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat (HTR), dan Restrukturisasi industri primer kehutanan.

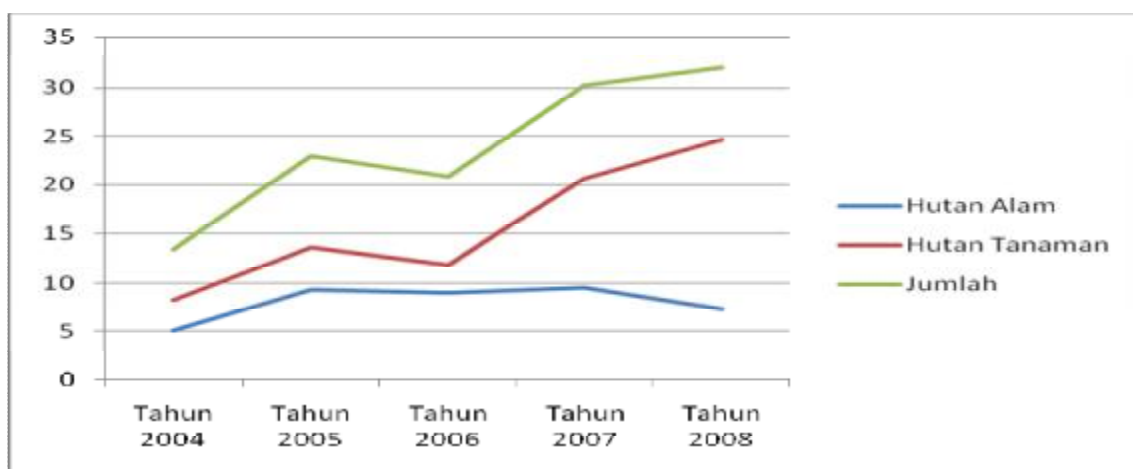
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan, telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka penyiapan areal hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan tersebut untuk dapat dikelola dalam bentuk unit-unit pemanfaatan. Disamping itu, telah dilakukan penyusunan rancangan kawasan-kawasan hutan produksi untuk dikelola dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP).

Untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam, sampai dengan Desember 2008 terdapat 308 unit ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam (IUPHHK-HA) dengan areal kerja seluas 26.171.601 hektar (ha). Dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama pada tahun 2007, jumlah unit IUPHHK-HA tersebut menurun sebanyak 16 unit (4,9%) dengan penurunan areal kerja seluas 2.099.442 ha (7,4%).

Dari jumlah unit dan luasan areal kerja IUPHHK-HA di atas, pada periode tahun 2004-2008 tingkat produksi kayu bulat rata-rata sebesar 5,18 juta m³ per tahun. Sedangkan produksi kayu bulat dari tebangan lainnya (pemanfaatan kayu dan ijin sah lainnya) rata-rata sebanyak 2,90 juta m³ per tahun. Secara keseluruhan tingkat rata-rata produksi kayu bulat dari hutan produksi alam adalah sebesar 8,07 juta m³ per tahun. Guna meningkatkan produktivitas dari hutan alam produksi melalui sistem tebang pilih tanam Indonesia (TPTI), maka sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan sistem silvikultur intensif (Silin) di 25 lokasi IUPHHK-HA dengan areal seluas 52,3 ribu ha. Selain dengan pengembangan sistem Silin, pembinaan hutan produksi alam bekas tebangan telah dilakukan penanaman pengayaan pada areal seluas 16,9 ribu ha. Terkait dengan rangkaian kegiatan pengembangan pemanfaatan hutan produksi alam oleh pemegang IUPHHK di atas, jumlah investasi kumulatif sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp.11,67 triliun, yaitu berdasarkan 155 unit pemegang IUPHHK yang menyampaikan laporan investasi.

Untuk kegiatan pembinaan pengembangan hutan tanaman industri (HTI), sampai dengan tahun 2008 terdapat 227 unit ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT)/HTI dengan areal kerja seluas 10,04 juta ha, terdiri dari kategori Surat Keputusan (SK) unit HTI definitif sebanyak 165 unit dengan luas 7,15 juta ha, SK sementara sebanyak 32 unit dengan luas 633,68 ribu ha, dan SK pencadangan sebanyak 30 unit dengan luas 2,25 juta ha. Untuk tahun 2009 diharapkan terdapat 32 unit HTI SK sementara dengan luas 633,68 ribu ha yang ditetapkan sebagai SK definitif. Dengan luasan areal izin tersebut, tingkat produksi kayu bulat dari HTI pada tahun 2008 adalah sebesar 24,51 juta m³, sedangkan dalam 5 tahun terakhir rata-rata produksi adalah sebesar 15,77 juta m³. Nilai investasi pembangunan HTI sampai dengan tahun 2008 dari 32 unit perusahaan pemegang IUPHHK-HT/HTI yang melaporkan investasinya adalah sebesar Rp.12,05 triliun.

Gambar 2. Produksi kayu bulat hutan alam dan hutan tanaman (juta m³)



Guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan produksi hasil hutan kayu, telah dikembangkan pola hutan tanaman rakyat (HTR) yang dilaksanakan oleh masyarakat/kelompok masyarakat termasuk koperasi di luar badan usaha milik swasta (BUMS) dan badan usaha milik negara (BUMN). Sampai dengan akhir tahun 2009, diharapkan terdapat pencadangan areal HTR seluas 149,28 ribu ha. Investasi berupa penyaluran dana kredit bergulir untuk pembangunan HTI (masyarakat) dan HTR akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kehutanan.

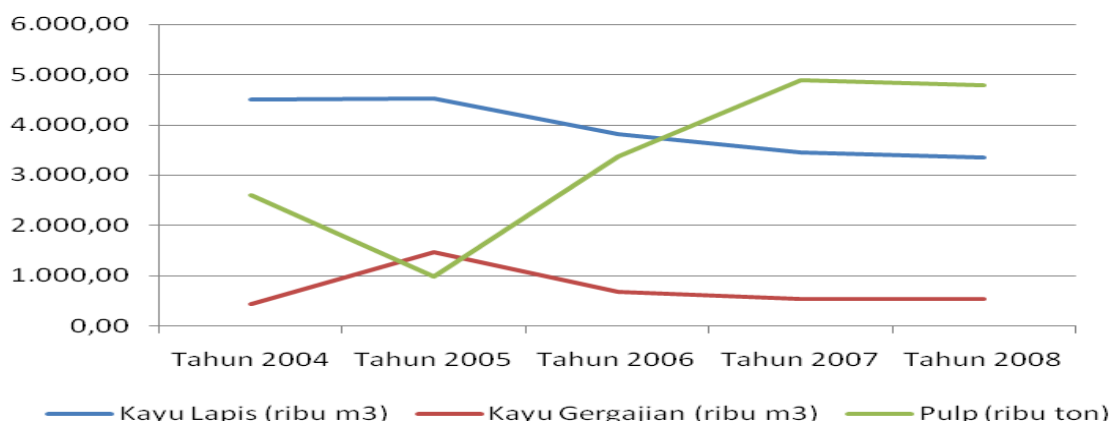
Berkenaan dengan kegiatan industri pengolahan hasil hutan, sampai dengan tahun 2008 terdapat 227 unit industri pengolahan kayu dengan kapasitas terpasang lebih dari 6.000 m³/tahun. Total kapasitas izin produksi dari unit-unit industri tersebut adalah sebanyak 23,40 juta m³/tahun. Dari kegiatan industri pengolahan kayu tersebut terdapat penyerapan tenaga kerja langsung kurang lebih sebanyak 205,3 ribu orang, Sedangkan kumulatif nilai investasinya adalah kurang lebih sebesar Rp.16,56 triliun.

Gambaran tingkat produksi kayu olahan dalam negeri rata-rata per tahun berdasarkan tingkat produksi tahun 2008 adalah:

- a. Kayu lapis : 3.353.479 m³
- b. *Veeneer* : 427.257 m³
- c. Kayu gergajian : 530.688 m³
- d. *Pulp* : 4.784.733 ton
- e. *Chipswood* : 278.320 m³

Tingkat produksi ini menunjukkan kecenderungan sejak tahun 2004, kecuali produksi pulp.

Gambar 3. Rata-rata produksi 3 jenis kayu olahan utama dalam negeri (ribu m³)



Dari tingkat produksi industri pengolahan di atas, jumlah volume dan nilai ekspor masing-masing komoditas pada tahun 2008, adalah:

- Kayu lapis sebanyak 1.250.947 ton, dengan nilai ekspor sebesar US\$.2.055.526.139
- Veeneer sebanyak 11.482 ton, dengan nilai ekspor sebesar US\$.30.096.339
- Kayu gergajian sebanyak 50.917 ton, dengan nilai ekspor sebesar US\$.55.301.908
- Particleboard sebanyak 4.244 ton, dengan nilai ekspor sebesar US\$.1.140.930
- Pulp sebanyak 2.436.869 ton, dengan nilai ekspor sebesar US\$. 1.425.342.204
- Chipwood sebanyak 95.024 ton, dengan nilai ekspor sebesar US\$. 6.192.515

Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Sampai dengan tahun 2004, lahan kritis di seluruh wilayah Indonesia tercatat seluas 30,19 juta ha, meliputi kategori kritis seluas 23,31 juta ha dan sangat kritis seluas 6,89 juta ha. Sedangkan dalam 3 tahun terakhir laju degradasi hutan, yang meliputi deforestasi dan degradasi fungsi tercatat rata-rata seluas 1,08 juta ha per tahun, menurun dari kurang lebih rata-rata 2,8 juta ha per tahun pada priode akhir tahun 1990-an dan memasuki era tahun 2000-an.

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan konservasi sumberdaya alam, sampai saat ini terdapat kawasan hutan konservasi seluas 27,2 juta ha, atau kurang lebih 20% dari luas kawasan hutan di Indonesia. Pemanfaatan kawasan konservasi lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan "produk" jasa dari ekosistem hutan, yang secara garis besar berupa:

- Jasa penyediaan untuk menghasilkan berbagai komoditas kebutuhan manusia termasuk obat-obatan, sumber genetik, air, dll,
- Jasa pengaturan untuk menjaga kualitas iklim, udara, air, erosi dan mengontrol berbagai aspek biologis di muka bumi,
- Jasa kultural dalam membentuk identitas budaya, hubungan sosial, peninggalan pusaka, wisata, dll, dan
- Jasa pendukung dalam membentuk formasi tanah, produk oksigen, habitat, dan siklus mineral.

Pelaksanaan dari kebijakan prioritas Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan dilakukan melalui dua program, yaitu Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam, dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui kegiatan pengelolaan DAS yang utamanya berupa pemantapan perencanaan, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi tata guna lahan DAS, serta peningkatan kelembagaan pengelolaan DAS. Sedangkan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya

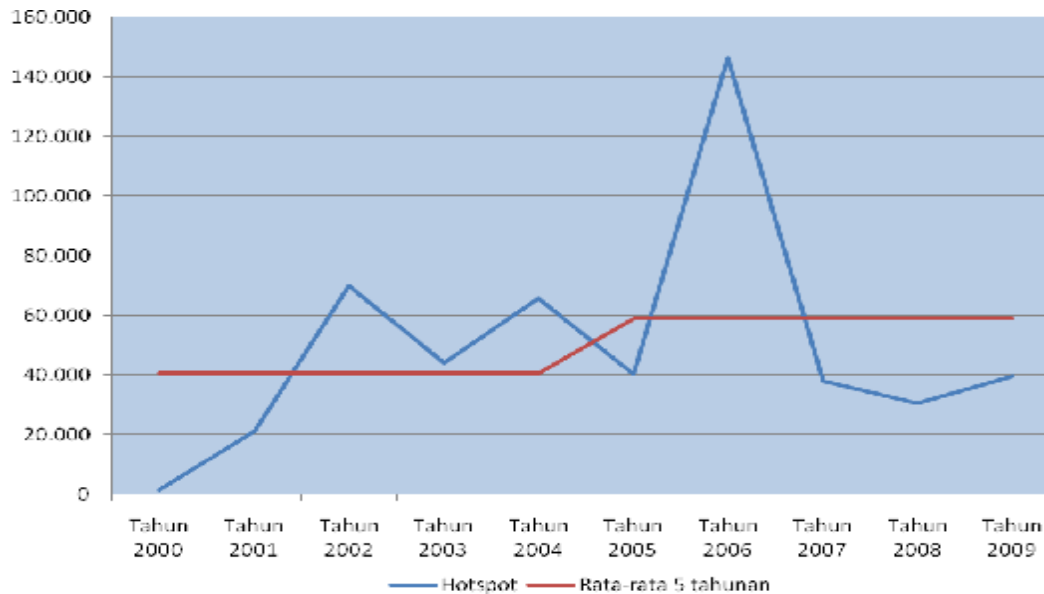
Alam diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi melalui kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan DAS, pada tahun 2008 telah disusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan DAS. Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, akan disusun Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Berdasarkan pedoman tersebut dalam tahun 2009 akan disusun Rencana Pengelolaan DAS terpadu untuk 36 unit DAS Prioritas. Secara keseluruhan, diharapkan sebanyak 108 unit DAS Prioritas di Indonesia dapat diselesaikan penyusunan rencana Pengelolaan DAS terpadunya sampai dengan akhir tahun 2014.

Dalam rangka pemulihan kondisi dan fungsi lahan-lahan kritis, khususnya pada DAS prioritas, sejak tahun 2003 telah dicanangkan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2008 adalah penanaman pada kawasan hutan (reboisasi) seluas 906.969 ha. Sedangkan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan telah dilakukan pembuatan hutan rakyat seluas 1.102.912 ha dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan publik seperti sekolah, turus jalan, mesjid, taman kota, telah dilakukan penanaman sebanyak 504,2 juta bibit pohon. Dalam rangka kampanye menanam guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam Gerhan, telah dilakukan penanaman dengan tema "Indonesia Menanam", dan "Wanita Menanam dan Memelihara Pohon", serta penanaman oleh instansi pemerintah, swasta dan kelompok-kelompok/lembaga-lembaga masyarakat, dengan realisasi penanaman sampai dengan tahun 2008 sebanyak 108,95 juta bibit pohon. Disamping itu, guna memulihkan kerusakan lahan pasca kegiatan penambangan telah dilakukan upaya reklamasi lahan bekas tambang seluas 21.380 ha. Dengan demikian, secara keseluruhan dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan dan reklamasi, sejak tahun 2003 telah dilakukan penanam pada areal seluas 2.009.881 ha.

Berkenaan dengan kegiatan konservasi sumberdaya hutan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, berupa pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan taman nasional termasuk taman nasional model dan kawasan konservasi lainnya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam. Dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan, pemantauan di seluruh Indonesia pada tahun 2005 terdeteksi sebanyak 40.197 titik api (*hotspot*), tahun 2006 sebanyak 146.264 *hotspot* atau mengalami peningkatan yang tajam sebesar 263%, tahun 2007 terdeteksi sebanyak 37.909 *hotspot* atau menurun kembali secara tajam dibandingkan dengan tahun 2006. Sedangkan untuk tahun 2008 terdeteksi sebanyak 30.616 *hotspot* atau turun lagi dari tahun 2007. Namun demikian pada kondisi tahun 2009 terdeteksi sebanyak 39.463 *hotspot*, atau terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yang diakibatkan terjadi musim kemarau yang lebih panjang di Indonesia. Berdasarkan angka tahunan titik api dari tahun 2000-2009, rata-rata jumlah *hotspot* dalam 5 tahunan untuk tahun 2000-2004 adalah sebanyak 40.492 titik, sedangkan untuk tahun 2005-2009 adalah sebanyak 58.890 titik. Secara umum di seluruh Indonesia *hotspot* terdeteksi sebagian besar berada pada lahan-lahan di luar kawasan hutan atau sebanyak 77,39%, sedangkan yang berada dalam kawasan hutan sebanyak 22,61%, termasuk di kawasan konservasi terdeteksi sebanyak 2,28%.

Jumlah tahunan *hotspot* sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim tahunan, yaitu kondisi tahun kering atau tahun basah. Gambar 4 di bawah menunjukkan jumlah titik api tahunan dalam 10 tahun terakhir, dimana jumlah titik api terbanyak terdapat pada tahun 2006 yang menunjukkan tahun terkering dalam 10 tahun terakhir. Selain dipengaruhi oleh tingkat kekeringan, intensitas titik api dan kejadian kebakaran hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh upaya-upaya pengendalian pada tatanan pencegahan melalui langkah-langkah preventif seperti deteksi dini dan upaya persuasif kepada masyarakat.

Gambar 4. Keadaan *hotspot* tahun dan rata-rata 5 tahunan dalam tahunan dalam 10 tahun terakhir

Upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pemantapan kelembagaan brigade pengendalian kebakaran hutan Manggala Agni, pencegahan kebakaran hutan, dan pemadaman kebakaran hutan yang dilakukan pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan. Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemantapan kelembagaan antara lain dibentuknya Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) di 10 provinsi rawan kebakaran, yaitu provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dengan jumlah personil sebanyak 1.560 orang. Dengan adanya pembentukan daerah operasi (Daops) baru Manggala Agni di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur, saat ini terdapat kekuatan Manggala Agni mencapai 1.590 orang. Untuk operasionalisasi unit Manggala Agni tersebut telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang tersebar di 30 Daops pada 10 Provinsi daerah rawan kebakaran. Selain itu telah terbentuk Manggala Agni di Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Balai Taman Nasional (BTN) yang kawasannya sering terjadi kebakaran di 21 unit pelaksana teknis (UPT) dengan jumlah regu sebanyak 42 unit, dan jumlah personil 630 orang, serta di Perum Perhutani sebanyak 60 orang. Disamping itu telah dibentuk 4 unit Regu Pasukan Gajah yang terlatih yang dapat dioperasionalkan untuk kegiatan-kegiatan pengendalian kebakaran.

Untuk meningkatkan efektivitas penekanan jumlah *hotspot* telah dilakukan kegiatan pencegahan kebakaran melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, yang sampai dengan tahun 2009 telah terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 5.157 orang. Keberadaan MPA tersebut adalah sebagai pendukung Brigade Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di 8 lokasi Daops pada 30 unit BKSDA dan BTN yang kawasannya rawan kebakaran. Selanjutnya telah dilakukan pembuatan unit-unit percontohan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan memanfaatkan material yang sering dibakar untuk diproses menjadi kompos dan briket arang yang telah dikembangkan di 8 lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Jawa Tengah. Untuk penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan kampanye dan penyuluhan melalui media masa di radio dan televisi serta penyebaran *leaflet*, *banner*, spanduk, *booklet* dan lain-lain. Guna mengintensifkan kesiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan koordinasi dengan para pihak, menjelang musim kemarau dan kegiatan bimbingan teknis pencegahan kebakaran lahan dan hutan

yang dilakukan di perusahaan pemegang ijin usaha dibidang kehutanan (IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman/HTI), dengan sekaligus melakukan pendataan dan monitoring terhadap kepedulian dan kesiap-siagaan dari masing-masing perusahaan.

Dalam upaya pemadaman kebakaran, Brigade Manggala Agni telah menjadi tumpuan dan andalan dimana pada setiap kejadian kebakaran lahan dan hutan, brigade tersebut telah menunjukkan peran aktif dalam upaya pemadaman. Hal tersebut merupakan kontribusi yang nyata dengan mengingat tugas pokok dan fungsi Manggala Agni adalah melakukan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi. Dukungan pemadaman melalui udara dilakukan dengan pengeboman air dengan helikopter dan pembuatan hujan buatan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kerjasama antara lain dengan pihak Polri, BNPB, BPPT, Pemda dan Para Pihak dari unsur swasta. Berdasarkan hasil evaluasi, operasi pemadaman yang paling efektif adalah memberikan dukungan untuk penguatan pemadaman darat (*ground force*), sedangkan patroli udara dengan helikopter Polri cukup efektif untuk membuat unsur "takut dan jera" kepada para pembakar lahan dan hutan.

Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi, sampai dengan pertengahan tahun 2009 telah dilakukan pengelolaan pada 50 unit taman nasional dengan luas 16,33 juta hektar (ha), cagar alam sebanyak 248 unit (4,5 juta ha), suaka margasatwa sebanyak 75 unit (5,1 juta ha), taman wisata alam sebanyak 118 unit (750 ribu ha), taman buru 14 unit (225 ribu ha), dan taman hutan raya 22 unit (344 ribu ha), yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pemantapan kelembagaan berupa pembentuk 21 taman nasional model melalui Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor SK.128/IV-Sek/HO/2006 tanggal 25 Juli 2006, yaitu untuk Taman Nasional (TN) Gunung Leuser, TN Gunung Kerinci Seblat, TN Way Kambas, TN Bukit Barisan Selatan, TN Ujung Kulon, TN Kepulauan Seribu, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Bromo Tengger Semeru, TN Meru Betiri, TN Alas Purwo, TN Bali Barat, TN Gunung Rinjani, TN Komodo, TN Kelimutu, TN Tanjung Putting, TN Betung Kerihun, TN Wakatobi, TN Lore Lindu, TN Bunaken, dan TN Wasur. Selanjutnya sedang diproses pembentukan unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, yaitu 10 unit Taman Nasional (TN), yaitu TN Berbak, TN Ujung Kulon, TN Gunung Halimun Salak, TN Tanjung Puting, TN Kutai, TN Meru Betiri, TN Alas Purwo, TN Bali Barat, TN Gunung Rinjani, dan TN Bunaken.

Untuk percepatan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif telah dilaksanakan kegiatan restorasi ekosistem dikawasan konservasi yang berlokasi di TN Sembilang, TN Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Bromo Tengger Semeru, TN Ciremai dan TN Manupeu Tanah Daru. Selain itu dilaksanakan program penghapusan utang melalui skema *Debt for Nature Swap (DNS)* yang saat ini telah memasuki tahun ke-III dengan Lokasi di TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan Selatan. Nilai pinjaman yang akan dikonversi dengan program tersebut adalah sebesar 12,5 juta Euro, dengan ketentuan Pemerintah Indonesia menyediakan dana sebesar 50% dari nilai hutang tersebut atau sebesar 6,25 juta Euro untuk kegiatan selama 5 tahun (2007-2011). Realisasi DNS sampai dengan tahun 2008 (tahun ke dua) adalah sebesar Rp.26,5 milyar dari Rp.42 milyar pagu yang telah ditetapkan. Selanjutnya saat ini sedang dalam proses program penghapusan hutang pada sebesar USD.19,6 juta yang akan dilaksanakan dengan mekanisme *Trust Fund* dengan melibatkan lembaga sosial masyarakat (LSM) sebagai fasilitator program tersebut. Untuk mempertahankan kawasan konservasi di "jantung" Kalimantan telah dilaksanakan inisiatif kerjasama 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam melalui program *Heart of Borneo (HoB)* yang dokumennya telah ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2007, dengan tujuan utama untuk mempertahankan keberlanjutan manfaat salah satu hutan tropis terbaik di dunia yang masih tersisa di Kalimantan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Terkait dengan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah, sedang disusun rencana aksi pengelolaan konservasi sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Berkenaan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati telah dilakukan kegiatan antara lain penerapan Sistem Manajemen Mutu dalam mendukung Program *Good Governance* melalui perolehan sertifikat ISO 9001:2000 pada bulan Pebruari 2008. Hasil tersebut adalah berdasarkan hasil audit eksternal pihak ketiga badan registrar yang mempunyai reputasi internasional. Dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan konservasi jenis dan genetik telah dilaksanakan pelepasliaran satwa liar dilindungi/*endemic* ke habitat alamnya dari hasil penangkaran, sitaan, rampasan atau penyerahan langsung dari masyarakat, seperti jalak bali (*Leucopsar rotchildi*) yang merupakan hasil penangkaran di habitat alamnya di TN Bali Barat sebanyak 92 ekor, kura-kura leher ular (*Chelodina miccordi*) hasil penangkaran di habitat alamnya di Pulau Rote sebanyak 46 ekor, owajawa (*Hylobathes moloch*) ke habitat alamnya di TN Gunung Gede Pangrango, translokasi 5 ekor harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 1 ekor dari Jambi, yang "terlibat" konflik dengan manusia, ke TN Bukit Barisan Selatan. Selain itu telah dilakukan pengembalian orangutan yang dibawa keluar negeri secara illegal sebanyak 53 ekor dari Thailand, 4 ekor dari Malaysia, dan 2 ekor dari Vietnam, pengembalian 1 ekor anak orangutan sumatera hasil *breeding* di Perth Zoo Australia, pengembalian 1 ekor anak badak Sumatera (*Dicherorhinus sumatrensis*) hasil *breeding* dari Cincinnati Zoo Amerika Serikat ke *Sumatra Rhino Sanctuary* di TN Way Kambas, pelepasliaran 1 ekor macan tutul yang "berkonflik" dalam kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Pandeglang, dan pelepasliaran burung elang jawa hasil penyerahan dari masyarakat di kawasan TN Gunung Gede Pangrango.

Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan konservasi jenis dan genetik, telah disusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) 2007-2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2007), Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017 (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2007), *Strategy and Action Plan for The Conservation of Rhinos in Indonesia 2007-2017* (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007), Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017 (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-IV/2007), Strategi Konservasi Curik/Jalak Bali (Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.150/IV/Set-3/2007). Sementara itu dengan adanya fakta di lapangan dimana sering terjadi konflik antara manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar, telah disusun Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), sampai dengan 2009 tercatat sejumlah 316 perusahaan penangkar TSL, terdiri atas 124 unit penangkaran ikan arwana, 31 unit penangkaran buaya, 30 unit penangkaran burung, 53 unit penangkaran/transplantasi karang hias, 3 unit penangkaran moluska, 17 unit penangkaran tumbuhan, 31 unit penangkaran reptil, 20 unit penangkaran mamalia, dan 9 unit penangkaran insekta. Guna penyelamatan satwa liar, telah dilakukan pelestarian *eksitu* satwa-satwa yang dilindungi di 36 unit lembaga konservasi (3 unit taman safari, 6 unit kebun binatang, 2 unit museum zoologi, 14 unit taman satwa dan 11 taman satwa khusus). Dari kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar telah dilakukan ekspor dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu tahun 2005 sebesar Rp.171.159.219,-, tahun 2006 sebesar Rp.2.382.735.790,-, tahun 2007 sebesar Rp.2.629.838.120,-, tahun 2008 sebesar Rp. 2.263.629.160,- dan tahun 2009 (hingga oktober 2009) sebesar Rp.3.769.632.000,-. Penarikan PNBP tersebut didasarkan pada harga patokan TSL yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dalam rangka pengembangan pariwisata alam, sampai dengan pertengahan tahun 2009 terdapat 25 unit Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang berada pada 9 (sembilan) unit kawasan

taman nasional, 15 unit berada di kawasan taman wisata alam, dan 1 unit berada di kawasan taman buru. Sedangkan yang masih dalam tahap pengajuan permohonan ijin berjumlah 12 pemohon, dan yang dalam tahap izin prinsip berjumlah 15 pemohon. Dari kegiatan pengembangan pariwisata alam dimaksud, dalam tahun 2008 telah diperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari tiket masuk kunjungan wisatawan sebesar Rp.6,42 milyar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2007, dan akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kapasitas pengembangan pariwisata alam. Dari kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat kepada negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda jasa wisata alam yang memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, hotel dan penginapan, makanan/minuman, industri khususnya kerajinan, dan lain-lain bentuk jasa, yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata alam. Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata alam tersebut akan terus dilakukan pengembangan potensi pariwisata termasuk sarana dan prasarana, serta kapasitas pengelolaan khususnya promosi wisata.

Terkait dengan pengelolaan hutan secara terpadu melalui peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang berpotensi mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan (*sustainable forest management*) baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan, perlu melibatkan berbagai *stakeholders* diantaranya kader konservasi, kelompok pecinta alam dan kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi. Gambaran mitra bina cinta alam saat ini adalah jumlah kader konservasi sebanyak 38.319 orang, kelompok pencinta alam sebanyak 1.317 unit, dan kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi 84 kelompok, dimana mereka berperan sebagai inisiator, motivator, fasilitator, dan dinamisator upaya konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistem setempat.

Perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif konservasi sumberdaya alam berupa pembinaan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi, saat ini terdapat sebanyak 2.931 desa dengan jumlah warga sebanyak kurang lebih 1,6 juta orang. Guna pengembangan pemberdayaan masyarakat tersebut telah dibangun 132 Model Desa Konservasi, terdiri dari 77 desa binaan Balai Taman Nasional (BTN) dan 55 desa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan

Jumlah desa yang berhubungan dengan kawasan hutan saat ini tercatat sebanyak 31.957 desa, yang terdistribusi di dalam kawasan hutan sebanyak 1.305 desa (4,08%), tepi kawasan hutan sebanyak 7.943 (24,86%) dan di sekitar kawasan hutan sebanyak 22.709 (71,06%). Provinsi terbanyak untuk desa di dalam kawasan hutan adalah Kalimantan Tengah (sebanyak 208 desa), dan Jawa Tengah (sebanyak 1.581 desa di tepi kawasan hutan dan 6.795 desa di sekitar kawasan hutan).

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan, dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan desa, dan pengembangan desa konservasi. Selanjutnya peningkatan usaha perekonomian masyarakat dilakukan melalui pengembangan komoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, getah-getahan, buah-buahan, umbi-umbian, serta usaha jasa pariwisata alam.

Dalam rangka pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan pengembangan pengelolaan HKm berupa penetapan dan pemberian ijin areal HKm

sebanyak 57 unit dengan areal seluas 8,8 ribu ha, fasilitasi kemitraan, fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan HKm, serta fasilitasi pembentukan kelompok tani HKm. Usaha masyarakat di bidang kehutanan serta sejalan dengan upaya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (penghijauan), telah dibuat hutan rakyat (HR) seluas 86,32 ribu ha yang dilakukan oleh 864 unit kelompok tani. Guna meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengelolaan HR telah dilakukan peningkatan keterampilan petani dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan masyarakat, pendampingan dan pembinaan kelompok tani HR sebanyak 360 unit, pembuatan rancangan model kemitraan sebanyak 40 unit, pembuatan HR seluas 22,86 ribu ha. Terkait dengan pengembangan hutan desa, telah dilakukan fasilitasi pengelolaan hutan desa untuk 1 unit lembaga, penetapan areal kerja hutan desa seluas 2,36 ribu ha, dan fasilitasi kemitraan hutan desa sebanyak 1 unit. Sedangkan dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) telah dibentuk sentra HHBK sebanyak 10 unit, penetapan HHBK unggulan sebanyak 6 jenis, fasilitasi produksi HHBK sebanyak 10 unit, penguatan kelembagaan petani HHBK, dan pengembangan kemitraan industri dan petani HHBK, serta mendorong pengembangan industri pengolahan HHBK.

Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kegiatan usaha pemanfaatan hutan produksi telah dilakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta kegiatan bina desa hutan yang dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan pengelola dan pemegang ijin pemanfaatan hutan produksi. Terkait dengan kegiatan konservasi sumberdaya alam telah dilakukan pengembangan desa konservasi sebanyak 132 unit. Sedangkan guna memberikan akses masyarakat terhadap usaha ekonomi dibidang kehutanan termasuk aspek permodalannya pada Kementerian Kehutanan telah dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang akan memberikan fasilitasi kelembagaan serta permodalan kepada masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Untuk kegiatan tersebut, mulai tahun 2008 pada BLU telah menyediakan dana usaha sebesar Rp.1,4 triliun dan untuk tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi sebesar Rp.1,7 triliun.

Pemantapan Kawasan Hutan

Implementasi kebijakan prioritas pembangunan yang kelima yaitu Pemantapan Kawasan Hutan yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan adalah pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan kegiatan utama pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Sedangkan kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi pengembangan rencana dan statistik kehutanan, inventarisasi hutan dan pengembangan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perencanaan dan pembinaan prakondisi pengelolaan hutan.

Dalam rangka penetapan kawasan hutan, sampai dengan akhir tahun 2008 telah diselesaikan kajian terhadap perubahan kawasan hutan di 12 provinsi dan penyusunan draft peta penunjukkan kawasan hutan sebanyak 8 provinsi, yaitu Riau dan Kalimantan Tengah serta 6 provinsi pemekaran. Sedangkan provinsi-provinsi yang belum dilakukan penyelesaian paduserasi dan penunjukkan kawasan hutan diharapkan dapat diselesaikan dalam tahun 2009. Untuk kegiatan penataan batas kawasan hutan, realisasi pembuatan tata batas dari tahun 2004 sampai dengan 2008 adalah sepanjang 2.340 km. Secara kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2009, pelaksanaan tata batas kawasan hutan yang telah dilaksanakan seluruhnya adalah sepanjang \pm 219.606 km atau 77,91% dari target sepanjang 282.873 km. Pelaksanaan tata batas diprioritaskan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan wilayah-wilayah yang rawan konflik serta perambahan kawasan hutan.

Berkeenan dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, dalam tahun 2008 telah dilakukan penelaahan dan memberikan pertimbangan teknis sebanyak 30 unit lokasi. Jumlah tersebut meningkat 30,4% dibanding kegiatan yang sama pada tahun 2007. Sedangkan penyelesaian kompensasi penggunaan kawasan hutan dalam tahun 2008 telah dilakukan penyelesaian administrasi pada 109 lokasi atau 40% dari jumlah permohonan. Untuk tahun 2009 diharapkan dapat dilakukan penyelesaian kompensasi penggunaan lahan di 10 lokasi, identifikasi areal tambang untuk batubara, biji besi dan emas di 3 kabupaten, dan penelaahan penggunaan kawasan hutan di 10 lokasi.

Untuk pelepasan kawasan hutan, hingga tahun 2007 dilakukan pelepasan untuk pemukiman transmigrasi sebanyak 256 unit (956,7 ribu ha) dan tahap ijin prinsip pelepasan sebanyak 436 unit dengan areal seluas 605,20 ribu ha. Sedangkan untuk areal usaha budidaya perkebunan telah diterbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan sebanyak 12 unit (228,2 ribu ha) dan tahap pencadangan sebanyak 11 unit seluas 93,3 ribu Ha.

Dalam rangka alih fungsi kawasan hutan, dalam tahun 2008 telah dilakukan pengkajian terpadu pada 8 lokasi, dan penyelesaian tukar menukar kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan sebanyak 19 lokasi. Disamping itu, telah dilakukan penanganan permasalahan hukum bidang keplanologian kehutanan di 32 lokasi. Guna mengharmoniskan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses penggunaan kawasan hutan, dilakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait melalui rapat koordinasi dan konsultasi.

Guna meningkatkan kapasitas dan pemantapan pengelolaan kawasan hutan dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah dilakukan proses pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan hutan Produksi (KPHP) di seluruh Indonesia kecuali DKI dan wilayah kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa. Sedangkan untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), telah dimulai penyiapan rumusan kebijakan untuk transformasi unit-unit taman nasional menjadi KPHK. Progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2008 adalah pembuatan Rancang Bangun KPH sebanyak 23 provinsi, arahan pencadangan KPH (KPHP dan KPHL) oleh Badan Planologi Kehutanan sebanyak 15 provinsi, pengusulan penetapan wilayah KPH (KPHP dan KPHL) oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan sebanyak 4 provinsi, dan penetapan wilayah KPH oleh Menteri Kehutanan sebanyak 1 (satu) provinsi. Hingga tahun 2009, diharapkan dapat diselesaikan pembuatan rancang bangun KPH (sebanyak 27 provinsi), arahan pencadangan KPH (KPHP dan KPHL) sebanyak 27 provinsi, pengusulan penetapan wilayah KPH (KPHP dan KPHL) sebanyak 28 provinsi dan penetapan wilayah KPH oleh Menteri Kehutanan sebanyak 28 provinsi.

Implementasi pembangunan KPH di lapangan ditempuh melalui pendekatan pembangunan KPH model yang pada hakekatnya merupakan KPH persiapan menuju KPH yang operasional. Target pembangunan KPH model dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah satu unit di tiap provinsi atau sebanyak 23 unit di 22 provinsi (khusus Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 unit KPH) yang terdiri dari KPHK sebanyak 2 unit, KPHL 6 unit dan KPHP 15 unit. Dalam tahun 2009 akan diselesaikan pembangunan KPH model sebanyak 5 unit di 5 provinsi yang terdiri dari KPHL sebanyak 1 unit dan KPHP 4 unit.

Untuk mendukung keseluruhan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan telah dilakukan pengembangan informasi sumberdaya hutan tingkat nasional, tingkat wilayah dan tingkat unit pengelolaan, penyediaan data dasar antara lain berupa input dan *updating* data spasial, pembuatan peta tematik serta pengembangan *database* pengukuhan kawasan hutan, dan pembangunan jaringan sistem informasi kehutanan.

Pendukung Kebijakan Prioritas

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksanaan 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, telah dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan dimaksud berupa penyelenggaraan tata administrasi pemerintahan, pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian. Aspek-aspek penyelenggaraan dukungan pelaksanaan kebijakan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Penelitian dan Pengembangan Iptek, dan Program Pendidikan Kedinasan.

Bagian dari pelaksanaan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah pelaksanaan tugas-tugas rutin administrasi tata pemerintahan berupa pembinaan dan pengembangan pegawai serta operasionalisasi perkantoran pada seluruh unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan fungsi pemerintahan umum antara lain pengelolaan barang milik negara, pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan perencanaan, monitoring dan evaluasi, penyempurnaan dan pengembangan peraturan perundangan-undangan serta organisasi, penyelenggaraan kerjasama internasional, pengembangan informasi kehutanan, pengendalian pembangunan kehutanan, serta pengembangan dan pembinaan standardisasi kehutanan dan lingkungan.

Untuk menciptakan penyelenggaraan tata kelola administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkup Kementerian Kehutanan, dalam tahun 2008 telah dilakukan audit kinerja dan audit khusus. Disamping itu, telah dilakukan review laporan keuangan dan tindak lanjut hasil audit.

Upaya-upaya dalam rangka penyediaan paket Iptek baik berupa informasi ilmiah dan teknologi terapan, untuk opsi masukan pembuatan kebijakan maupun perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan hutan, dilakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan (litbang) kehutanan. Pencapaian kegiatan litbang kehutanan tahun 2008 antara lain berupa penyediaan produk Iptek untuk peningkatan kualitas hutan produksi, rehabilitasi lahan kritis, reklamasi lahan bekas tambang, peningkatan kualitas dan produksi hutan tanaman melalui bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, pengelolaan DAS, pengelolaan kawasan konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan hutan rakyat, budidaya dan pemanfaatan HHBK, teknologi pengolahan hasil hutan, pemanfaatan jasa hutan terutama air dan karbon, serta informasi ilmiah yang terkait dengan dinamika ekosistem hutan dan sifat dasar hasil hutan. Guna memasyarakatkan hasil-hasil litbang kehutanan serta meningkatkan kualitas hasil litbang, dalam tahun 2008 telah dilakukan gelar teknologi, pameran, publikasi ilmiah, kerjasama kelitbangan, serta sertifikasi manajemen mutu organisasi dan laboratorium.

Dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan telah dilakukan upaya-upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap melalui kegiatan penyuluhan kehutanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (PPK), sampai dengan tahun 2008 di tingkat provinsi telah terbentuk 21 unit Badan Koordinasi Penyuluhan, sedangkan di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk Badan Penyuluhan pada 223 kabupaten/kota. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas penyuluhan, kepada seluruh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan diberikan biaya/dana operasional bulanan serta peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan berupa kendaraan operasional roda 2 (motor) serta perangkat media penyuluhan.

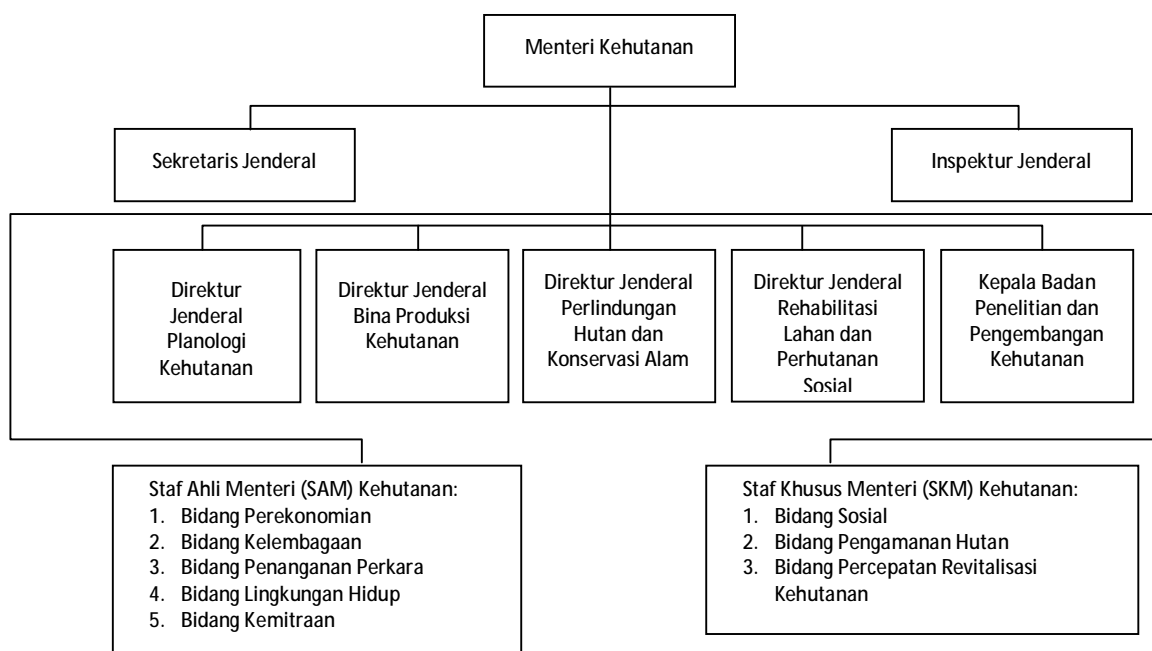
Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan hutan antara lain dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan (diklat). Kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan ditujukan bagi pegawai Kementerian Kehutanan, pegawai kehutanan pada satuan kerja perangkat daerah kehutanan (provinsi dan kabupaten/kota), pegawai pada instansi pemerintah terkait di luar Kementerian Kehutanan, serta masyarakat yang menjadi para pihak pada

sektor kehutanan. Guna menyiapkan tenaga teknis terampil tingkat menengah, mulai tahun 2008 telah dirintis penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit yang berlokasi di Pekanbaru Provinsi Riau, Kadipaten Provinsi Jawa Barat, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan Manokwari Provinsi Papua Barat.

C. Organisasi

Secara struktur Kementerian Kehutanan saat ini terdiri dari 7 unit eselon I-A, meliputi 1 unit Sekretariat Jenderal, 1 unit Inspektorat Jenderal, 4 unit Direktorat Jenderal, dan 1 unit Badan. Selain itu terdapat unit eselon I-B, terdiri dari 5 bidang Staf Ahli Menteri (SAM) dan 3 bidang Staf Khusus Menteri (SKM). Tiap unit eselon I-A membawahi beberapa unit eselon II-A, serta unit pelaksana teknis (UPT) setingkat unit eselon II-B dan III-A. Struktur organisasi jabatan unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 5. Struktur Organisasi Jabatan lingkup Kementerian Kehutanan



D. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program, kegiatan dan sasaran/target dalam menetapkan indikator kinerja, adalah sebagai berikut:

1. Belum semua kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi dilakukan tata batas.
2. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di luar Pulau Jawa.
3. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan.
4. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya upaya-upaya konservasi sumberdaya alam, khususnya dalam konteks pelestarian jenis-jenis flora dan fauna serta lingkungan abiotiknya.
5. Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor.
6. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan.

7. Kesenjangan antara *supply* dan *demand* bahan baku industri kehutanan, khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, disamping masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan.
8. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan secara struktur belum secara nyata mendorong pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat.
9. Minat investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering terhambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangnya insentif permodalan, perpajakan dan retribusi.
10. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
11. Pengembangan iptek kehutanan belum secara optimal menunjang untuk kebutuhan informasi dalam menetapkan kebijakan dan operasionalisasi teknis pengelolaan hutan di lapangan.
12. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

E. Kondisi Yang Diinginkan

Pada prinsipnya secara garis besar kondisi sumberdaya hutan yang diinginkan dalam lima tahun mendatang adalah makin membaiknya kualitas sumberdaya hutan dan meningkatnya manfaat hutan. Indikator membaiknya kualitas sumberdaya hutan adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan serta terselenggaranya upaya-upaya rehabilitasi. Sedangkan indikator meningkatnya manfaat hutan ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional berupa pendapatan domestik bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Berdasarkan kluster fungsi hutan, kondisi sumberdaya hutan serta kelembagaan yang diinginkan adalah:

Ekologi

1. Berkurangnya deforestasi sumberdaya hutan.
2. Kawasan hutan yang mantap melalui koordinasi dan sinkronisasi tata ruang, penguatan dan optimalisasi tata guna hutan, antara lain dalam mendukung pembangunan infrastruktur.
3. Keberadaan dan penutupan hutan terjamin sesuai dengan fungsinya (konservasi, lindung dan produksi), termasuk dalam kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4. Proses ekosistem esensial berjalan optimal serta keanekaragaman hayati dan sumberdaya hutan terjaga, serta terpulihkannya ekosistem hutan rawa dan gambut.
5. Menurunnya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan serta berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
6. Daerah aliran sungai (DAS) berfungsi secara optimal sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam berupa banjir, longsor dan kekeringan.
7. Kawasan hutan tetap yang dikelola oleh institusi permanen pada tingkat tapak.

Ekonomi

1. Kontribusi kehutanan terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB) dari hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan meningkat secara proporsional dan bertahap.
2. Penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan hutan, industri pengolahan hasil hutan, konservasi dan jasa lingkungan meningkat.
3. Pendapatan riil masyarakat yang berusaha dalam pemanfaatan produk dan jasa hutan dan kehutanan, terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan semakin baik.

4. Aneka usaha kehutanan oleh usaha kecil, menengah, koperasi dan masyarakat semakin luas, serta terjalin hubungan usaha besar, menengah, kecil, koperasi dan masyarakat yang makin harmonis dan terintegrasi.
5. Tercukupinya kebutuhan bahan baku industri kehutanan secara berkelanjutan.
6. Ekspor komoditas hasil hutan dan industri pengolahan hasil hutan terus meningkat.

Sosial

1. Manfaat hutan bagi masyarakat meningkat dan terdistribusi secara berkeadilan.
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan meningkat secara proporsional.
3. Akses masyarakat khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat secara proporsional terakomodir.
4. Kualitas kesejahteraan masyarakat (kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan, dll) di dalam dan sekitar hutan semakin baik, termasuk dalam kaitannya dengan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal terutama di kawasan perbatasan.

Kelembagaan

1. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Kementerian Kehutanan dan instansi kehutanan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), sehingga organisasi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanannya.
2. Kelembagaan pengelolaan hutan pada tingkat lapangan dalam kesatuan pengelolaan hutan makin mantap.
3. Regulasi dan kebijakan cukup memadai dan berjalan efektif.
4. Lembaga non pemerintah menjadi bagian penting dalam pembangunan kehutanan.
5. Jejaring kerja terbangun secara memadai.
6. Sumberdaya manusia kehutanan pada sektor pemerintah dan masyarakat kualitasnya terus meningkat.
7. Pengawasan dan pengendalian berjalan efektif.
8. Tersedia produk iptek yang handal dalam pengelolaan hutan.
9. Tersedia dukungan sarana dan prasarana serta dana yang cukup dan profesional.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2010-2014

A. Visi, Misi dan Tujuan

Hutan di Indonesia yang sangat luas merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan warisan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karunia dan warisan ini perlu dikelola secara bijak, terencana, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan daya dukungnya, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna menjamin pemanfaatan hutan berkelanjutan, yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan di masa kini dan masa mendatang. Pernyataan ini mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar pembangunan kehutanan sekaligus tujuan pemanfaatan sumberdaya hutan. Pemanfaatan sumberdaya hutan ini harus dilaksanakan berdasarkan rasionalitas dan optimalitas yang dilaksanakan secara bertanggung jawab guna menjamin kelestarian dan keseimbangan ekosistem, serta pembangunan berkelanjutan secara berkeadilan.

Hutan bukan hanya sekedar sekumpulan pepohonan yang mampu menyediakan kayu, akan tetapi sebagai ekosistem penyangga kehidupan. Hutan di Indonesia bukan saja sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat setempat, melainkan penyangga kehidupan bagi masyarakat seluruh bangsa, dan bahkan komunitas global. Hal tersebut dikarenakan hutan di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh sumberdaya alam lainnya, antara lain:

1. Keanekaragaman sumberdaya hayati. Didalam hutan tropika terdapat beraneka ragam kehidupan yang secara bersama-sama membentuk mata rantai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia. Berbagai macam species flora dan fauna serta sistem abiotik yang membentuk hutan, memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di muka bumi. Guna mempertahankan kelimpahan keanekaragaman hayati tersebut memerlukan ruang dalam luasan tertentu yang bukan saja untuk mencapai ukuran ekonomi (*economies of size*), tetapi juga agar mata rantai kehidupan dapat berjalan normal.
2. Keragaman peluang pemanfaatan. Hutan tropika yang dikenal sebagai *mega diversity* menyimpan banyak peluang manfaat dan menciptakan peluang usaha yang tidak terkira jumlahnya. Saat ini kemampuan kita untuk memanfaatkan kekayaan alam hutan Indonesia masih terbatas, sehingga masih lebih banyak lagi peluang pemanfaatan yang belum tergali, dan bahkan belum diketahui. Pengalaman memperlihatkan, bahwa kekenyalan usaha kehutanan adalah karena adanya keanekaragaman hayati. Pada mulanya pemanfaatan hasil hutan hanya berupa kayu yang bersifat komersial. Sejalan dengan kemajuan Iptek, jenis kayu-kayuan yang pada saat dulu belum memiliki nilai ekonomi atau sebagai *lesser known species*, saat ini memiliki nilai ekonomi tinggi atau sangat tinggi, dan bahkan hasil hutan bukan kayu serta berbagai satwa liar seperti kupu-kupu sampai dengan gajah, dan jasa lingkungan memberikan nilai ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, keberadaan keanekaragaman hayati perlu dijamin guna kelangsungan pemanfaatan sumberdaya hutan bagi sebesar-besar kesejahteraan manusia.
3. Kepentingan antar generasi. Hutan bukanlah warisan dari generasi terdahulu kepada generasi sekarang, melainkan generasi masa kini "meminjam" kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, generasi mendatang berhak mendapatkan warisan dengan kondisi hutan yang yang sama, bahkan lebih baik, dari generasi sekarang. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya hutan oleh generasi sekarang harus selaras dengan keperluan dan kepentingan generasi mendatang.
4. Memerlukan waktu yang panjang. Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui apabila pemanfaatannya tidak melampaui daya dukungnya. Akan tetapi, untuk memulihkan nilai hutan yang sudah mengalami kerusakan memerlukan waktu yang relatif panjang. Lamanya waktu proses pemulihan ini menyebabkan tingginya resiko dan ketidakpastian untuk

mendapatkan investasi. Terlebih lagi manakala faktor keterpencilan menjadi pertimbangan investasi karena pada umumnya hutan-hutan terletak di daerah yang dukungan sarana dan prasarannya masih sangat terbatas.

5. Kepentingan umum. Manfaat keberadaan hutan diperlukan oleh semua lapisan masyarakat di dalam satu negara bahkan masyarakat di negara lain sekalipun. Hutan bukan saja memberikan hasil berupa barang, tetapi juga memberikan jasa, seperti *supply* oksigen, tata air dan penyerapan serta penyimpanan karbon. Dengan demikian, sumberdaya hutan dapat digolongkan sebagai *common property resources*, yang keberadaannya menjadi tanggung jawab semua pihak.
6. Interaksi dengan masyarakat. Adalah realita sosial bahwa di sekitar hutan terdapat komunitas yang peri kehidupannya berinteraksi dengan keberadaan hutan. Didalam lingkungan komunitas tersebut terdapat nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berpotensi untuk mendukung pengelolaan hutan secara lestari. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya hutan tidak dapat meniadakan realita interaksi masyarakat dengan hutan.

Karakter-karakter sumberdaya hutan di Indonesia di atas menunjukkan bahwa hutan mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting dan teramat vital bagi kehidupan sosial budaya, perekonomian, serta kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya hutan harus dilakukan secara lestari guna memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan ekologi secara bersama-sama dan optimal.

Berangkat dari kondisi sumberdaya hutan di Indonesia ini, maka dalam Rencana Strategi Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 ditetapkan visi yang ingin diwujudkan dalam lima tahun kedepan. Visi tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian Kehutanan pada akhir tahun 2014. Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan upaya-upaya yang sistematis yang dituangkan sebagai misi Kementerian Kehutanan. Dalam rangka menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang menjadi bagian dari proses pembangunan nasional, maka perumusan visi dan misi Kementerian Kehutanan, mengacu pada kerangka umum pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014, serta tugas dan fungsi yang menjadi embanan Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan nasional, tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan dalam lima tahun kedepan, maka visi Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah:

Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut:

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS.

5. Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan, serta tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.
7. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.

B. Nilai Dasar Rimbawan

Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan untuk perwujudan serta menjunjung tinggi moral dan etika sebagai insan yang mengemban tugas dalam pengelolaan hutan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.01/Menhut-II/2008 telah ditetapkan 9 (sembilan) Nilai Dasar Rimbawan, meliputi: 1) jujur, 2) tanggung jawab, 3) disiplin, 4) Ikhlas, 5) visioner, 6) adil, 7) Peduli, 8) Kerjasama, dan 9) Profesional. Nilai dasar tersebut merupakan spirit dan jiwa para rimbawan khususnya yang bertugas pada jajaran Kementerian Kehutanan, dalam menyelenggarakan masing-masing tugas dan tanggungjawabnya.

C. Analisis Strategis

Terhadap kondisi saat ini, ruang lingkup tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan dan permasalahan dalam pembangunan kehutanan, maka dirumuskan analisis strategis sebagaimana pada tabel di bawah. Tabel 1 di bawah merupakan analisis terhadap lingkungan strategis berupa lingkungan internal meliputi kekuatan (*stengthen*) dan kelemahan (*weakness*), serta lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Tabel 1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Faktor Internal	Kekuatan: 1. Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan dalam pengurusan hutan 2. Kepastian pembiayaan dari APBN 3. Kawasan hutan yang luas dengan keanekaragaman hayati tinggi 4. Tersedia sarana dan prasarana pengelolaan kawasan hutan (gedung, kendaraan dan perlengkapan lainnya) 5. Peraturan perundangan dalam pengurusan hutan	Kelemahan: 1. Laju deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi, luasnya lahan kritis dan LOA, serta masih banyaknya <i>Hotspot</i> , penebangan liar dan peredaran TSL ilegal 2. Resiko investasi yang tinggi karena jangka waktunya panjang 3. Produksi kayu dari hutan alam yang cenderung turun 4. Kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan masih rendah 5. Ekosistem tropika yang unik dan rapuh, serta <i>remote area</i>
Faktor Eksternal		
Peluang: 1. Tumbuhnya investasi hutan alam, hutan tanaman dan industri 2. Lapangan kerja di Sektor Kehutanan yang cenderung meningkat 3. Semakin tingginya komitmen terhadap pengurusan hutan dari kementerian / lembaga lain 4. Pendanaan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja 5. Dana dan bantuan luar negeri untuk membantu pengurusan hutan	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang: 1. Optimalisasi pemanfaatan SDH 2. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan 3. Mendorong investasi dalam usaha di bidang kehutanan 4. Pengembangan keanekaragaman hayati dan meningkatkan pemanfaatan HHBK dan TSL 5. Peningkatan pendanaan pembangunan	Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang: 1. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS 2. Revitalisasi industri kehutanan 3. Reformasi birokrasi 4. Menyediakan insentif dan kemudahan dalam usaha dibidang kehutanan 5. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan
Ancaman: 1. Konflik lahan dan tekanan terhadap kawasan konservasi semakin mengganggu peran hutan sebagai penyangga kehidupan dan menimbulkan fragmentasi habitat satwa. 2. Pemekaran wilayah yang membutuhkan penyediaan lahan 3. Tingginya jumlah penduduk yang tertinggal disekitar hutan 4. Ketidakseimbangan antara kebutuhan konsumsi dan penyediaan produk HH 5. Pengelolaan DAS dan kelembagaan pengelolaan DAS masih lemah	Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman: 1. Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari 2. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 3. Penguatan kapasitas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam pengelolaan hutan 4. Pengamanan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan 5. Desentralisasi kehutanan	Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman: 1. Penguatan kelembagaan kehutanan 2. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan 3. Rasionalisasi luas kawasan hutan 4. Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanggulangan gangguan kawasan hutan 5. Peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Berdasarkan analisis lingkungan strategi, maka dilakukan penilaian hasil identifikasi dengan hasil sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penilaian Hasil Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Identifikasi penilaian	Keterkaitan								Jumlah	Urutan
	Visi	Misi						Nilai		
		1	2	3	4	5	6			
Kekuatan – Peluang										
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	4	3	4	4	2	2	2	3	24	4
Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan	2	2	2	2	2	1	2	2	15	13

Identifikasi penilaian	Keterkaitan								Jumlah	Urutan
	Visi	Misi						Nilai		
		1	2	3	4	5	6			
Mendorong investasi dalam usaha di bidang kehutanan	2	1	3	1	2	1	1	2	13	15
Pengembangan keanekaragaman hayati dan meningkatkan pemanfaatan HHBK dan TSL	4	1	1	3	1	3	1	2	16	12
Peningkatan pendanaan pembangunan	2	1	1	1	1	2	2	2	12	16
Kelemahan – Peluang										
Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS	4	3	3	4	4	3	3	2	26	2
Revitalisasi industri bidang kehutanan	4	2	4	2	2	2	2	2	20	9
Reformasi birokrasi	3	1	1	1	1	2	3	2	14	14
Menyediakan insentif dan kemudahan dalam usaha dibidang kehutanan	4	2	4	1	1	2	2	2	18	10
Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan	4	3	3	3	3	3	2	2	23	5
Kekuatan – Ancaman										
Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari	4	4	3	3	4	3	3	3	27	1
Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	4	4	3	4	3	2	2	3	25	3
Penguatan kapasitas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam pengelolaan hutan	2	1	1	1	1	1	2	2	11	17
Pengamanan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan	4	3	3	4	2	2	2	2	22	6
Destralisasi kehutanan	1	1	1	1	1	1	2	2	10	18
Kelemahan - Ancaman										
Penguatan kelembagaan kehutanan	2	2	2	2	2	3	4	3	20	8
Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan	3	3	3	3	3	2	2	2	21	7
Rasionalisasi luas kawasan hutan	1	1	1	1	1	1	1	1	8	20
Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanggulangan gangguan kawasan hutan	1	1	1	1	1	1	1	2	9	19
Peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	3	2	2	2	2	2	2	2	17	11

Tabel 3. Langkah-Langkah Strategis

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan
1.	Pemantapan kawasan hutan	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Makro Kawasan • Pembangunan KPH • Pengukuhan kawasan hutan • Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan • Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan
2.	Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan • Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS • Pengembangan Perhutanan Sosial • Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan
3.	Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyidikan dan Perlindungan Hutan • Pengendalian Kebakaran Hutan
4.	Konservasi keanekaragaman hayati	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Konservasi Kawasan dan Ekosistem esensial Lainnya • Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik • Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
5.	Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perencanaan Pengelolaan hutan Produksi • Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi • Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman • Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan • Peningkatan usaha industri primer kehutanan
6.	Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perhutanan Sosial
		Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi • Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman
		Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan kehutanan • Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan
7.	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim
		Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Kebakaran Hutan
		Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan
		Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan
		Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi • Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan koordinasi kerjasama luar negeri
8.	Penguatan kelembagaan kehutanan	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam • Penelitian dan Pengembangan Hutan Produksi • Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan • Penelitian Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang Kehutanan
		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Inspektorat I-IV Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasikan KKN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemenhut
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Pembinaan dan koordinasi kerjasama luar negeri Pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman Penyelenggaraan dan pembinaan tata hukum dan organisasi Kementerian Kehutanan Penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga serta administrasi BMN Pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya Penyuluhan kehutanan Pembinaan standarisasi dan evaluasi pengelolaan lingkungan kehutanan Penyiaran dan penyebarluasan informasi program pembangunan kehutanan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I-IV
		Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan
		Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen RLPS
		Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHKA
		Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen BPK

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7. Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafficking* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.

8. Biodiversitas dan ekosistem yang berada pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya dikelola dan dimanfaatkan secara wajar.
9. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
15. Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul.
16. Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini "wajar tanpa pengecualian" mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dititik beratkan pada prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Fokus prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dalam pengelolaan resiko bencana guna mengantisipasi perubahan iklim.

Substansi inti pelaksanaan prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dalam RPJMN yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan meliputi:

1. Perubahan iklim. Indikator penting dalam substansi inti ini adalah:

- a. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut. Indikator dimaksud diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berupa:
 - 1) Penyusunan rencana makro kawasan hutan.
 - 2) Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.
 - 3) Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi.
 - 4) Peningkatan pengelolaan hutan tanaman.
 - 5) Penyidikan dan perlindungan hutan.
 - 6) Pengendalian kebakaran hutan.
 - 7) Pengembangan perhutanan sosial.
 - 8) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
 - 9) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas.
 - 10) Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam.
 - 11) Pendidikan dan pelatihan kehutanan, dan penyuluhan kehutanan
 - 12) Reformasi birokrasi dan tata kelola
- b. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 hektar per tahun. Sasaran tersebut secara langsung atau tidak langsung akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan, antara lain:
 - 1) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas.
 - 2) Pengembangan perhutanan sosial.
 - 3) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
 - 4) Pengembangan perbenihan tanaman hutan.
 - 5) Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi.
 - 6) Peningkatan pengelolaan hutan tanaman.
 - 7) Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam.
 - 8) Penelitian dan pengembangan produktivitas hutan.
- c. Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana iuran hak pemanfaatan hutan (IHPH), provisi sumberdaya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR). Kegiatan-kegiatan di lingkup Kementerian Kehutanan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan indikator substansi inti tersebut adalah:
 - 1) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas.

- 2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
 - 3) Peningkatan tertib peredaran dan iuran hasil hutan.
 - 4) Perlindungan dan pengamanan hutan.
 - 5) Pengendalian kebakaran hutan.
 - 6) Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial.
 - 7) Konservasi spesies dan genetik.
 - 8) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
 - 9) Penyelenggaraan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan
 - 10) Koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan.
2. Pengendalian kerusakan lingkungan dengan indikator pencapaian substansi inti dimaksud adalah:
- a. Penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan sebesar 20% per tahun. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait untuk pencapaian indikator tersebut meliputi:
 - 1) Pengendalian kebakaran hutan.
 - 2) Perlindungan dan pengamanan hutan.
 - 3) Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial.
 - 4) Peningkatan pengelolaan hutan tanaman.
 - b. Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai tahun 2010 dan seterusnya. Sebelas unit DAS dimaksud, merupakan prioritas lokasi, namun tidak terbatas, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk penghentian kerusakan lingkungan, antara lain:
 - 1) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas.
 - 2) Pengembangan perhutanan sosial.
 - 3) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
 - 4) Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial.
 - 5) Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi.
 - 6) Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam.
 - 7) Pendidikan dan pelatihan kehutanan, dan penyuluhan kehutanan
3. Penanggulangan bencana, dengan indikator berupa peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi. Kegiatan pada Kementerian Kehutanan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai indikator substansi inti penanggulangan bencana tersebut adalah:
- a. Pengendalian kebakaran hutan.
 - b. Perlindungan dan pengamanan hutan.
 - c. Pendidikan dan pelatihan aparaturnya Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
 - d. Penyuluhan kehutanan.
 - e. Penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan.

Selain kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dalam pelaksanaan prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan tahun 2010-014 juga terkait dengan pelaksanaan 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional lainnya, yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Ketahanan Pangan, dan 3) Infrastruktur.

Substansi inti yang terkait dengan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola adalah:

1. Sumber Daya Manusia. Indikator substansi inti ini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan adalah penyempurnaan pengelolaan pegawai negeri sipil (PNS) yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara

terpusat selambat-lambatnya 2011. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator substansi inti tersebut adalah:

- a. Penyelenggaraan administrasi dan penataan kepegawaian Kementerian Kehutanan.
 - b. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.
 - c. Pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
2. Regulasi. Indikator yang terkait dalam substansi inti dimaksud adalah percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian 12.000 peraturan daerah, selambat-lambatnya 2011. Sedangkan kegiatan-kegiatan pada Kementerian Kehutanan untuk mendukung pencapaian indikator substansi inti dimaksud meliputi:
- a. Penyelenggaraan dan pembinaan tata hukum dan organisasi Kementerian Kehutanan.
 - b. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Terkait dengan pelaksanaan prioritas pembangunan Ketahanan Pangan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Kehutanan yang berkaitan dengan substansi inti lahan adalah Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian. Indikator yang terkait substansi inti tersebut adalah penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, dengan kegiatan utama yang akan dilaksanakan berupa pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan Infrastruktur, Kementerian kehutanan terkait dengan substansi inti berupa Tanah dan Tata Ruang. Indikator pada substansi inti ini adalah konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Kegiatan-kegiatan guna mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Penyusunan rencana makro kawasan hutan.
2. Penguatan kawasan hutan.
3. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.
4. Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial.
5. Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi.

Berkenaan dengan prioritas bidang pembangunan dalam RPJMN Tahun 2010-2014, Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Untuk pelaksanaan prioritas bidang pembangunan tersebut terdapat 2 (dua) arah utama, yaitu: 1) pemanfaatan sumberdaya alam dalam mendukung pembangunan ekonomi, dan 2) peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan ekonomi, sektor kehutanan termasuk dalam prioritas bidang pembangunan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Prioritas bidang tersebut, pembangunan kehutanan diarahkan pada 2 (dua) fokus prioritas, yaitu:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri. Kegiatan untuk melaksanakan fokus prioritas pembangunan bidang tersebut adalah :
 - a. Peningkatan pengelolaan hutan tanaman
 - b. Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi
 - c. Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi
 - d. Peningkatan usaha industri primer kehutanan

- e. Pengembangan perhutanan sosial
2. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan fokus prioritas pembangunan bidang tersebut adalah:
 - a. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan.
 - b. Litbang hasil hutan.
 - c. Litbang peningkatan produktivitas hutan.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan kegiatan yang berkaitan dengan fokus prioritas tersebut adalah :
 - a. Penyuluhan kehutanan.
 - b. Penyelenggaraan diklat aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya.

Sedangkan dalam upaya peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, pembangunan kehutanan termasuk dalam prioritas pembangunan Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan. Pembangunan kehutanan pada prioritas pembangunan bidang tersebut diarahkan pada 4 (empat) fokus prioritas, yaitu:

1. Pemantapan kawasan hutan. Pada fokus prioritas tersebut akan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, meliputi:
 - a. Penyusunan rencana makro kawasan hutan.
 - b. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH).
 - c. Penguatan kawasan hutan.
 - d. Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan.
 - e. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
2. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, dengan 5 (lima) kegiatan, yakni:
 - a. Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial.
 - b. Pengembangan konservasi spesies dan genetik.
 - c. Penyidikan dan perlindungan hutan.
 - d. Pengendalian kebakaran hutan.
 - e. Pengembalian pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
3. Peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Pada fokus prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - a. Pengembangan perbenihan tanaman hutan.
 - b. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
 - c. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas.
4. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan, meliputi:
 - a. Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam.
 - b. Penelitian dan pengembangan kebijakan kehutanan dan perubahan iklim.

Kegiatan-kegiatan di lingkup Kementerian Kehutanan, selain merupakan kegiatan prioritas pembangunan nasional serta pembangunan bidang juga merupakan bagian dari pembangunan lintas bidang yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, yang merupakan respon terhadap upaya-upaya penanggulangan dampak negatif perubahan iklim, antara lain :

- a. Penyidikan dan perlindungan hutan.
- b. Pengendalian kebakaran hutan.

- c. Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial.
- d. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan.
- e. Peningkatan pengelolaan hutan tanaman.
- f. Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi.
- g. Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi.
- h. Penyusunan rencana makro kawasan hutan.
- i. Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan.
- j. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH).
- k. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- l. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
- m. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di daerah aliran sungai (DAS) Prioritas.
- n. Pengembangan perhutanan sosial.
- o. Penelitian dan pengembangan kebijakan kehutanan dan perubahan iklim.
- p. Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam.
- q. Pendidikan dan pelatihan kehutanan, dan penyuluhan kehutanan

Indikator kegiatan-kegiatan sebagai implementasi dari substansi inti prioritas pembangunan nasional serta berdasarkan prioritas bidang pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam RPJMN Tahun 2010-2014 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, selanjutnya diuraikan pada bagian Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

1. Kebijakan Prioritas

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Kehutanan menetapkan 8 (delapan) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:

- a. Pemantapan Kawasan Hutan.
- b. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
- c. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
- d. Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- e. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
- f. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
- g. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan.
- h. Penguatan Kelembagaan Kehutanan.

2. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2010-2014 Kementerian Kehutanan akan melaksanakan 7 program, terdiri dari 4 jenis program teknis kehutanan dan 3 jenis program dukungan administratif. Program dan kegiatan-kegiatan serta indikator kinerja utama setiap program dan kegiatan tersebut adalah:

- a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program di atas antara lain:

- 1) Perencanaan kawasan hutan belum terintegrasi secara komprehensif.
- 2) Data dan informasi sumberdaya hutan belum mantap.

- 3) Belum seluruh kawasan hutan terbagi dan terkelola dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH).
- 4) Peta penunjukan kawasan hutan provinsi belum terjabarkan/ ditindaklanjuti dengan peta mikro penunjukan kawasan hutan kabupaten/kota, sehingga belum menjadi acuan yang mantap dalam penetapan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten / kota.
- 5) Kawasan hutan yang telah dilepaskan statusnya untuk sektor lain belum termanfaatkan secara optimal.
- 6) Hak-hak pihak lain dalam kawasan hutan belum teridentifikasi secara detail sehingga masuk dalam kawasan hutan.
- 7) Legitimasi batas kawasan hutan masih lemah baik secara hukum maupun fisik di lapangan.
- 8) Konflik penggunaan lahan di dalam kawasan hutan belum seluruhnya terselesaikan secara efektif.

Tujuan

Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan serta rencana makro kehutanan guna terwujudnya kemantapan kawasan hutan dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH), sehingga terdapat pengakuan atas status hukum dan fungsi kawasan hutan, serta terkendalinya penggunaan dan pemanfaatan kawasan.

Outcome/hasil

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien. Kondisi ini antara lain sebagai prakondisi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, serta secara tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan terhadap isu-isu perubahan iklim.

Indikator kinerja utama

- 1) Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul.
- 2) Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), paling tinggi 80% dari pemohon.
- 3) Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul.
- 4) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
- 5) Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100%.
- 6) Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di 28 provinsi.

Potensi hambatan

- 1) Akurasi data dan informasi sumberdaya hutan belum sampai pada tingkat detail untuk operasionalisasi pengelolaan hutan.
- 2) Konflik kepentingan penggunaan kawasan hutan termasuk resistensi para pihak dalam mengakomodir kepentingannya.
- 3) Pemahaman terhadap konsep, proses dan operasionalisasi KPH masih beragam.
- 4) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan

Output/keluaran dari pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersedianya perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengembangan jaringan komunikasi data kehutanan. Sedangkan indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul.
- b) Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW) di seluruh Indonesia (33 provinsi).
- c) Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul, dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.

2) Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pelaksanaan kegiatan tersebut akan memberikan *output*/ keluaran berupa terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan KPH meliputi:

- a) Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia (33 provinsi).
- b) Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi.
- c) Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi.
- d) Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul.
- e) Peta areal kerja dan peta pencadangan ijin usaha kehutanan, meliputi ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan tanaman/hutan alam/restorasi ekosistem (IUPHHK-HT/HA/RE), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), terselesaikan 90%.

3) Penguatan Kawasan Hutan

Kegiatan di atas akan menghasilkan keluaran (*output*) berupa terselesaikannya penataan batas kawasan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Indikator-indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
- b) Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan seluruhnya (100%).
- c) Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%.
- d) Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.
- e) Penerbitan surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.

4) Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan adalah tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan yang meliputi hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan, dan pengelolaan jaringan data spasial, dengan indikator kinerja utama berupa:

- a) Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul.
- b) Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul.

- c) Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul.
 - d) Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali *update*.
- 5) Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan

Pelaksanaan kegiatan diatas adalah untuk menghasilkan *output*/ keluaran berupa terkendalinya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja utama kegiatan tersebut adalah:

- a) Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon.
 - b) Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 33 provinsi.
 - c) Wajib bayar tertib melakukan membayar PNBP penggunaan kawasan hutan minimal sebanyak 80%.
 - d) Peraturan perundangan tentang pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul.
- 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Keluaran (*output*) pelaksanaan kegiatan di atas adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berjalan secara efektif dan efisien, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang menjadi bagian untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola. Indikator kinerja utama pelaksanaan kegiatan tersebut berupa:

- a) Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 1 judul, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).
 - b) Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 58 satuan kerja per tahun.
 - c) Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 260 orang per tahun.
 - d) Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul.
 - e) Paket kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul.
- b. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

Permasalahan

Beberapa permasalahan esensial yang terkait dengan pelaksanaan Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi di atas antara lain:

- 1) Masih kurangnya jaminan kepastian dan keamanan investasi untuk berusaha dibidang kehutanan antara lain akibat belum memadainya instrumen peraturan perundang-undangan, dan masih belum mantapnya pembagian status kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Belum adanya pengelola kawasan hutan produksi di tingkat tapak dalam bentuk kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), sehingga mengakibatkan antara lain tidak 'terurusnya' kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin.
- 3) Masih kurangnya data dan informasi areal untuk usaha hutan tanaman rakyat (HTR).
- 4) Penyelenggaraan tertib peredaran hasil hutan dapat memungkinkan timbulnya ekonomi biaya tinggi.
- 5) Kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu belum optimal.

- 6) Koordinasi pengelolaan hutan produksi serta hasil-hasilnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mantap.
- 7) Belum seimbangnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari hutan alam produksi, hutan tanaman dan hutan rakyat.

Tujuan

Optimalisasi pengelolaan hutan produksi secara lestari, sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Kegiatan-kegiatan serta indikator utama dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung respon terhadap isu perubahan iklim.

Outcome/hasil

- 1) Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya saing industri primer hasil hutan.
- 2) Peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan.

Indikator kinerja utama

- 1) Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP dan usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan).
- 2) Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem.
- 3) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha.
- 4) Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan tanaman pada hutan tanaman seluas 2.650.000 ha).
- 5) Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat 10%.
- 6) Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu).

Potensi hambatan

- 1) Resistensi pihak-pihak tertentu atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan produksi yang mengedepankan kepentingan-kepentingan jangka pendek.
- 2) Perbaikan/penyempurnaan instrumen kelembagaan, khususnya peraturan peundang-undangan, dan pengembangan Iptek dan SDM Kehutanan, memerlukan waktu yang relatif lama.
- 3) Minat investasi dibidang pemanfaatan hutan produksi relatif kurang karena jangka kapital dan *margin return* yang relatif lama, dan *interest* biaya/bunga pinjaman yang relatif tinggi.
- 4) Bahan baku dalam negeri industri pengolahan hasil hutan kurang terjamin.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Peningkatan Perencanaan Pengelolaan hutan Produksi

Output/keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha

pemanfaatan hutan produksi. Indikator kinerja utama terwujudnya *output* dimaksud adalah:

- a) Terbentuknya KPHP pada kawasan-kawasan hutan produksi.
- b) Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pemanfaatan pada 26 provinsi.

2) Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi

Output/keluaran dari kegiatan peningkatan hutan alam produksi adalah peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan alam. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari:

- a) Produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan meningkat sebesar 5%.
- b) Unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) meningkat sebesar 50%.
- c) 50% produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu.
- d) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha.

3) Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman

Kegiatan di atas akan menghasilkan *output*/keluaran berupa peningkatan produksi hutan tanaman. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari:

- a) Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha.
- b) Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (hutan tanaman industri/HTI dan hutan tanaman rakyat/HTR) seluas 2,65 juta ha.
- c) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebanyak 50 unit manajemen hutan tanaman.

4) Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, dengan indikator kinerja utama berupa:

- a) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hutan produksi meningkat 10%.
- b) Implementasi sistem informasi manajemen penatausahaan hasil hutan (SIM PUHH) secara *on line* di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IUIPHHK.

5) Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan peningkatan usaha industri primer kehutanan adalah meningkatnya kinerja industri pengolahan hasil hutan, dengan indikator kinerja utama berupa:

- a) Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat menjadi 75%.
- b) Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
- c) Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun).

6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) berjalan secara efektif dan efisien, baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan tersebut adalah menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola lingkup Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama kegiatan ini adalah:

- a) Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun.
- b) Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun.
- c) Tersusunnya dan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun.
- d) Tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada 24 unit kerja per tahun

c. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Permasalahan

Beberapa permasalahan utama yang terkait dengan pelaksanaan program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan, antara lain:

- 1) Konflik kawasan konservasi masih marak yang tercermin dari perambahan dan penguasaan lahan secara illegal.
- 2) Peredaran dan penguasaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi secara illegal masih banyak.
- 3) Masih terjadinya pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal.
- 4) Belum adanya teknologi yang tepat guna dalam pembukaan lahan tanpa bakar.
- 5) Modal sosial penanggulangan kebakaran lahan dan hutan masih lemah, sehingga kepedulian untuk penanggulangannya oleh pihak-pihak di luar kehutanan masih kurang.
- 6) Potensi dan penilaian terhadap pemanfaatan jasa lingkungan kehutanan dan wisata alam masih kecil, sehingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan masyarakat dari kegiatan tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan potensinya.

Tujuan

Meningkatkan 'kemandirian' pengelolaan kawasan konservasi, terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan hak-hak negara atas kawasan dan hasil hutan, serta meningkatnya penerimaan negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumberdaya alam. Beberapa kegiatan dalam program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan sangat erat kaitannya dalam merespon terhadap isu-isu perubahan iklim, utamanya dalam hal menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

Outcome/hasil

Biodiversity dan ekosistemnya berperan *significant* sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global.

Indikator kinerja utama

- 1) Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan *flagship*, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, *trust fund*, dan kolaborasi sebanyak 4 unit.
- 2) Populasi spesies yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi populasi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat.

- 3) Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar/TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran hutan) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 75%.
- 4) *Hotspot* (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.
- 5) Pangsa pasar wisata alam dalam pasar wisata nasional meningkat secara signifikan sebesar 40%

Potensi hambatan

- 1) Potensi jenis dan jumlah keanekaragaman hayati belum diketahui secara pasti.
- 2) *Assessment* nilai manfaat kawasan konservasi masih rendah.
- 3) Kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi secara struktural masih tertinggal.
- 4) Kapasitas institusi penanggulangan kebakaran hutan di tingkat lapangan masih kurang.
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian spesies yang dilindungi, sehingga masih maraknya perburuan liar dan penguasaan jenis tumbuhan dan satwa liar secara illegal.
- 6) Keperluan dukungan pembiayaan yang sangat besar.

Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan terdiri dari:

- 1) Pengembangan Konservasi Kawasan dan Ekosistem Esensial Lainnya

Kegiatan tersebut akan menghasilkan *output* berupa peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional/TN dan 477 unit kawasan konservasi/KK lainnya (cagar alam/CA, suaka margasatwa/SM, taman buru/TB dan hutan lindung/HL) dan ekosistem esensial lainnya. Indikator kinerja utama pencapaian *output*/keluaran tersebut adalah:

- a) Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM dan TB) dan HL menurun sebanyak 5%.
- b) Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat sebesar 10%.
- c) Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah).
- d) Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi.
- e) Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas.
- f) Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi.
- g) Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller).

- 2) Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan di atas adalah meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar (TSL), dengan indikator kinerja utama berupa:

- a) Populasi spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.
- b) Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5%.
- c) Kerjasama internasional dan konvensi dibidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun.
- d) Penyelenggaran skema DNS 2 aktifitas.
- e) Penguatan kapasitas aparaturnya dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi.

3) Penyidikan dan Perlindungan Hutan

Kegiatan Penyidikan dan Perlindungan Hutan akan menghasilkan *ouput*/keluaran berupa meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari:

- a) Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20%.
- b) Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 75%.
- c) Tunggakan perkara (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun.
- d) Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi.

4) Pengendalian Kebakaran Hutan

Keluaran/*output* kegiatan di atas adalah meningkatnya sistem pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan. Indikator kinerja utama pencapaian *output* tersebut adalah:

- a) Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009
- b) Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009
- c) Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 propinsi).

5) Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan di atas adalah meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, dengan indikator kinerja utama antara lain:

- a) Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit.
- b) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.
- c) Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.
- d) Pelaksanaan *demonstration activity* REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut).
- e) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi pada 27 provinsi.

6) Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHKA berjalan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama kegiatan tersebut adalah:

- a) Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 unit pelaksana teknis (UPT) menjadi 77 UPT.
- b) Pembentukan 6 UPT baru Direktorat Jenderal PHKA di Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara.
- c) Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial, asistensi teknik dan program penghapusan hutang melalui DNS meningkat setiap tahunnya minimal 2 dokumen per tahun.
- d) Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun.
- e) Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 dokumen.
- f) Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan *flagship*, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, *trust fund*, dan kolaborasi sebanyak 4 unit.

d. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program di atas antara lain:

- 1) Lemahnya prakondisi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang dicirikan antara lain masih beragamnya pemahaman dan persepsi pembangunan berbasis DAS, standar penggunaan fungsi lahan belum tegas, koordinasi dan keterpaduan pada tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi antar sektor mulai tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota belum efektif.
- 2) Kapasitas pelayanan birokrasi dalam pengembangan perhutanan sosial masih kurang, yang ditunjukkan antara lain dengan adanya kerumitan ketentuan dan prosedur administrasi pemberdayaan masyarakat, termasuk mengakomodasi kelompok masyarakat adat.
- 3) Unit kerja dan prosedur pengurusan pengembangan dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum efektif, sehingga menyebabkan ketidakpastian pemanfaatan HHBK khususnya oleh masyarakat.
- 4) Kelembagaan masyarakat di tingkat petani dalam pengembangan hutan rakyat masih lemah, serta kapasitas kelembagaan pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) untuk fasilitasi pengembangan hutan rakyat masih kurang.
- 5) Belum mantapnya kelembagaan pengelolaan benih tanaman hutan.

- 6) Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga dapat menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.

Tujuan

Pengelolaan sumberdaya lahan oleh para pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat) yang berbasis DAS dilakukan secara terintegrasi, sehingga daerah aliran sungai (DAS) berfungsi lebih efektif, serta perekonomian masyarakat berbasis usaha-usaha pengembangan komoditas kehutanan meningkat.

Outcome/hasil

Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan. Beberapa indikator *output* kegiatan-kegiatan dalam program di atas baik langsung dan tidak langsung terkait dengan isu-isu pengelolaan perubahan iklim.

Indikator kinerja utama

- 1) Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 1,6 juta ha.
- 2) Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha.
- 3) Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 ha.
- 4) Fasilitasi penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha.
- 5) Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.
- 6) Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas.

Potensi hambatan

- 1) Masih kurangnya kapasitas unit kerja di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang melakukan koordinasi keterpaduan pengelolaan DAS, serta ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan DAS terpadu.
- 2) Eksklusivisme peran dan fungsi antar sektor "pengguna" lahan yang berbasis DAS.
- 3) Kapasitas kelembagaan dalam penyediaan benih dan bibit yang berkualitas dan memadai masih kurang.
- 4) Kapasitas (kemampuan dan minat) investasi masyarakat, termasuk dukungan lembaga-lembaga investasi, terhadap usaha komoditas kehutanan masih relatif rendah.
- 5) Penyuluhan (tenaga penyuluh yang handal dan program penyuluhan yang efektif) masih sangat kurang.
- 6) Ketersediaan produk dan penerapan iptek dalam pengembangan komoditas kehutanan masih kurang.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Pengembangan Perhutanan Sosial

Output/keluaran kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial adalah meningkatnya pengelolaan hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Indikator kinerja utama pencapaian *output* tersebut antara lain:

- a) Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha.
- b) Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm.
- c) Fasilitasi 50 unit kemitraan.

- d) Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi.
- e) Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha.
- f) Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan di 30 kabupaten.
- g) Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa (HD) seluas 500.000 ha.

2) Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai, dengan indikator kinerja utama berupa:

- a) Areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik.
- b) Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha.
- c) Pengembangan *seed for people*, 1 paket per tahun
- d) Pengembangan sentra bibit, 1 paket per tahun

3) Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Output/keluaran kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas. Indikator kinerja utama pencapaian output tersebut adalah:

- a) Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas
- b) Terbangun *baseline* data pengelolaan DAS di 36 BPDAS.
- c) Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 Balai Pengelolaan DAS (BPDAS).

4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan di atas adalah berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan, dengan indikator kinerja utama berupa:

- a) Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha.
- b) Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha.
- c) Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha.
- d) Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha.

5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama kegiatan tersebut adalah:

- a) Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 buah, Pedoman/NSPK 70 buah).
- b) Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan RLPS yang efektif dan efisien di 50 Satker.
- c) Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RLPS, 33 provinsi.
- d) Aparat Ditjen RLPS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPS, 50 satker.
- e) Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker.
- f) SIM RLPS, 1 unit.

- g) Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS per tahun.
- e. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program di atas antara lain:

- 1) Program-program penelitian dan pengembangan (litbang) kehutanan belum mencerminkan kebutuhan riil pengguna Iptek di bidang kehutanan.
- 2) Sebagian besar hasil riset masih dalam skala laboratorium.
- 3) Hasil-hasil riset masih sedikit yang menjadi informasi/produk Iptek yang tepat guna di tingkat lapangan.
- 4) Kapasitas tenaga penelitian dan pengembangan, khususnya di tingkat lapangan, belum optimal.
- 5) Sarana dan prasarana penelitian masih kurang.

Tujuan

Terwujudnya manajemen penelitian dan pengembangan yang efektif dan efisien, serta penyediaan produk Iptek kehutanan sebagai dasar penetapan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan hutan.

Outcome/hasil

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim.

Indikator kinerja utama

- 1) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebanyak 7 judul.
- 2) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul.
- 3) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul.
- 4) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.

Potensi hambatan

- 1) Kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan kehutanan (institusi, program, dan SDM, dan sarana dan prasarana) masih belum optimal.
- 2) Budaya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan masih kurang.
- 3) Transfer teknologi dari penghasil ke penggunan Iptek masih belum optimal.
- 4) Pembiayaan kegiatan dan pengembangan kehutanan relatif besar.
- 5) Kelembagaan pengelolaan *intellectual property right* terhadap hasil penelitian dan pengembangan masih belum optimal.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan di atas adalah tersedia dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam. Sedangkan indikator kinerja utama pencapaian *output* tersebut adalah:

- a) Iptek dasar dan terapan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul.
 - b) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul.
- 2) Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan
- Output*/keluaran berupa ketersediaan dan pemanfaatannya Iptek dasar dan terapan hutan tanaman. Indikator kinerja utama pencapaian *ouptut* tersebut antara lain berupa:
- a) Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul.
 - b) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul.
- 3) Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
- Ouptut*/keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan adalah ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan yang bidang pengolahan hasil hutan, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul
 - b) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul
- 4) Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim
- Output*/keluaran kegiatan tersebut di atas adalah ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan lansekap hutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan. Indikator kinerja utama pencapaian *output* tersebut adalah:
- a) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul
 - b) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.
- 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- Output*/keluaran pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan secara efektif dan efisien baik pada unit kerja di pusat maupun di daerah, dan menjadi bagian dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan. Sedangkan indikator kinerja utama pencapaian *output* tersebut adalah:
- a) Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun.
 - b) Laporan dan evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun.
 - c) Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun.
 - d) Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun.
 - e) Tata laksana keuangan, umum, kerjasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun.

f. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan
Permasalahan

Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan, antara lain:

- 1) Profesionalisme tenaga fungsional auditor yang berkaitan dengan kompetensi, kapabilitas dan integritasnya masih terbatas, sehingga pelayanan pengawasan belum maksimal.
- 2) Lemahnya implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sehingga hambatan, penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- 3) Hasil audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Tujuan

Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Outcome/hasil

Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan.

Indikator kinerja utama

- 1) Laporan hasil audit reguler sebanyak 1.200 laporan
- 2) Laporan hasil audit khusus sebanyak 125 laporan
- 3) Laporan hasil revidi laporan keuangan 195 laporan.
- 4) Laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit sebanyak 300 laporan.

Potensi hambatan

- 1) Pelaksanaan pengawasan untuk tata pemerintahan yang baik terkait dengan reformasi birokrasi belum optimal.
- 2) Implementasi terhadap perubahan paradigma pengawasan dari yang bersifat *watchdog* menjadi *agent of change* (agen perubahan) dalam rangka perbaikan manajemen belum berjalan secara efektif.
- 3) Pelaksanaan pengawasan berbasis kinerja belum berjalan secara maksimal.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I

Output/keluaran kegiatan di atas adalah terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan-satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat I. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Hasil audit reguler sebanyak 300 laporan.
 - b) Review laporan keuangan sebanyak 65 laporan
 - c) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat I sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul.
- 2) Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II

Output/keluaran kegiatan dimaksud di atas adalah terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat II. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Hasil audit reguler sebanyak 300 laporan.
- b) Hasil review laporan keuangan sebanyak 50 laporan.
- c) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat II sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul.

3) Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III

Output/hasil kegiatan tersebut adalah terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat III. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Hasil audit reguler sebanyak 300 laporan.
- b) Hasil review laporan keuangan sebanyak 35 laporan.
- c) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat III sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul

4) Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV

Output/keluaran kegiatan tdi atas adalah terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat IV. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Hasil audit reguler sebanyak 300 laporan.
- b) Hasil review laporan keuangan sebanyak 45 laporan.
- c) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat IV sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul.

5) Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya audit terhadap kasus yang diduga berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan indikator kinerja utama berupa:

- a) Hasil audit khusus sebanyak 125 laporan.
- b) Hasil identifikasi khusus, serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), masing-masing sebanyak 125 laporan.
- c) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat khusus sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul.

6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas adalah terselenggaranya tata kelola administrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien, dan menjadi bagian dalam mewujudkan tata kelola birokrasi dan tata kelola, dengan indikator kinerja utama berupa:

- a) Renstra Inpektorat Jenderal Kemenhut 1 judul, Renja Inpektorat Jenderal Kemenhut 5 judul, dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, dokumen PKPT 5 judul, dan data informasi pengawasan 5 judul.

- b) Laporan lingkup Inspektorat Jenderal Kemenhut sebanyak 120 laporan (5 laporan keuangan, 5 LAKIP, 5 laporan APIP, 5 laporan tahunan, 10 laporan semesteran, 20 laporan triwulan, 60 laporan bulanan, 5 laporan kepegawaian, dan 5 laporan barang milik negara/BMN).
 - c) Laporan pencermatan kegiatan Kementerian Kehutanan sebanyak 200 laporan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit sebanyak 300 laporan, dan laporan pemutakhiran data sebanyak 25 laporan.
 - d) Peraturan bidang pengawasan sebanyak 30 dokumen dan bulletin pengawasan sebanyak 20 edisi.
 - e) Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang .
- g. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program di atas antara lain:

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara belum efektif sehingga opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan belum mencapai kategori wajar.
- 2) Piutang atas pinjaman Dana Reboisasi (DR) masih cukup besar.
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara (BMN) belum akuntabel secara optimal.
- 4) Jumlah pegawai Kementerian Kehutanan baik kualitas maupun kuantitas belum memadai.
- 5) Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan belum sepenuhnya mengakomodir perkembangan pembangunan kehutanan secara menyeluruh.
- 6) Kapasitas evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kehutanan masih kurang.
- 7) Kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kehutanan untuk pegawai pemerintah daerah yang menangani kehutanan serta masyarakat masih sangat kurang.
- 8) Jumlah tenaga penyuluh serta tata hubungan kerja penyuluhan kehutanan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat belum mencukupi.
- 9) Masih banyak produk hasil hutan belum memenuhi standard mutu sesuai dengan standard yang berlaku, serta pengelolaan lingkungan di bidang kehutanan kurang efektif.
- 10) Pengendalian pembangunan kehutanan pada tingkat regional belum sepenuhnya efektif.
- 11) Persepsi masyarakat terhadap kehutanan masih beragam.
- 12) Posisi Indonesia di bidang kehutanan pada forum internasional masih harus ditingkatkan.
- 13) Instrumen penyelenggaraan penyaluran kredit pembangunan HTI dan HTR oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kehutanan masih belum berjalan efektif.

Tujuan

Terwujudnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien.

Outcome/hasil

Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola.

Indikator kinerja utama

- 1) Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul per tahun.
- 2) terselesaikannya pinjaman/piutang sebanyak 80%.
- 3) Dokumen rencana kerja dan anggaran sebanyak 269 satuan kerja.
- 4) terselesaikan status hukum BMN Kementerian Kehutanan, termasuk asset eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi.
- 5) Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul.
- 6) Pelayanan administrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen kepegawaian.
- 7) Pertemuan multi pihak dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sebanyak 75 kali.
- 8) Pendidikan dan pelatihan kehutanan teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta untuk aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
- 9) Rancangan standard nasional Indonesai (SNI) produk dan proses bidang kehutanan sebanyak 30 judul.
- 10) Peningkatan penyelenggaraan kerjasama luar negeri bidang kehutanan.
- 11) Rencana pembangunan kehutanan regional, 4 regional dan evaluasi pembangunan kehutanan regional, 4 regional.
- 12) Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman Rakyat (HTR) seluas 324.625 ha.

Potensi hambatan

- 1) Koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan belum optimal.
- 2) Kecenderungan pagu anggaran Kementerian Kehutanan berdasarkan jumlah anggaran tahun-tahun sebelumnya sehingga belum memenuhi kebutuhan riil sesuai rencana.
- 3) Persepsi masyarakat terhadap hutan dan kehutanan sangat beragam tergantung dari kepentingan masing-masing, tidak dalam satu persepsi dimana hutan sebagai ekosistem penyangga kehidupan.
- 4) Kapasitas SDM aparat kehutanan pusat dan daerah serta masyarakat masih kurang.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan, dengan *output/keluaran* berupa terselenggaranya koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan secara baik dan mantap. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari:
 - a) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun).
 - b) Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 269 satuan kerja per tahun.

- c) Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun).
 - d) Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun.
- 2) Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian, dengan *ouput*/keluaran berupa terselenggaranya tertib dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
- a) Pelayanan administrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu kurang lebih sebanyak 50.000 dokumen.
 - b) Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang.
 - c) Pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 10 jenis.
 - d) Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun.
- 3) Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan. *Output*/keluaran kegiatan dimaksud adalah mantapnya tata hukum dan organisasi di lingkup Kementerian Kehutanan, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 jenis.
 - b) Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, dan prakondisi pengelolaan hutan, sebanyak 4 paket per tahun.
 - c) Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun.
 - d) Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik serta pengawasan melekat, sebanyak 6 paket per tahun.
- 4) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan, dengan *output*/keluaran berupa tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
- a) terselesaikannya pinjaman/piutang sebesar 80%.
 - b) Laporan keuangan Kementerian Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun), dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dimulai dari laporan keuangan tahun 2011 dan seterusnya.
 - c) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.15 triliun.
 - d) Laporan keuangan dan perbendaharaan sebanyak 33 provinsi.
- 5) Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan. *Output*/keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tertibnya pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara (BMN) Kementerian Kehutanan, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Laporan sistem akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun.

- b) Serifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang.
 - c) Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin).
 - d) Status pencatatan barang milik negara (BMN) eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan.
 - e) Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas.
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan Sumberdaya Manusia Kehutanan Lainnya. *Output/keluaran* kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kementerian Kehutanan serta SDM Kehutanan lainnya, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta.
 - b) Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang siswa.
 - c) Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan.
 - d) Sertifikat ISO 9001:2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan, 5 unit.
- 7) Penyuluhan Kehutanan. *Output/keluaran* kegiatan tersebut adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri.
 - b) Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan.
 - c) Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi.
 - d) Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket.
- 8) Pembinaan Standardisasi dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Kehutanan. *Output/keluaran* kegiatan tersebut adalah berkembangnya penerapan standard produk dan proses di bidang kehutanan dan meningkatnya pengelolaan lingkungan kehutanan. Indikator kinerja utama pencapaian *output* tersebut adalah:
- a) Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan untuk 30 jenis produk.
 - b) SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul.
 - c) Satuan pengelola hutan milik swasta dan milik rakyat terdampingi untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sebanyak 40 unit.
 - d) Satuan kerja lingkup Kementerian kehutanan terdampingi untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard internasional sebanyak 20 unit.
 - e) Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket.
- 9) Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri. *Output/keluaran* kegiatan dimaksud adalah meningkatnya peran dan posisi Indonesia di bidang kehutanan, sedangkan kinerja utama pencapaian *ouput* tersebut berupa:
- a) Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun.
 - b) Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilatereal, regional, dan multipihak) sebanyak 3 paket per tahun.
 - c) Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga.

- d) Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun.
- 10) Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan. *Output*/keluaran kegiatan tersebut adalah memperkuat pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap pembangunan kehutanan, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Kementerian Kehutanan, pemberitaan isu-isu strategis dan jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat Kementerian Kehutanan dengan media masa sebanyak 100 kali.
 - b) Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali.
 - c) Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali.
 - d) Menyiapkan bahan rapat Menteri Kehutanan pada acara rapat kerja dengan DPR RI dan DPD RI sejumlah 50 kali.
 - e) Pelayanan data dan informasi pembangunan kehutanan, 1 paket.
- 11) Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan. *Output*/keluaran kegiatan tersebut adalah fasilitasi dan ketersediaan pembiayaan pembangunan kehutanan, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri/HTI dan hutan tanaman rakyat/HTR) seluas 324.625 ha.
 - b) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak 5 judul.
 - c) Penilaian kelayakan permohonan pinjaman sebanyak 570 proposal.
- 12) Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I. *Output*/keluaran kegiatan dimaksud adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada regional I, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul.
 - b) Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).
 - c) Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul.
 - d) Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).
- 13) Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II. *Output*/keluaran kegiatan di atas adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada regional II, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a) Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul.
 - b) Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).
 - c) Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul.
 - d) Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).

- 14) Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III. *Output*/keluaran kegiatan tersebut adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada regional III, dengan indikator kinerja utama berupa:
- Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul.
 - Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).
 - Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul.
 - Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).
- 15) Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV. *Output*/keluaran kegiatan di atas adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada regional IV, dengan indikator kinerja utama berupa:
- Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul.
 - Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).
 - Laporan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul.
 - Laporan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).

C. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan 7 program dan 49 kegiatan diuraikan dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 di atas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indikasi alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.30.533,90 milyar, dengan perincian sebagaimana pada tabel di bawah.

Tabel 4. Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 sumber dana APBN.

No.	Program dan Kegiatan	Pembiayaan (Rp. milyar)
1	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1.798,36
1.1	Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	298,46
1.2	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	189,02
1.3	Pengukuhan Kawasan Hutan	393,36
1.4	Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (Hibah LN)	283,89 94,15
1.5	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	53,46
1.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	486,02
2	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	1.587,93
2.1	Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	275,66
2.2	Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman	249,49
2.3	Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan	325,53
2.4	Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	121,69
2.5	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	100,47
2.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Produksi Kehutanan	515,09
3	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	6.715,18
3.1	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial (Hibah LN)	1.309,25 77,23
3.2	Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik (DNS)	162,91 300,00
3.3	Penyidikan dan Perlindungan Hutan (Hibah LN)	776,61 59,95
3.4	Pengendalian Kebakaran Hutan	1.275,00
3.5	Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	464,69

No.	Program dan Kegiatan	Pembiayaan (Rp. milyar)
3.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	2.294,75
4	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	16.130,98
4.1	Pengembangan Perhutanan Sosial	6.239,18
4.2	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	109,44
4.3	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	721,87
4.4	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas (Hibah LN)	8.115,00 107,45
4.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	838,03
5	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	1.109,21
5.1	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	120,19
5.2	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	158,18
5.3	Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	109,74
5.4	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim	113,40
5.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang Kehutanan	607,70
6	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhut	215,54
6.1	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I	15,77
6.2	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II	16,76
6.3	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	18,58
6.4	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	18,11
6.5	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN	20,82
6.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	125,49
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan	2.976,69
7.1	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Dep. Kehutanan (Hibah LN)	134,41 -
7.2	Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian Kehutanan	93,49
7.3	Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan	55,63
7.4	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dep. Kehutanan	276,38
7.5	Penyelenggaraan Ketatasahaan, Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan	879,78
7.6	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	761,16
7.7	Penyuluhah Kehutanan	407,20
7.8	Pembinaan Standardisasi dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Kehutanan	39,01
7.9	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan	70,55
7.10	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	93,19
7.11	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I	22,82
7.12	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II	23,33
7.13	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	22,45
7.14	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	43,25
7.15	Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergilir Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman	46,10
	- Rupiah	29.900,33
	- DNS	300,00
	- Hibah LN	333,57
	J U M L A H	30.533,90

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014. Penyusunan format Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 mengacu pada struktur perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Renstra, serta sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan bagian dari reformasi perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahun, Renstra Kementerian Tahun 2010-2014, telah dirumuskan visi yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renstra, serta misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan tujuan masing-masing misi serta sasaran strategis pembangunan kehutanan tahun 2010-2014. Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan kebijakan prioritas agar sasaran strategis dari misi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan kebijakan prioritas tersebut selanjutnya dirumuskan program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanan unit-unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan. Sesuai dengan pedoman restrukturisasi program dan kegiatan, maka setiap unit eselon I-A melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap 1 (satu) program dan setiap eselon II-A melaksanakan 1 (satu) jenis kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator kinerja utama (IKU)/*key performance indicator (KPI)*, yang merupakan ukuran terhadap pencapaian pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Selanjutnya penetapan indikator-indikator kinerja baik program maupun kegiatan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, telah memastikan ketercapaian setiap indikator dalam substansi inti masing-masing prioritas pembangunan nasional dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan. Selain itu, indikator kinerja dalam Renstra Kementerian Kehutanan juga telah memastikan pencapaian target pembangunan prioritas bidang dalam Buku II RPJMN Tahun 2010-2014 yakni Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam konteks perumusan dan penetapan program dan kegiatan serta indikator-indikatornya telah mempertimbangkan sebagai respon terhadap pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumberdaya hutan, serta respon terhadap pengarusutamaan perubahan iklim menuju penurunan emisi karbon sektor kehutanan sebesar kurang lebih 13% pada tahun 2020 melalui upaya-upaya sistematis dalam skema mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pencapaian target-target di atas dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya berupa anggaran, serta penataan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra. Terkait dengan kerjasama luar negeri, bentuk-bentuk kerjasama baik kerjasama teknis maupun kerjasama finansial diarahkan guna mendukung pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 di atas, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit-unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Dana yang diperlukan untuk membiayai 7 program dan 49 kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 36,601 Trilyun (Pusat, Daerah dan UPT).

Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2010-2014, dapat

memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Kementerian Kehutanan, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud, dalam kerangka kelestarian hutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan akan tertunaikan.

LAMP IRAN

Lampiran 1

**Rencana Strategis
2010-2014**

Indikator Kinerja Tahunan

Kementerian Kehutanan

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
				Kementerian Kehutanan									
1.	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan.	<p>§ Areal hutan produksi terata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP dan usaha pemanfaatan (LUPHHK-HAHT/HBK/RE/Jasling)</p> <p>§ Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat (sebesar 5 % terdiri dari hasil hutan kayu/HBK/Jasling)</p> <p>§ Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (luas tanaman bertambah 2,65 juta Ha)</p> <p>§ Penajarsahan hasil hutan dan hutan lehutanan berjalan lebih sesuai ketentuan (PNBP meningkat 10%)</p> <p>§ Ekspor hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu)</p>						5.882,59	5.964,19	6.000,91	6.327,34	6.358,87
a.	Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman	Peningkatan produksi hutan tanaman	<p>§ Penambahan area ljin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HT/HTR) seluas 3 juta ha</p> <p>§ Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HT/HTR) seluas 2,65 juta ha.</p> <p>§ Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman</p>	450.000 ha	1000.000 ha	1.500.000 ha	2.250.000 ha	3.000.000 ha	44,72	47,51	49,89	52,38	55,00
				450.000 ha	1000.000 ha	1.500.000 ha	2.100.000 ha	2.650.000 ha					
				5 unit	17 unit	28 unit	37 unit	50 unit					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
b.	Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam	<p>\$ Produk hasil hutan kayubukan kayufasa lingkungan sebesar 5 %</p> <p>\$ Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 %</p> <p>\$ 50% produk penebangan bersertifikat Legallias Kayu</p> <p>\$ Penertiban IUPHHK-HA/RE pada area bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta ha</p>	1%	2%	3%	4%	5%	48,69	52,66	55,29	58,06	60,96
c.	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	areal hutan produksi tertata baik dalam kesuluan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemantaaan hutan produksi	<p>\$ Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi</p> <p>\$ Tersedianya area cabomusulan pemantaaan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi.</p>	20%	40%	60%	80%	100%	19,42	19,81	20,01	20,61	20,63
d.	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan hutan hasil hutan	Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • PNPB dari investasi penantaaan hutan produksi meningkat sebesar 10% • Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK 	2%	4%	6%	8%	10%	62,92	64,18	64,82	66,76	66,84
e.	Peningkatan usaha industri primer kehutanan	Peningkatan ekspor industri hasil hutan	<p>\$ Penentuan bahan baku dari hutan lanaman dan limbah meningkat 75%</p> <p>\$ Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legallias kayu meningkat 50%</p> <p>\$ Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun)</p>	15%	30%	45%	60%	75%	23,52	23,99	24,23	24,96	24,99

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen Bina Produksi Kehutanan		<p>\$ Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun</p> <p>\$ Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpancailu secara periodik pada 57 unit kerja per tahun</p> <p>\$ Tersusunnya dan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun</p> <p>\$ Tersedianya sarana kerja untuk mendukung lupas-lugas pada pada 24 unit kerja per tahun</p>	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	99,56	101,55	102,57	105,64	105,77
2.	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	<p>\$ Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul</p> <p>\$ Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNBP paling tinggi 80% dari pemohon</p> <p>\$ Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemantapan, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul</p> <p>\$ Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan</p> <p>\$ Penunjukan kawasan hutan provinsi tersesalkan 100% Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di 28 provinsi</p>	337,25	345,55	358,84	378,08	384,65					

a.	Pengkukuhan Kawasan Hutan	Tata batas kawasan hutan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	<p>§ Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan</p> <p>§ Keputusan penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%)</p> <p>§ Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% Rekomendasi lentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesainya sebanyak 75%</p> <p>§ Penanganan berupa penerbitan Surat Keputusan lentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%</p>	3.400 km	8000 km	12.000 km	18.000 km	25.000 km	70,64	76,01	79,81	83,40	83,50
b.	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung	<p>§ Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPH) di 28 provinsi</p> <p>§ Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPKK) di seluruh Indonesia</p> <p>§ Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi</p> <p>§ Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul</p> <p>§ Pele. area kerja dan peta pencadangan (IUPHK-HI dan HA, HKm, HTR) selesai 90%.</p>	4 Prov	10 Prov	16 Prov	22 Prov	28 Prov	36,10	36,82	37,56	39,25	39,30
			<p>20%</p> <p>15%</p> <p>15%</p> <p>15%</p> <p>4 Prov</p> <p>4 Prov</p> <p>4 Prov</p> <p>2 Judul</p> <p>15%</p>	40% <p>30%</p> <p>30%</p> <p>30%</p> <p>10 Prov</p> <p>10 Prov</p> <p>10 Prov</p> <p>3 Judul</p> <p>30%</p>	60% <p>45%</p> <p>45%</p> <p>45%</p> <p>16 Prov</p> <p>16 Prov</p> <p>16 Prov</p> <p>4 Judul</p> <p>50%</p>	80% <p>60%</p> <p>60%</p> <p>60%</p> <p>22 Prov</p> <p>22 Prov</p> <p>22 Prov</p> <p>4 Judul</p> <p>70%</p>	100% <p>75%</p> <p>75%</p> <p>75%</p> <p>28 Prov</p> <p>28 Prov</p> <p>28 Prov</p> <p>4 Judul</p> <p>90%</p>						

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN (hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
c.	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, peta rencana ruang, statistik dan pengembangan jaringan komunikasi data kehutanan	<p>§ Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul</p> <p>§ Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia</p> <p>§ Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul</p>	1 Judul	2 Judul	3 Judul	4 Judul	4 Judul	4 Judul	57,00	58,14	59,30	61,97	62,05
d.	Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan yang meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan pengelolaan jaringan data spasial	<p>§ Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul</p> <p>§ Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul</p> <p>§ Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul</p> <p>§ Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update</p>	1 Judul	2 Judul	3 Judul	4 Judul	5 Judul	64,48	69,49	74,98	81,44	87,65	
e.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan kelenturan yang berlaku	<p>§ Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon</p> <p>§ Wajib bayar terlibat membayar PNEP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%</p> <p>§ Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi</p> <p>§ Peraturan perundangan untuk pengendalian dan pemberian penggunaan kawasan hutan tanpa jln sebanyak 1 Judul</p>	15%	30%	45%	60%	80%	10,21	10,41	10,62	11,10	11,11	

f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). • Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) • Data pengelompokan dan penyelesaian untuk 260 orang kepegawain untuk 260 orang per tahun. • Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) • Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	1 Renstra 1 Renja	1 Renja 58 Satker	1 Renja 58 Satker	1 Renja 58 Satker	1 Renja 58 Satker	1 Renja 58 Satker	1 Renja 58 Satker	1 Renja 58 Satker	92,82	94,68	96,57	100,92	101,04
----	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	-------	-------	--------	--------

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
3.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit marabab bangsa dalam pegoaulan global	<p>\$ Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, trust fund, dan kolaborasi sebanyak 4 unit</p> <p>\$ Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah mening kat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat</p> <p>\$ Kasus baru tindak pidana kehutanan (ilegal logging, perambahan, perdaangan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselakan minim al 75%</p> <p>\$ Hot spot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun</p> <p>\$ Meningkatnya destlinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional</p>								1.354,21	1.351,04	1.345,98	1.336,34	1.327,60

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
a.	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.	<p>§ Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%</p> <p>§ Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%.</p> <p>§ Peningkatan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)</p> <p>§ Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi</p> <p>§ Peningkatan elektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas</p> <p>§ Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi</p> <p>§ Meningkatkan elektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller)</p>	1%	2%	3%	4%	5%	267,52	272,87	278,32	281,11	281,45

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN (hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
b.	Penyidikan dan Perindungan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	<p>§ Kasus baru tindak pidana kehutanan (ilegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%</p> <p>§ Tunggakan perkara (ilegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun</p> <p>§ Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%</p> <p>§ Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi</p>	15%	30%	45%	60%	75%	162,02	165,26	168,57	170,25	170,45	
c.	Pemeliharaan konservasi spesies dan genetik	Meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar	<p>§ Populasi spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat</p> <p>§ Peningkatan dan pemantauan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5%</p> <p>§ Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun</p> <p>§ Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas</p> <p>§ Perkuatan kapasitas aparatur dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi</p>	0%	1%	1,5%	2%	3%	90,01	92,56	93,21	93,54	93,58	

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
d.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	<p>§ Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009</p> <p>§ Luas kawasan hutan yang terbakar dikurangi hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009</p> <p>§ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)</p>	20%	36%	48,8%	59,2%	67,2%	300,00	275,00	250,00	230,00	220,00
e.	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	<p>§ Penguasaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit.</p> <p>§ PNBP dibidang penguasaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.</p> <p>§ Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.</p> <p>§ Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut)</p> <p>§ Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi pada 29 provinsi</p>	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit	90,00	91,80	93,64	94,57	94,69

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen Perindugan Hutan dan Konservasi Alam		<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 UPT menjadi 77 UPT Pembentukan 6 UPT baru Dijen PHKA di Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara Kejasama dan kemiraan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial, dan technical assistance dan program penghapusan hutang melalui DNS meningkat selap tahunnya, minimal 2 dokumen per tahun Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 dokumen Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayalnya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung bulu sungai dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, trust fund, dan kolaborasi sebanyak 4 unit 	25 UPT	35 UPT	45 UPT	55 UPT	61 UPT	444,66	453,55	462,24	466,87	467,43
				6 UPT	6 UPT	6 UPT	6 UPT	6 UPT					
				2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	10 dokumen					
				3 dokumen	6 dokumen	9 dokumen	12 dokumen	15 dokumen					
				116 dokumen	232 dokumen	348 dokumen	464 dokumen	580 dokumen					
				2 unit	5 unit	8 unit	10 unit	12 unit					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
b.	Pengembangan Perhutanan Sosial	meningkatkan pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	<p>§ Fasilitas penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha</p> <p>§ Fasilitas 500 kelompok/unit jln usaha pengelolaan HKm</p> <p>§ Fasilitas 50 unit kemiraan usaha HKm</p> <p>§ Fasilitas dukungan kelengkapan ketahanan pangan di 32 provinsi</p> <p>§ Fasilitas pembangunan hutan rakyat Kemiraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha</p> <p>§ Fasilitas pembentukan dan berfungsinya sentra HHHK Unggulan di 30 kabupaten</p> <p>§ Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha</p>	400.000 Ha	800.000 Ha	1.200.000 Ha	1.600.000 Ha	2.000.000 Ha	1.238,40	1.240,40	1.243,40	1.248,40	1.268,58
c.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai	<p>§ Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik</p> <p>§ Fasilitas pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha</p> <p>§ Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun</p> <p>§ Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun</p>	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	20,86	21,28	21,70	22,79	22,82
d.	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas	<p>§ Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas</p> <p>§ Terselenggaranya base line data pengelolaan DAS di 108 BPDAS</p> <p>§ Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS</p>	22 DAS	43 DAS	68 DAS	93 DAS	108 DAS	137,59	140,34	143,15	150,31	150,49

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
e.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial		<p>Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PPP/Perpres/Permenhut 12 buah, pedoman/NSPK 70 buah) infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan RLPS yang efektif dan efisien di 50 Salter</p> <p>Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RLPS, 33 Provinsi</p> <p>Aparat Dijen RLPS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPS, 50 Salter</p> <p>Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 salter</p> <p>SIM RLPS, 1 unit</p> <p>Kejasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS per tahun</p>	2 Permenhut	4 Permenhut	7 Permenhut	9 Permenhut	12 Permenhut	159,73	162,92	166,18	174,49	174,70
				50 salter	50 salter	50 salter	50 salter	50 salter					
				33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi					
				50 Salter	50 Salter	50 Salter	50 Salter	50 Salter					
				50 Salter	50 Salter	50 Salter	50 Salter	50 Salter					
				1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
				5.	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan penguasaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim	<p>§ Ipelek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengabdian DAS sebanyak 7 judul</p> <p>§ Ipelek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul</p> <p>§ Ipelek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul</p> <p>§ Ipelek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul</p>						212,26
a.	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.	Ketersediaan dan pemanfaatan ipelek dasar dan terapan bidang lansekap hutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan	<p>§ Ipelek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul</p> <p>§ Ipelek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.</p>	20%	40%	60%	80%	100%	21,70	22,13	22,58	23,48	23,51
b.	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam.	tersedia dan pemanfaatannya ipelek dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Ipelek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengabdian DAS, 7 judul. • Ipelek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna biodiversitas dan pengabdian DAS sebanyak 7 judul. 	20%	40%	60%	80%	100%	23,00	23,46	23,93	24,89	24,92

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
				c.	Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	ketersediaan dan pemanfaatannya IPTEK dasar dan terapan bidang pengolahan hasil hutan	<p>§ Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul</p> <p>§ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul</p>	20%	40%	60%	80%	100%	21,00	21,42
d.	Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan	ketersediaan dan pemanfaatannya IPTEK dasar dan terapan hutan tanaman	<p>§ Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul</p> <p>§ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul</p>	20%	40%	60%	80%	100%	30,27	30,88	31,49	32,75	32,79	
e.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun. Laporan dan Evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun. Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun Tata laksana keuangan, umum, kejasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun. 	20 Saltker	20 Saltker	20 Saltker	20 Saltker	20 Saltker	116,29	118,62	120,99	125,83	125,98	
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan			20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja
										546,56	592,72	599,44	617,99	619,99

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
a.	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan		<p>§ Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun)</p> <p>§ Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 269 satuan kerja per tahun</p> <p>§ Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul</p> <p>§ Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun.</p>	2 Renstra 2 Renja	2 Renja	2 Renja	2 Renja	2 Renja	24,23	26,76	27,03	28,18	28,21

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)									
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014					
b.	Penyenggaraan Administrasi dan Penilaian Kepegawalan		<p>§ Pelayanan administrasi kepegawalan secara akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen</p> <p>§ Pengembangan kapasitas SDM/pegaawai sebanyak 17.697 orang</p> <p>§ Pengembangan instrumen pengelabian kepegawalan sebanyak 10 jenis</p> <p>§ Penajalan Sistem Informasi Manajemen Kepegawalan (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun</p>	10.000 dok	20.000 dok	30.000 dok	40.000 dok	50.000 dok	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	16,15	18,90	19,09	19,66	19,69
c.	Penyenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan		<p>§ Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 dokumens.</p> <p>§ Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, penggunaan kawasan hutan, sebanyak 4 paket per tahun</p> <p>§ Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun</p> <p>§ Pengembangan kelembagaan dan kejalaksanaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik serta pengawasan melekat, sebanyak 6 paket per tahun</p>	4 jenis	8 jenis	12 jenis	18 jenis	22 jenis	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	9,80	11,20	11,31	11,65	11,67

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
				d.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan	<p>§ Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 71 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%</p> <p>§ Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini wajar tanpa pengecualian mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun)</p> <p>§ Laporan keuangan dan pembendaharaan sebanyak 33 propinsi</p> <p>§ Laporan SIMAK BMN Kementerian Kehutanan secara akurat dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun</p> <p>§ Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang</p> <p>§ Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin)</p> <p>§ Status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan.</p> <p>§ Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kebersihan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas.</p>	15%	30%	45%	60%	80%	51,94	54,85
e.	Penyelenggaraan Kelembagaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlempangan Kementerian Kehutanan.		221 Salkor	221 Salkor	221 Salkor	221 Salkor	221 Salkor	221 Salkor	157,98	176,40	178,16	183,51	183,73

No.	PROGRAM /KEGIATAN /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
f.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Depratemen Kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> \$ Penyelenggaraan SMK keahlianan 1.440 siswa \$ Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta \$ Kenyapsiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa \$ Sertifikasi ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit 	285 siswa 3000 orang 65 siswa 0 unit	570 siswa 6000 orang 130 siswa 1 unit	855 siswa 9000 orang 195 siswa 3 unit	1140 siswa 12000 orang 260 siswa 4 unit	1440 siswa 15000 orang 325 siswa 5 unit	143,70 150,90 152,41 156,98	143,70 150,90 152,41 156,98	143,70 150,90 152,41 156,98	143,70 150,90 152,41 156,98	143,70 150,90 152,41 156,98
g.	Penyuluhan kehutanan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> \$ Membantu 500 kelompok masyarakat produktif mandiri \$ Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan \$ Kampanye Indonesia Menanam (KM) pada 33 provinsi \$ Kemlitran/ajarng kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket 	100 Kipak 900 Org 33 Prov 1 Paket	200 Kipak 1.800 Org 33 Prov 2 Paket	300 Kipak 2.700 Org 33 Prov 3 Paket	400 Kipak 3.600 Org 33 Prov 4 Paket	500 Kipak 4.500 Org 33 Prov 5 Paket	76,74 80,76 81,57 84,01	76,74 80,76 81,57 84,01	76,74 80,76 81,57 84,01	76,74 80,76 81,57 84,01	76,74 80,76 81,57 84,01
h.	Pembinaan Standarisasi dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> \$ Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan sebanyak 30 produk \$ SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul \$ Satuan pengelola hutan milik swasta dan milik rakyat terdampingi untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sebanyak 40 unit \$ Satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan terdampingi untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard internasional sebanyak 20 unit \$ Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket 	6 produk 4 Judul 8 unit	12 produk 8 Judul 16 unit	18 produk 12 Judul 24 unit	24 produk 16 Judul 32 unit	30 produk 20 Judul 40 unit	7,54 7,69 7,77 8,00	7,54 7,69 7,77 8,00	7,54 7,69 7,77 8,00	7,54 7,69 7,77 8,00	7,54 7,69 7,77 8,00

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
i.	Pembinaan dan Koordinasi Kejasama Luar Negeri		<p>§ Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun</p> <p>§ Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket</p> <p>§ Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga</p> <p>§ Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun</p>	3 paket	2 paket	3 paket	4 paket	5 paket	16,43	18,76	18,95	19,52	19,54
j.	Penyerahan dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan		<p>§ Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Kementan, pembelian issue-issue strategis dan jumpa pers Menteri Kehutanan dan Pejabat Kementan dengan media masa sejumlah 100 kali</p> <p>§ Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali</p> <p>§ Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali</p> <p>§ Menyampaikan bahan rapat Menteri Kehutanan pada acara rapat kerja dengan DPR RI dan DPD RI sejumlah 50 kali</p> <p>§ Pelayanan data dan informasi pembangunan kehutanan, 1 paket</p>	20 kal	40 kali	60 kali	80 kali	100 kali	12,04	14,30	14,44	14,88	14,89

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
k.	Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan		<p>§ Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat) seluas 324.625 ha</p> <p>§ Rencana Bisnis dan anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak 5 judul</p> <p>§ Penilaian kelayakan pemohonan pinjaman sebanyak 570 proposal</p>	64.925 ha	129.850 ha	194.775 ha	259.700 ha	324.625 ha	9,85	10,80	10,91	11,24	11,25
l.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I		<p>§ Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul</p> <p>§ Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul</p> <p>§ Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul</p> <p>§ Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul</p>	1 judul	2 judul	3 judul	4 judul	5 judul	4,41	4,50	4,54	4,68	4,69
m.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II		<p>§ Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul</p> <p>§ Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul</p> <p>§ Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul</p> <p>§ Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul</p>	1 judul	2 judul	3 judul	4 judul	5 judul	4,51	4,60	4,65	4,79	4,79

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
				n.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	<ul style="list-style-type: none"> \$ Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul \$ Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul \$ Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul \$ Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 1 judul 2 judul 1 judul 2 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 1 judul 3 judul 1 judul 3 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 1 judul 4 judul 1 judul 4 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 1 judul 5 judul 1 judul 5 judul 	4,34	4,43	4,47
o.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	<ul style="list-style-type: none"> \$ Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul \$ Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul \$ Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul \$ Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 1 judul 2 judul 1 judul 2 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 1 judul 3 judul 1 judul 3 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 1 judul 4 judul 1 judul 4 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 1 judul 5 judul 1 judul 5 judul 	6,90	7,87	8,75	9,23	10,50		
7.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> \$ Tenunjudhya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan 					41,41	42,24	43,08	44,38	44,43	
a.	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 65 laporan • Renja Inspektorat I sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	<ul style="list-style-type: none"> 120 laporan 26 laporan 2 Renja 2 PKPT 2 lap. tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> 180 laporan 39 laporan 3 Renja 3 PKPT 3 lap. tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> 240 laporan 52 laporan 4 Renja 4 PKPT 4 lap. tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> 300 laporan 65 laporan 5 Renja 5 PKPT 5 lap. tahunan 	3,03	3,09	3,15	3,25	3,25		

b	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit regulier sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 50 laporan Renja Inspektorat II sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	60 laporan 10 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	120 laporan 20 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	180 laporan 30 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	240 laporan 40 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	300 laporan 50 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	3,22	3,28	3,35	3,45	3,45
c	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit regulier sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 35 laporan Renja Inspektorat III sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	60 laporan 7 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	120 laporan 14 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	180 laporan 21 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	240 laporan 28 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	300 laporan 35 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	3,57	3,64	3,71	3,83	3,83
d	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit regulier sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 45 laporan Renja Inspektorat IV sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	60 laporan 9 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	120 laporan 18 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	180 laporan 27 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	240 laporan 36 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	300 laporan 45 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	3,48	3,55	3,62	3,73	3,73
e	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berinkansi KKN	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit khusus sebanyak 125 laporan Laporan hasil identifikasi khusus serta pengumpulan bahan dan keterangan (publikasi) masing-masing sebanyak 125 laporan Renja Inspektorat khusus sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	25 laporan 25 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	50 laporan 50 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	75 laporan 75 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	100 laporan 100 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	125 laporan 125 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	4,00	4,08	4,16	4,29	4,29

No.	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
f	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektoral Jenderal Kementerian Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Inspektoral Jenderal Kementerian 1 judul, Renja Inspektoral Jenderal Kementerian 5 judul, dokumen RKA/KU/DIPA 5 judul, dokumen PKPT 5 judul dan data informasi pengawasan 5 judul • Laporan Inggup/lien Kementerian 120 laporan (Lakip, APIP, Tahunan, Bulanan, Triwulan, semesteran, Kepegawaian dan laporan BMN) • Laporan pertemuhan kegiatan Kementerian 200 laporan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit 300 laporan dan laporan penulakhiran data 25 laporan • Peraturan bidang pengawasan 30 dokumen dan buletin pengawasan 20 edisi • Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang 	1 Renstra 1 Renja 1 PKPT	2 Renja 2 PKPT	3 Renja 3 PKPT	4 Renja 4 PKPT	5 Renja 5 PKPT	24,11	24,59	25,08	25,84	25,87

Lampiran 2**PRIORITAS NASIONAL 2010-2014 (RPJM
BUKU I)**

- Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
- Prioritas 6 : Infrastruktur
- Peioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Kementerian Kehutanan

Matriks RPJM Buku I Kementerian Kehutanan

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF				PEMBAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)									
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total			
A	SUMBERDAYA MANUSIA															
1	Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutimen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi secara terpusat selambat-lambatnya 2011															
1.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenhut															
1.1.1	Penyelenggaraan administrasi dan penataan kepegawaian Kemenhut	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang Pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 10 jenis Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun 	10.000 dok	20.000 dok	30.000 dok	40.000 dok	50.000 dok	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	93,49
1.1.2	Penyelenggaraan Diklat aparatur dan SDM kehutanan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan SMK Kehutanan 1.440 orang siswa Diklat teknis dan administrasi, 15.000 orang peserta Karya siswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa Sertifikat ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit 	285 siswa	570 siswa	855 siswa	1.140 siswa	1.440 siswa	3.000 Org	6.000 Org	9.000 Org	12.000 Org	15.000 Org	15.000 Org	15.000 Org	15.000 Org	157,17
			16,15	18,90	19,09	19,66	19,69	143,70	150,90	152,41	156,98	157,17	157,17	157,17	157,17	761,16

Prioritas 5: Ketahanan Pangan

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF				PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)																		
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total												
A	LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN, DAN TATA RUANG PERTANIAN																								
1	Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian																								
1.1	Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan																								
1.1.1	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%; Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa jln sebanyak 1 judul 	16%	32%	48%	64%	80%	15%	30%	45%	60%	80%	6 prov	12 prov	18 prov	26 prov	32 prov	1 judul	1 judul	10,21	10,41	10,62	11,10	11,11	53,46

Prioritas 6: Infrastruktur

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)															
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total										
A	TANAH DAN TATA RUANG																						
1	Konsolidasi kebijakan penangan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu																						
1.1	Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan																						
1.1.1	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 Prop.) Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul. 	1 judul	2 judul	3 judul	4 judul	4 judul	4 judul	50%	70%	80%	90%	100%	2 judul	4 judul	8 judul	57,00	58,14	59,30	61,97	62,05	298,46	
1.1.2	Penguakuan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%). Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%. Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% 	3.400 km	8.000 km	12.000 km	18.000 km	25.000 km	20%	40%	60%	80%	100%	15%	30%	45%	60%	75%	70,64	76,01	79,81	83,40	83,50	393,36

1.1.3	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon Wajib bayar terrib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%. Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penerbitan penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 	16%	32%	48%	64%	80%	10.21	10.41	10.62	11.10	11.11	53,46	
1.2	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi													
1.2.1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi Tersedianya areal calon/ usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi 	20%t 20%	40% 40%	60% 60%	80%t 80%	100% 100%	19.42	19.81	20.01	20.61	20.63	100,47	
1.3	Konservasi keanekaragaman hayati dan peifindungan hutan													
1.3.1	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurut sebanyak 5% Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyanga kehidupan meningkat 10%. Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller) 	1% 2% 2 Prov 0 lokasi 10 TN 0 provinsi 3 Provinsi	2% 4% 4 Prov 1 lokasi 20 TN 2 Provinsi 3 Provinsi	3% 6% 6 Prov 2 lokasi 30 TN 4 Provinsi 3 Provinsi	4% 8% 9 Prov 3 lokasi 40 TN 6 Provinsi 3 Provinsi	5% 10% 12 Prov 4 lokasi 51 TN 8 Provinsi 3 Provinsi	253,57 13,95	258,64 14,23	263,81 14,51	266,45 14,66	266,77 14,68	1.309,25 72,03	

Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

No.	PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	SUBSTANSI INTI / PERUBAHAN IKLIM	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)									
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total				
A																		
1		Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut																
1.1		Peningkatan pemanfaatan hutan produksi																
1.1.1		Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengendalian produksi kayu pada area kerja IUPHHK-HA/HT di hutan gambut, 1 paket 	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		*	*	*	*	*	*	*	*	
1.2		Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan																
1.2.1		Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan ekosistem esensial hutan gambut sebagai penyangga kehidupan, 1 paket Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi Peningkatan pengamanan hutan konservasi di hutan gambut dari illegal logging, perburuan dan lain-lain, 1 paket 	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		2 Prov.	4 Prov.	6 Prov.	8 Prov.		*	*	*	
1.2.2		Penyidikan dan perlindungan hutan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket							*	*	*	
1.2.3		Pengendalian kebakaran hutan	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan hot spot di hutan gambut, 1 paket Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di DAOPS yang terdapat hutan gambut, 1 paket 	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		*	*	*	
1.2.4		Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	<ul style="list-style-type: none"> Peleaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) 	0 KK	0 KK	1 KK	1 KK	2 KK							*	*	*	
1.3		Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat													*	*	*	
1.3.1		Penyelenggaraan RHL dan reklamasi hutan di DAS prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas rehabilitasi hutan gambut seluas 120.000 ha 	24.000 ha	48.000 ha	72.000 ha	96.000 ha	120.000 ha							75	75	75	375
1.4		Penelitian dan pengembangan	Kemenuhut															

1.4.1	Libang kebijakan kehutanan dan perubahan iklim	• Penyediaan jpek dasar dan terapan pengelolaan lahan gambut, 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
2	Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun		Bagian dari indikator masing-masing kegiatan													
2.1	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi															
2.1.1	Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar 5% • Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% • 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu • Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta Ha 	1% 10% 10% 300.000 Ha	2% 20% 20% 650.000 Ha	3% 30% 30% 1.100.000 Ha	4% 40% 40% 1.750.000 Ha	5% 50% 50% 2.500.000 Ha	48,69	52,66	55,29	58,06	60,96	275,66			
2.1.2	Peningkatan pengelolaan hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3,0 juta ha • Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman 	450.000 ha 450.000 Ha 5 unit	1.000.000 ha 1.000.000 Ha 17 unit	1.500.000 ha 1.500.000 Ha 28 unit	2.250.000 ha 2.100.000 Ha 37 unit	3.000.000 ha 2.650.000 Ha 50 unit	44,72	47,51	49,89	52,38	55,00	249,49			
2.1.3	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi • Tersedianya areal calon/ usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi 	20%t 20%	40% 40%	60% 60%	80%t 80%	100% 100%	19,42	19,81	20,01	20,61	20,63	100,47			

A.3.3.2	Pengendalian kebakaran hutan	<p>§ Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009</p> <p>§ Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 provinsi) 	20%	36,0%	48,8%	59,2%	67,2%	300,00	275,00	250,00	230,00	220,00	1.275,00
A.3.3.3	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial	<p>§ Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%</p> <p>§ Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%</p> <p>§ Penanganan perubahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)</p> <p>§ Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi</p> <p>§ Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas</p> <p>§ Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi</p> <p>§ Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Belung Kerihun, CA Muller)</p>	1%	2%	3%	4%	5%	253,57 13,95	258,64 14,23	263,81 14,51	266,45 14,66	266,77 14,68	1.309,25 72,03
A.3.3.4	Konservasi spesies dan genetik	<p>§ Populasi spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat</p> <p>§ Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5%</p> <p>§ Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun</p> <p>§ Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas</p> <p>§ Penguatan kapasitas aparat dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi</p>	0%	1%	1,5%	2%	3%	30,01 60,00	32,56 60,00	33,21 60,00	33,54 60,00	33,58 60,00	162,91 300,00

1.1.3	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial	<p>§ Konflik dan tekanan terhadap kawasan laman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%</p> <p>§ Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%.</p> <p>§ Penanganan perubahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)</p> <p>§ Restorasi ekosistem kawasan konservasi 4 lokasi</p> <p>§ Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas</p> <p>§ Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi</p> <p>§ Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller)</p>	1%	2%	3%	4%	5%	253,57 13,95	258,64 14,23	263,81 14,51	266,45 14,66	266,77 14,68	1.309,25 72,03	
1.2	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi													
1.2.1	Peningkatan pengelolaan hutan tanaman	<p>§ Penambahan area ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha</p> <p>§ Penambahan area tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2.65 juta ha.</p> <p>§ Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman</p>	450.000 ha 450.000 ha 5 unit	1000.000 ha 1000.000 ha 17 unit	1.500.000 ha 1.500.000 ha 28 unit	2.250.000 ha 2.100.000 ha 37 unit	3.000.000 ha 2.650.000 ha 50 unit	44,72	47,51	49,89	52,38	55,00	249,49	
2	Penghentian kerusakan lingkungan termasuk di 11 DAS yang rawan bencana													
2.1	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat													
2.1.1	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas Pembangunan base line data pengelolaan DAS di 108 BPDAS Data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS RHL di 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbang, Jatim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu) 	22 DAS 7 unit 7 unit 118.300 ha	43 DAS 43 unit 14 unit 218.675 ha	68 DAS 68 unit 21 unit 318.950 ha	93 DAS 93 unit 28 unit 435.775 ha	108 DAS 108 unit 36 unit 552.600 ha	137,59	140,34	143,15	150,31	150,49	721,87	
2.1.2	Penyelenggaraan RHL dan reklamasi hutan di DAS prioritas								*	*	*	*	*	*

2.1.3	Pengembangan perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKM) di 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbang, Jalim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu) • Fasilitasi pembangunan hutan rakyat 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbang, Jalim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu) • Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbang, Jalim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu) • Fasilitasi hutan rakyat di 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbang, Jalim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu) 	400.000 Ha	800.000 Ha	1.200.000 Ha	1.600.000 Ha	2.000.000 Ha	*	*	*	*	*	*	
2.2	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan													
2.2.1	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial	<p>§ Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%</p> <p>§ Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%.</p> <p>§ Penanganan perubahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)</p> <p>§ Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi</p> <p>§ Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas</p> <p>§ Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi</p> <p>§ Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area Hob (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Belung Kerihun, CA Muller)</p>	1%	2%	3%	4%	5%	253,57 13,95	258,64 14,23	263,81 14,51	266,45 14,66	266,77 14,68	1.309,25 72,03	*

C		PEMANGGULANGAN BENCANA		Bagian dari indikator masing-masing kegiatan		*) bagian dari alokasi anggaran setiap kegiatan	
1	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan						
1.1	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan						
1.1.1	Pengendalian kebakaran hutan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan, 1 paket per tahun • Peningkatan penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan, 1 paket per tahun 						*
1.1.2	Penyidikan dan perlindungan hutan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*
1.2	Dukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenhut						
1.2.1	Penyelenggaraan Diklat aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*
	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan, 1 paket per tahun • Penyuluhan penanggulangan kebakaran hutan • Kampanye penanggulangan kebakaran hutan, 1 paket per tahun 						*
1.2.2	Penyuluhan kehutanan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*
1.2.3	Penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*

Lampiran 3a | Rencana Strategis
2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional – Kementerian Kehutanan

Program
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan
Pemantapan Kawasan Hutan

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL I SUMATERA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional I										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Bengkulu	Lampung	Babel	Kepri
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Kegiatan : 1. Pengukuhan Kawasan Hutan													
	• Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Km	8.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	750	1.000	300	200
	• Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%).	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	• Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%.	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	• Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	• Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	• Penetapan wilayah KPHP di 28 provinsi	Propinsi	8	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	• Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. *) Wilayah KPHK tidak dipisahkan berdasarkan administrasi pemerintahan provinsi	Propinsi	18	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
	• Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 propinsi.	Propinsi	8	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1
	• Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul.	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Peta areal kerja dan peta pencadangan (UPHHK-HT dan HA, RE, HKm, HTR, Hutan Desa) selesai 90%.	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) Data pengeluaran dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) 	Salkes / tahun	15	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	<ul style="list-style-type: none"> Data pengeluaran dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang 	Orang	199	-	80	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional Indikator Kinerja Utama	Pusat dan Regional II											
		Satuan	Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan : 1. Penguikuan Kawasan Hutan													
	• Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Km	-	2.000	-	-	-	-	-	-	500	1.250	1.250
	• Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%).	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	• Peneleapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%.	%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	• Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.	%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
• Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%	%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	

5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari permohonan 	%	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib bayar terbit membayar PNBP 	%	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%. • Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi 	Propinsi	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen Planologi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan 	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). 	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran 	Satker / tahun	6	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) 																			
	<ul style="list-style-type: none"> • Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang 	Orang	439	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) 	Judul	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	Judul	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL III KALIMANTAN**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Kalbar
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTAMAN Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan : 1. Pengukuhan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan • Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%). • Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu galang sebanyak 75%. • Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. • Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% 	Km	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		%	100	100	100	100	100
		%	75	75	75	75	75
		%	75	75	75	75	75
		%	75	75	75	75	75
2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan wilayah KPHP di 28 provinsi • Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia. *) KPHK tidak dipisahkan berdasarkan administrasi pemerintahan • Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 propinsi. • Peraturan perundang-undangan penyeleng-garaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul. • Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, RE, HKm, HTR, Hutan Desa) selesai 90%. • Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemantapan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul 	Propinsi	4	1	1	1	1
		Propinsi	10	*)	*)	*)	*)
		Propinsi	4	1	1	1	1
		Judul	-	-	-	-	-
3 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan		%	90	90	90	90	90
		Judul	-	-	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 propinsi) • Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul. • Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul • Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul • Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul. • Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update 	4	1	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohonan • Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%. • Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi • Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 	80	80	80	80	80	80	80
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). • Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) 	80	80	80	80	80	80	80
	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi • Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 	4	1	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). • Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) 	9	4	2	2	1	2	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang • Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) • Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	202	62	84	84	0	56	56
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	-	-	-	-	-	-	-
4. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 propinsi) • Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul. • Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul • Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul • Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul. • Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update 	4	1	1	1	1	1	1
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohonan • Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%. • Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi • Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 	80	80	80	80	80	80	80
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan • Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). • Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) 	9	4	2	2	1	2	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang • Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) • Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	202	62	84	84	0	56	56
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	-	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL IV SULAWESI-MALUKU-PAPUA

ESELON / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional IV													
			Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sul bar	Gorontalo	Maluku	Mik Utara	Papua	Papua Barat			
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Program : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kegiatan : 1. Pengukuhan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%). Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%. Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. 	KM % % % %	7.000	500	750	500	1.000	750	500	500	750	750	750	750	1.000	
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
			5	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-
			19	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
			Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi	Propinsi
			5	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-
			Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90			
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	90		
dan HA, RE, HKm, HTR, Hutan Desa) selesai 90%.																

3. Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 propinsi) 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	<ul style="list-style-type: none"> Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update 	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari permohonan 	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% 	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 		Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) Data pengelanaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 1.300 orang 	Satker / tahun	17	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	Orang	317	64	12	-	89	-	14	57	-	56	-	25	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 3b | Rencana Strategis 2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional – Kementerian Kehutanan

Program
Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional I										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional I	NAD	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Babel	Kepri
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Program : Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi Kegiatan :	1. Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman	Ha	1.064.825	24.900	155.000	135.000	125.000	200.000	149.925	75.000	90.000	110.000	-
		Ha	1.066.000	-	21.550	6.500	240.000	229.000	412.450	-	156.500	-	-
2. Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman • Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar 5% • Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% • 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu	Unit	33	-	2	1	15	4	8	1	2	-	-
		%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan IUPHHK-HARE pada areal bekas tebangan (LOA), seluas 2,5 juta Ha 	Ribu Ha	243	-	-	80	-	163	-	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 	Unit	20	-	-	4	-	-	5	11	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya areal calon/ulusan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> PNNP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% 	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<ul style="list-style-type: none"> Implementasi SIM PUHH secara on line di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK 	Unit	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat menjadi 75% 	%	75	-	75	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75
<ul style="list-style-type: none"> Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% 	%	50	-	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun) 	%	10	-	10	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun 	Unit kerja	16	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1
<ul style="list-style-type: none"> Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun 	Unit kerja	16	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1
<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya dan terpatuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada 24 unit kerja per tahun 	Unit kerja	6	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Pusat dan Regional II										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Program : Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi Kegiatan :													
1. Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan area ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman HTI/HTR) seluas 3.000.000 ha • Penambahan area tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2.650.000 ha • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman 	Ha	-	130.525	-	-	-	-	-	525	-	60.000	70.000
		Ha	-	208.600	-	-	-	-	-	550	-	68.050	140.000
		Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar 5% 	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% 	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu 	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada area bekas tebangan (LOA), seluas 2,5 juta Ha 	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi 	Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan luran Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% 	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SIM PUHH secara on line di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK 	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penuhuan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat menjadi 75% 	%	-	75	75	75	75	75	75	75	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% 	%	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun) 	%	-	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun 	Unit kerja	6	12	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Produksi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun 	Unit kerja	6	12	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya dan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun 	Paket	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada pada 24 unit kerja per tahun 	Unit kerja	6	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL III KALIMANTAN**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Kalbar
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Program : Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi Kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> • (Penambahan area ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman HTI/HTR) seluas 3.000.000 ha • Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2.650.000 ha • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman 	Ha	770.000	265.000	230.000	155.000	120.000
			952.900	240.000	166.050	10.950	535.000
			15	9	2	2	2
2. Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar 5% • Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% • 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu • Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA), seluas 2,5 juta Ha 	%	5	5	5	5	5
			50	50	50	50	50
			50	50	50	50	50
			1.276	306	195	675	100
3. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi • Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi 	Unit Propinsi	-	-	-	-	-
			4	1	1	1	1
4. Peningkatan Terlibat Peredaran Hasil Hutan dan luran Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% • Implementasi SIM PUHH secara on line di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK 	%	10	10	10	10	10
			54	30	1	19	4
5. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat menjadi 75% 	%	75	75	75	75	75
			75	75	75	75	75

2.	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% • Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun) 	%	50	50	50	50	50	50	50	
		%	10	10	10	10	10	10	10	10
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Produksi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun • Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun • Tersusunnya dan terpatuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun • Tersedianya sarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada pada 24 unit kerja per tahun 	Unit kerja	8	2	2	2	2	2	2	
		Unit kerja	8	2	2	2	2	2	2	
		Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
		Unit kerja	4	1	1	1	1	1	1	1

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL IV SULAWESI-MALUKU-PAPUA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional IV										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sul bar	Goront alo	Malu ku	Mik Utara	Papua	Papua barat
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Program : Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi													
Kegiatan :													
1. Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • (Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman HTI/HTR) seluas 3.000.000 ha • Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2.650.000 ha 	Ha	1.034.650	115.000	139.650	45.000	65.000	55.000	200.000	95.000	65.000	175.000	80.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2.650.000 ha 	Ha	422.500	12.000	-	54.500	30.500	-	-	65.000	10.500	250.000	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman 	Unit	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar 5% 	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% 	%	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50
	<ul style="list-style-type: none"> • 50% produksi penebangan bersertifikat Legallias Kayu 	%	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50
2. Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA), seluas 2,5 juta Ha	Ribu Ha	981	50	48	120	-	67	80	-	-	616	-

3. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terpentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 	Unit	70	5	-	15	-	3	-	-	-	31	16
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya areal calon/usuluan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 prop. 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan luran Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • PNPB dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% 	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SIM PUHH secara on line di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK 	Unit	33	-	3	-	-	-	-	3	4	11	12
5. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat menjadi 75% 	%	75	-	75	-	75	-	75	75	75	75	75
	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% 	%	50	-	50	-	50	-	50	50	50	50	50
	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun) 	%	10	-	10	-	10	-	10	10	10	10	10

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Difen Bina Produksi Kehutanan	• Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun	Unit kerja	15	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	
	• Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun	Unit kerja	15	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2
	• Tersusunnya dan terpautuhnya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Tersedianya sarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada pada 24 unit kerja per tahun	Unit kerja	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1

Lampiran 3c

Rencana Strategis
2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional - Kementerian Kehutanan

Program

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL I SUMATERA**

ESLON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional I											
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Beng kulu	Lam pung	Babel	Kepri	
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Program : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Kegiatan : 1. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial														
		%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	<ul style="list-style-type: none"> Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (cagar alam/CA, suaka margasatwa/SM, taman buru/TB) dan hutan lindung /HL menurun sebanyak 5% 													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10% 	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalbar, Sultra dan Sulteng) 	Propinsi	6	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun (4 lokasi) 	lokasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 Taman Nasional Prioritas 	TN	12	1	1	1	3	3	1	-	2	-	-	-	

<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi 	Provinsi	3	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Keruh, CA Muller) 	provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Kasus baru tindak pidana kehutanan (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar/TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% 	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan perkara (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<ul style="list-style-type: none"> • Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% 	%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi 	Provinsi	5	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1
<ul style="list-style-type: none"> • Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat 	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<ul style="list-style-type: none"> • Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% 	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya skema DNS kehutanan, 2 aktifitas • Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi 	Aktifitas Provinsi	6	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	-	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> • Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun • Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008 • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (33 propinsi) • Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit • PNPB dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 	% % Propinsi % % %	20 10 10 60 100 30	15 5 1 60 100 30	20 10 1 60 100 30	15 10 1 60 100 30	25 15 1 60 100 30	25 15 1 60 100 30	15 5 1 60 100 30	25 15 1 60 100 30	25 15 1 60 100 30	15 5 1 60 100 30	15 5 1 60 100 30	15 5 1 60 100 30	-	-	10 5 1 60 100 30	
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi pada 29 provinsi 	Provinsi Provinsi	- 8	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 0	- 0	- 0

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijiin Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 UPT menjadi 77 UPT 	Unit	14	2	1	2	1	2	1	2	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan 6 UPT baru Dijiin PHKA di Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara 	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	<ul style="list-style-type: none"> Kejasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial dan technical assistance, dan program penghapusan hutan melalui DNS meingkat setiap tahunnya, minimal 2 dokumen per tahun 	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun 	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 dinas provinsi, 580 dokumen 	Dokumen	145	15	15	15	20	25	15	10	20	5	5
	<ul style="list-style-type: none"> Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, trust fund dan kolaborasi sebanyak 4 unit 	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional Indikator Kinerja Utama	Satuan	Pusat dan Regional II															
			Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT					
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Program : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Kegiatan : 1. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial																		
	<ul style="list-style-type: none"> Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (cagar alam/CA, suaka margasatwa/SM, taman buru/TB) dan hutan lindung /HL menurun sebanyak 5% 	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10% 	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsei, Kalbar, Sultra dan Sulteng) a. Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun per propinsi (4 lokasi)	Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		lokasi	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	

1.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 Taman Nasional Prioritas 	TN	-	18	1	1	3	3	4	0	1	1	4
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi 	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller) 	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Penyidikan dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Kasus baru tindak pidana kehutanan (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar/TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% 	%	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	<ul style="list-style-type: none"> Tunggakan perkara (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 	%	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	<ul style="list-style-type: none"> Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% 	%	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi 	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik	<ul style="list-style-type: none"> Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat 	%	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	<ul style="list-style-type: none"> Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% 	%	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun • Terselenggaranya skema DNS kehutanan, 2 aktifitas • Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi 	Paket	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun • Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008 • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (33 propinsi) 	Provinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pengendalian Kebakaran Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat • Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) 	%	-	20	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 	%	10	10	5	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 	Propinsi	-	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 	%	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 	%	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 	Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 UPT menjadi 77 UPT 	Unit	-	19	2	1	1	1	4	2	1	2	2	4	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan 6 UPT baru Ditjen PHKA di Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara 	Unit	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	<ul style="list-style-type: none"> Kejasama dan kemiliran bidang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial dan technical assistance, dan program penghapusan hutan melalui DNS meingkat setiap tahunnya, minimal 2 dokumen per tahun 	Dokumen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun 	Dokumen	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 dinas provinsi, 580 dokumen 	Dokumen	30	205	15	10	25	30	10	25	30	15	15	10	30
<ul style="list-style-type: none"> Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, trust fund dan kolaborasi sebanyak 4 unit 	Unit	-	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL III KALIMANTAN

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Kalbar
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Program : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Kegiatan : 1. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial							
	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (cagar alam/CA, suaka margasatwa/SM, taman buru/TB) dan hutan lindung /HL menurun sebanyak 5% • Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10% • Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng) 	%	5	5	5	5	5
	a. Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun per provinsi (4 Lokasi)	%	10	10	10	10	10
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 Taman Nasional Prioritas • Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi • Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller) 	Propinsi	4	1	1	1	1
		paket	-	-	-	-	-
	TN	8	2	-	2	4	
	Provinsi	4	1	1	1	1	
	Provinsi	3	1	-	1	1	

1. Penyidikan dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus baru tindak pidana kehutanan (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar/TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% 	%	75	75	75	75	75	75
	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggalan perkara (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 	%	25	25	25	25	25	25
	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% 	%	20	20	20	20	20	20
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi 	Provinsi	4	1	1	1	1	1
3. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat 	%	3	3	3	3	3	3
	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% 	%	5	5	5	5	5	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya skema DNS kehutanan, 2 akifitas 	Akifitas	-	-	-	-	-	-
4. Pengendalian Kebakaran Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas aparaturnya dalam upaya mitigasi dan evakuasi salwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi 	Provinsi	4	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun 	%	20	15	15	15	15	25
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008 	%	10	5	5	5	5	15
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (33 provinsi) 	Propinsi	4	1	1	1	1	1
5. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008, dan jln usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit 	%	60	60	60	60	60	60
	<ul style="list-style-type: none"> • PNPB dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 	%	100	100	100	100	100	100

	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat • Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi pada 29 provinsi • Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 UPT menjadi 77 UPT 	%	30	30	30	30	30	30	30
		Kawasan	1	-	-	-	1	-	-
		Provinsi	4	1	1	1	1	1	1
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan 6 UPT baru Ditjen PHKA di Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara • Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial dan technical assistance, dan program penghapusan hutan melalui DNS meingkat setiap tahunnya, minimal 2 dokumen per tahun • Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun • Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 dinas provinsi, 580 dokumen • Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, trust fund dan kolaborasi sebanyak 4 unit 	Unit	11	3	1	1	3	3	4
		Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Dokumen	80	20	10	20	20	30	30
		Unit	-	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL IV SULAWESI-MALUKU-PAPUA

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional IV										
	Satuan	Indikator Kinerja Utama	Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sulbar	Gorontalo	Maluku	Mik Utara	Papua	Papua barat
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Program : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan													
Kegiatan : 1. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	%	<ul style="list-style-type: none"> Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (cagar alam/CA, suaka margasatwa/SM, taman buru/TB) dan hutan lindung /HL menurun sebanyak 5% Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10% Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbaw, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsei, Kalbar, Sultra dan Sulteng) a. Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun per propinsi (4 lokasi) 	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	%		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Propinsi		2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 Taman Nasional prioritas • Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi • Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Keruhun, CA Muller) 	TN	13	2	2	2	2	2	0	0	1	1	2	1
		Provinsi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Penyidikan dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus baru tindak pidana kehutanan (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar/TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% • Tunggakan perkara (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun • Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% • Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi 	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Provinsi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesiediaan habitat • Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% • Kejasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun 	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Aktifitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya skema DNS kehutanan, 2 aktifitas 	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas aparat dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi 	Provinsi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Hoispot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun 	%	20	10	20	10	25	20	20	20	20	10
<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008 	%	10	10	10	10	15	10	10	5	5	5
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (33 propinsi) 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> • Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit 	%	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) 	Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi pada 29 provinsi 	Provinsi	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijiin Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 UPT menjadi 77 UPT 	Unit	17	3	2	3	2	2	-	-	2	1	2	2	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan 6 UPT baru Dijiin PHKA di Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara 	Unit	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
	<ul style="list-style-type: none"> Kejasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial dan technical assistance; dan program penghapusan hutan melalui DNS meingkat setiap tahunnya, minimal 2 dokumen per tahun 	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun 	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 dinas provinsi, 580 dokumen 	Dokumen	150	20	20	20	20	20	20	5	5	10	15	20	15
	<ul style="list-style-type: none"> Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, trust fund dan kolaborasi sebanyak 4 unit 	Unit	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Lampiran 3d

Rencana Strategis
2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional - Kementerian Kehutanan

Program

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL I SUMATERA

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional I										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Beng kulu	Lam pung	Babel	Kepri
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL Program : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha • Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha • Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 Ha • Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha • Fasilitasi penelapan areal kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2.000.000 ha 	Ha	311.088	21.650	79.863	46.950	24.100	31.050	52.200	20.800	27.200	6.450	825
			194.461	13.531	49.914	29.344	15.063	19.406	32.625	13.031	17.000	4.031	516
			1.179,6	26,400	163,300	66,900	92,000	45,500	57,500	27,300	68,900	31,800	600
			114.731	7.983	29.449	17.313	8.887	11.450	19.249	7.688	10.030	2.378	304
			580.200	26.400	163.300	66.900	92.000	45.500	57.500	27.300	68.900	31.800	600
2 Pengembangan Perhutanan Sosial		Ha											

<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm • Fasilitasi 50 unit kemitraan • Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 propinsi • Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha • Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten • Fasilitasi penelapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha 	Kelompok	435	30	60	45	30	60	30	15	75	30	30
	Unit	13	-	1	1	2	2	-	2	5	-	-
	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ha	35.000	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten	4	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-
3. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan <ul style="list-style-type: none"> • Areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik. • Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha. • Pengembangan seed for people, 1 paket per tahun (100 Lokasi) • Pengembangan sentra bibit, 1 paket per tahun (7 Unit) 	Ha	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ha	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Lokasi	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ha	236.500	9.300	30.900	36.200	45.200	39.000	72.900	-	-	2.700	300
4. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas • Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 unit BPDAS • Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 unit BPDAS 	Ha	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ha	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Lokasi	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unit	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unit	33	4	9	5	4	1	1	1	3	2	2	2
Unit	29	4	6	5	4	1	1	1	3	2	2	1
Unit	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijiin Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Peraturan perundang-undangan bidang RLPs (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 Buah, Pedoman/NSPK 70 buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	• Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan RLPs yang efektif dan efisien di 50 satker	12	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	• Terselenggaranya pembinaan/penguatan kelembagaan bidang RLPs, 33 propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	• Aparat Dijiin RLPs yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPs, 50 Satker	12	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	• Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker	12	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	• SIM RLPs, 1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Peraturan																							
		Satker																							
		Propinsi																							
		Satker																							
		Satker																							
	Unit																								
	Bidang																								

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Satuan	Pusat dan Regional II										
	Indikator Kinerja Utama			Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL														
Program : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat														
Kegiatan :														
1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha • Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha • Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 Ha • Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha 		Ha	95.250	-	4.450	8.775	6.325	13.600	450	2.750	10.150	48.750	
2. Pengembangan Pertanaman Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penetapan area kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2.000.000 ha • Fasilitasi 500 kelompok/unit jnin usaha pengelolaan HKm • Fasilitasi 50 unit kemitraan • Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 propinsi 		Ha	35.124	166	1.641	3.236	2.332	5.015	0	1.014	3.743	17.977	
			Ha	196.300	-	-	-	-	-	1.700	3.200	24.800	166.600	
			Kelompok	180	-	-	-	-	-	45	15	75	45	
			Unit	10	-	-	-	-	-	1	2	3	4	
			Propinsi	7	-	-	1	1	1	1	1	1	1	

3. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha 	Ha	-	100.000	-	-	50.000	25.000	25.000	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten 	Kabupaten	-	22	-	-	6	6	1	4	3	2	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha 	Ha	-	61.600	-	-	-	-	-	-	3.300	5.100	53.200
3. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik. 	Ha	-	1.500	-	250	250	250	250	250	100	100	50
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha. 	Ha	-	600	-	75	75	75	75	75	75	75	75
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan seed for people, 1 paket per tahun (100 Lokasi) 	Lokasi	-	43	-	-	25	-	-	-	18	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sentra bibit , 1 paket per tahun (7 Unit) 	Unit	-	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas 	Unit	-	37	-	-	6	18	1	5	2	3	2
4. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 unit BPDAS 	Unit	-	36	-	-	6	14	4	5	2	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 unit BPDAS 	Unit	-	7	-	-	1	1	1	1	1	1	1

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Peraturan	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peraturan perundang-undangan bidang RPLS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 Buah, Pedoman/NSPK 70 buah)	5	15	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan RPLS yang efektif dan efisien di 50 satker	5	15	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	• Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RPLS, 33 propinsi	1	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	• Aparat Ditjen RPLS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RPLS, 50 Satker	5	14	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	• Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker	5	14	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	• SIM RPLS, 1 unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RPLS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL III KALIMANTAN**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Kalbar
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL Program : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas 2. Pengembangan Perhutanan Sosial 3. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan							
	• Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha	Ha	206.200	82.700	24.250	16.150	83.100
	• Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha	Ha	85.688	8.500	15.156	10.094	51.938
	• Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 Ha	Ha	1.289	517	152	101	519
	• Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	Ha	186.112	5.015	8.942	5.955	166.200
	• Fasilitasi penetapan areal kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2.000.000 ha	Ha	1.075.100	250.800	92.700	243.500	488.100
	• Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	Kelompok	195	30	60	45	60
	• Fasilitasi 50 unit kemitraan	Unit	4	1	-	2	1
	• Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 propinsi	Propinsi	4	1	1	1	1
	• Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha	Ha	88.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten	Kabupaten	2	-	1	1	-	
• Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	Ha	121.300	42.800	-	-	78.500	
• Areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik.	Ha	750	180	180	180	210	
• Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha.	Ha	1.000	250	250	250	250	
• Pengembangan seed for people, 1 paket per tahun (100 Lokasi)	Lokasi	16	-	16	-	-	
• Pengembangan sentra bibit, 1 paket per tahun (7 Unit)	Unit	1	-	1	-	-	

4. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas • Tersedianya base line data pengelolaan DAS di 36 unit BPDAS • Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 unit BPDAS • Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 Buah, Pedoman/NSPK 70 buah) • Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan RLPS yang efektif dan efisien di 50 satker • Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RLPS, 33 propinsi • Aparat Dijen RLPS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPS, 50 Satker • Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker • SIM RLPS, 1 unit • Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS 	Unit	8	1	2	3	2
	Unit	8	1	2	3	2	
	Unit	4	1	1	1	1	
	Peraturan	-	-	-	-	-	
	Satker	5	1	2	1	1	
	Propinsi	4	1	1	1	1	
	Satker	5	1	2	1	1	
	Satker	5	1	2	1	1	
	Unit	-	-	-	-	-	
	Bidang	-	-	-	-	-	

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL IV SULAWESI-MALUKU-PAPUA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional IV											
	Satuan	Indikator Kinerja Utama	Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sul bar	Goron talo	Maluku	Mik Utara	Papua	Papua barat	
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL Program : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat														
Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Ha		187.413	6.900	2.650	55.450	16.100	5.763	7.900	15.900	6.425	58.900	11.425	
		<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 Ha Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha Fasilitasi penetapan areal kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 2.000.000 ha Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKM Fasilitasi 50 unit kemitraan 												
2 Pengembangan Perhutanan Sosial	Ha		135.300	21.300	-	-	57.900	-	22.000	-	34.100	-	-	
	Kelompok		195	-	45	30	30	-	30	30	-	-	30	
	Unit		12	1	4	3	1	-	-	-	1	2	-	

	• Fasilitas dukungan kelembagaan kelurahan pangan di 32 propinsi	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	• Fasilitas pembangunan hutan rakyat kemitraan pertukangan seluas 250.000 Ha	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	• Fasilitas pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten	Kabupaten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Fasilitas penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	Ha	79.100	12.300	-	24.500	18.400	-	10.900	1.100	2.000	9.900	-	-	-	-	-	-
3. Pengembangan Perbenthan Tanaman Hutan	• Areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik.	Ha	1.250	150	200	150	150	200	150	150	60	60	60	60	60	60	60	
	• Fasilitas pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha.	Ha	750	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
	• Pengembangan seed for people, 1 paket per tahun (100 Lokasi)	Paket	33	-	-	-	24	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Pengembangan sentra bibit, 1 paket per tahun (7 Unit)	Paket	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	• Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas	Unit	24	3	2	3	2	1	-	3	3	4	3	3	3	3	3	
	• Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 unit BPDAS	Unit	32	3	4	3	5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
	• Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 unit BPDAS	Unit	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijiin Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenthut 12 Buah, Pedoman/NSPK 70 buah) 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Satker	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Satker	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker 	Satker	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Satker	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> SIM RLPS, 1 unit Kejasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS 	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 3e

Rencana Strategis
2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional - Kementerian Kehutanan

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL I SUMATERA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional I										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Bengkulu	Lampung	Babel	Kepri
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan													
Kegiatan :													
1. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul 	Judul	-	-	2	-	3	-	4	-	-	-	-
2. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul 	Judul	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul. 	Judul	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul 	Judul	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun. 	Satker	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan dan Evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun. 	Satker	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun 	Satker	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun 	Orang	-	-	52	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Tata laksana keuangan, umum, kerjasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun. 	Unit	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Pusat dan Regional II											
	Nasional	Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Utama	Satuan										
Kegiatan :												
1. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul 	Judul	-	-	4	3	-	1	-	2	2	2
2. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul 	Judul	-	-	4	3	-	1	-	2	2	2
3. Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-
		Judul	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-

4. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul. 	Judul	6	-	-	-	4	-	2	-	2	2	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul 	Judul	6	-	-	-	4	-	2	-	2	2	2
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun. 	Satker	5	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan dan Evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun. 	Satker	5	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun 	Satker	5	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun 	Orang	547	-	-	-	140	80	131	-	45	77	77
	<ul style="list-style-type: none"> • Tata laksana keuangan, umum, kerjasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun. 	Unit	5	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL III KALIMANTAN**

ESLON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Kalbar
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN							
Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan							
Kegiatan :							
1. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul 	Judul	-	3	2	-	-
2. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul 	Judul	-	3	-	-	-
3. Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul 	Judul	-	1	-	-	-
4. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul 	Judul	-	2	2	-	-
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun. Laporan dan Evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun. Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun Tata laksana keuangan, umum, kerjasama, & desiminasi pada 20 unit kerja per th 	Satker Satker Satker Orang Unit	- - - - -	2 2 2 152 2	1 1 1 83 1	- - - - -	- - - - -

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL IV SULAWESI-MALUKU-PAPUA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional IV								Papua	Papua	
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional IV	Sulut	Sulteng	Sultra	Sulsel	Sulbar	Gorontalo	Maluku			MikUtara
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan													
Kegiatan :													
1. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul 	Judul	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
2. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul 	Judul	-	5	-	-	6	-	-	-	-	-	-
3. Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

4. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun. 	Satker	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan dan Evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun. 	Satker	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun 	Satker	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun 	Orang	-	39	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
	<ul style="list-style-type: none"> Tata laksana keuangan umum, kerjasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun. 	Unit	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Lampiran 3f

Rencana Strategis
2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional - Kementerian Kehutanan

Program

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL I SUMATERA

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional I										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sum sel	Bengkulu	Lampung	Babel	Kepri
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan Kegiatan : 1. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 65 laporan Renja Inspektorat I sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan Laporan Judul Judul Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 50 laporan Renja Inspektorat II sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan Laporan Judul Judul Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	● Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 35 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Renja Inspektorat III sebanyak 5 judul,	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● usulan PK/PT sebanyak 5 judul, ● laporan tahunan sebanyak 5 judul	Judul Judul Judul	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	● Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 45 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Renja Inspektorat IV sebanyak 5 judul,	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● usulan PK/PT sebanyak 5 judul, ● laporan tahunan sebanyak 5 judul	Judul Judul Judul	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	● Laporan hasil audit khusus sebanyak 125 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Laporan hasil identifikasi khusus serta pengumpulan bahan dan keterangan (publiket) sebanyak 125 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Renja Inspektorat khusus sebanyak 5 judul,	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● usulan PK/PT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul	Judul Judul	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektoral Jenderal Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Inspektoral Jenderal Dephut 1 judul, • Renja Inspektoral Jenderal Dephut 5 judul, • Dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, • Dokumenj PKPT 5 judul dan • Data informasi pengawasan 5 judul 	Judul Judul Judul Judul Judul	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -																						
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan lingkup Ijten Dephut 120 laporan (Lakip, APIP, Tahunan, Bulanan, Triwulan, semesteran, Kepegawaian dan laporan BMN) 	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pencermatan kegiatan Dephut 200 laporan, • laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit 300 laporan dan • laporan pemutakhiran data 25 laporan 	Laporan Laporan Laporan	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan bidang pengawasan 30 dokumen • dan bulletin pengawasan 20 edisi • Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan • diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang 	Dokumen edisi Orang Orang	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT

ESELON / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Pusat dan Regional II												
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Pu sat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT		
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan Kegiatan : 1. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I 2. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II															
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 65 laporan • Renja Inspektorat I sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, • laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan Laporan Judul Judul Judul	300 65 5 5 5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 50 laporan • Renja Inspektorat II sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, • laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan Laporan Judul Judul Judul	300 50 5 5 5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

<p>3. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektoral III</p> <p>4. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektoral IV</p> <p>5. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 35 laporan • Renja Inspektoral III sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, • laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan Laporan	300 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan Keuangan sebanyak 45 laporan • Renja Inspektoral IV sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, • laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan Laporan	300 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit khusus sebanyak 125 laporan • Laporan hasil identifikasi khusus serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) sebanyak 125 laporan • Renja Inspektoral khusus sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul 	Laporan Laporan	125 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektoral Jenderal Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rensitra Inspektoral Jenderal Dephut 1 judul, • Renja Inspektoral Jenderal Dephut 5 judul, • Dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, • Dokumen PKPT 5 judul dan • Data informasi pengawasan 5 judul 	Judul Judul Judul Judul Judul	1 5 5 5 5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan lingkup Ijen Dephut 120 laporan (Lakip, APIP, Tahunan, Bulanan, Triwulan, semesteran, Kepegawaian dan laporan BMN) 	Laporan	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pencermatan kegiatan Dephut 200 laporan, 	Laporan	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit 300 laporan dan 	Laporan	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • laporan pemutakhiran data 25 laporan 	Laporan	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan bidang pengawasan 30 dokumen dan bulletin pengawasan 20 edisi 	Dokumen edisi	30 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan • diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang 	Orang Orang	1.300 700	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL III KALIMANTAN**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kalitim	Kalsel	Kalteng	Kalbar
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan Kegiatan :							
1. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektoral I	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 65 laporan • Renja Inspektoral I sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, • laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan	-	-	-	-	-
2. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektoral II	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 50 laporan • Renja Inspektoral II sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, • laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan	-	-	-	-	-
3. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektoral III	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 35 laporan • Renja Inspektoral III sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, • laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan	-	-	-	-	-
4. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektoral IV	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 45 laporan • Renja Inspektoral IV sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, • laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan	-	-	-	-	-

5. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit khusus sebanyak 125 laporan • Laporan hasil identifikasi khusus serta pengumpulan bahan dan keterangan (publikasi) sebanyak 125 laporan • Renja Inspektorat khusus sebanyak 5 judul, • usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	Laporan Laporan Laporan	-	-	-	-	-	-
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Inspektorat Jenderal Dephut 1 judul, • Renja Inspektorat Jenderal Dephut 5 judul, • Dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, • Dokumen j PKPT 5 judul dan • Data informasi pengawasan 5 judul • Laporan lingkup Ijen Dephut 120 laporan (Lakip, APIP, Tahunan, Bulanan, Triwulan, semesteran, Kepegawaian dan laporan BMN) • Laporan pencermatan kegiatan Dephut 200 laporan, • laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit 300 laporan dan • laporan pemutakhiran data 25 laporan • Peraturan bidang pengawasan 30 dokumen • dan bulletin pengawasan 20 edisi • Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan • diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang 	Judul Judul Judul Judul Judul Laporan Laporan Laporan Laporan Dokumen edisi Orang Orang	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL IV SULAWESI-MALUKU-PAPUA

ESELON / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Satuan	Regional IV														
	Indikator Kinerja Utama			Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sulbar	Gorontalo	Maluku	Mlku Utara	Papua	Papua barat				
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan																		
Kegiatan :																		
1. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 65 laporan Renja Inspektorat I sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 50 laporan Renja Inspektorat II sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	● Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	● Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 35 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Renja Inspektorat III sebanyak 5 judul,	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● usulan PKPT sebanyak 5 judul,	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● laporan tahunan sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	● Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 45 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Renja Inspektorat IV sebanyak 5 judul,	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● usulan PKPT sebanyak 5 judul,	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● laporan tahunan sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	● Laporan hasil audit khusus sebanyak 125 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Laporan hasil identifikasi khusus serta pengumpulan bahan dan keterangan (publikasi) sebanyak 125 laporan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Renja Inspektorat Khusus sebanyak 5 judul,	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Renstra Inspektorat Jenderal Dephut 1 judul, ● Renja Inspektorat Jenderal Dephut 5 judul, ● Dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, ● Dokumenj PKPT 5 judul dan ● Data informasi pengawasan 5 judul ● Laporan lingkup Ijen Dephut 120 laporan (Lakip, APIP, Tahunan, Bulanan, Triwulan, semesteran, Kepegawaian dan laporan BMN) ● Laporan pencermatan kegiatan Dephut 200 laporan, ● laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit 300 laporan dan ● laporan pemutakhiran data 25 laporan ● Peraturan bidang pengawasan 30 dokumen ● dan bulletin pengawasan 20 edisi ● Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang ● diikat pengembangan SDM sebanyak 700 orang 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dokumen edisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lampiran 3g

Rencana Strategis
2010-2014

Indikator Kinerja Per Program Per Propinsi Regional - Kementerian Kehutanan

Program

Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL I SUMATERA**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional										Regional I						
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional I	NAD	Sum ut	Sum bar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Babel	Kepri				
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan Kegiatan : 1. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun) Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 269 satuan kerja per tahun Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun. 	Judul Judul Satker Judul Judul Paket	-	-	10	4	8	7	8	3	6	3	3				

<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan • Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Dokumen	11.405	1.197	2.135	743	1.495	1.451	1.764	545	1.887	80	108													
	Orang	3.906	405	712	261	551	507	609	190	593	35	44													
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang • Pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 10 jenis 	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 dokumens. 	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, penggunaan kawasan hutan, sebanyak 4 paket per tahun • Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun 	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 dokumens. 	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, penggunaan kawasan hutan, sebanyak 4 paket per tahun • Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun 	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan. • Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas. 	Propinsi	5	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan SMK Kehutanan 1.440 orang siswa 	Orang	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat teknis dan administrasi, 15.000 orang peserta 	Orang	3.390	-	-	-	1.620	1.770	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Karya siswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa 	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat ISO 9001:2007, 5 unit SMK Kehutanan 	Unit	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7. Penyuluhan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan 500 kelompok Masyarakat Produktif Mandiri 	Kelompok	130	10	20	10	15	15	15	20	15	5	5	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh Kehutanan 	Orang	1.200	75	200	150	200	100	200	100	100	50	25	25
	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi tiap tahun 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pembinaan Standardisasi dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan sebanyak 30 produk 	Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • SNI yang siap diselarasakan dengan standar internasional sebanyak 20 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan pengelola hutan milik swasta dan milik rakyat terdampingi untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sebanyak 40 unit 	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan kerja lingkup Kementerian kehutanan terdamping untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard internasional sebanyak 20 unit 	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun • Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket • Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga • Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun • Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Dephut, pemberitaan issue-issue strategis dan jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat Dephut dengan media masa sejumlah 100 kali • Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali • Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Dephut, pemberitaan issue-issue strategis dan jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat Dephut dengan media masa sejumlah 100 kali • Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali • Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali 	Kali	24	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
		Kali	11	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Kali	15	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul • Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul • Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul • Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul • Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul • Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PUSAT DAN PER PROPINSI REGIONAL II JAWA-BALI-NTB-NTT**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Pusat dan Regional II											
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Pusat	Regional II	DKI	Ban ten	Jabar	Ja teng	Jatim	DIY	Bali	NTB	NTT	
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan Kegiatan : 1. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan														
		Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Satker	49	63	4	2	12	7	9	6	8	5	10	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun) Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 269 satuan kerja per tahun Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul 													
		Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun. 	Paket	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen 	Dokumen	8.088	14.781	8.088	384	5.102	1.460	984	2.677	1.213	962	1.999										
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang 	Orang	4.081	8.565	4.081	137	1.208	505	399	827	452	323	632										
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 10 jenis 	Jenis	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun 	Paket	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3. Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 dokumens. 	Dokumen	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, penggunaan kawasan hutan, sebanyak 4 paket per tahun 	Paket	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun 	Paket	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik serta pengawasan dan melekat, sebanyak 6 paket per tahun 	Paket	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

4. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 71 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80% 	%	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan, dengan opini wajar tanpa pengecualian mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun) • Laporan keuangan dan perbendaharaan sebanyak 33 propinsi 	Judul/ tahun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perangkat Kementerian Kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan SIMAK BMN Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun • Serifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang • Serifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Manggala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramajati, dan Rumpin) • Status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan. • Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas. 	Propinsi	-	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan SIMAK BMN Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun • Serifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang • Serifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Manggala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramajati, dan Rumpin) • Status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan. • Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas. • Penyelenggaraan SMK Kehutanan 1.440 orang siswa • Diklat teknis dan administrasi, 15.000 orang peserta • Kanya siswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa 	Salkes	42	54	3	1	11	45	30	25	7	4	9
		Orang	200	250	17	11	11	45	30	35	20	37	37
		Lokasi	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Propinsi	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		Paket	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Orang	-	320	-	-	-	320	-	-	-	-	-
		Orang	1.500	4.650	-	-	-	3.350	-	-	-	-	1.300
		Orang	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat ISO 9001:2007, 5 unit SMK Kehutanan 	Unit	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Penyuluhan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan 500 kelompok Masyarakat Produktif Mandiri 	Kelompok	-	150	20	10	15	15	15	20	15	15	20	15	100	100	15	5	5	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh Kehutanan 	Orang	-	1.000	-	150	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	25	25
	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi tiap tahun 	Propinsi	-	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket 	Paket	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pembinaan Standardisasi dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan sebanyak 30 produk 	Produk	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul 	Judul	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan pengelola hutan milik swasta dan milik rakyat terdampingi untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sebanyak 40 unit 	Unit	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan kerja lingkup Kementerian kehutanan terdampingi untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard internasional sebanyak 20 unit 	Unit	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket 	Paket	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun 	Paket	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun 	Paket	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Dephut, pemberitaan issue-issue strategis dan jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat Dephut dengan media masa sejumlah 100 kali 	Kali	25	12	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	<ul style="list-style-type: none"> Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali 	Kali	5	21	-	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	1
	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali 	Kali	10	19	-	1	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan rapat Menteri Kehutanan pada acara rapat kerja dengan DPR RI dan DPD RI sejumlah 50 kali 	Kali	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan data dan informasi pembangunan kehutanan, 1 paket/tahun 	Paket	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran kredit pembangunan hutan lanaman (hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat) seluas 324.625 ha 	Ha	-	11.483	-	-	-	-	-	-	-	187	215	4.780	6.301	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis dan anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak 5 judul 	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kelayakan permohonan pinjaman sebanyak 570 proposal 	Proposal	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul 	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul 	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

13. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II	• Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul.	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	• Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul.	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul.	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	• Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul	Judul	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul.	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul.	Judul	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL III KALIMANTAN**

ESELON I / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional III					
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional III	Kaltim	Kalsel	Kalteng	Kalbar	
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan Kegiatan : 1. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta • Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun) • Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 269 satuan kerja per tahun • Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan • Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul • Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun. 	Judul	-	-	-	-	-	
			Judul	-	-	-	-	-
2. Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayan administrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen • Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang • Pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 10 jenis • Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun 	Saker	32	10	7	6	9	
			Judul	-	-	-	-	-
		Paket	-	-	-	-	-	
			Dokumen	5.607	1.841	1.309	919	1.538
			Orang	1.970	676	435	313	546
			Jenis	-	-	-	-	-
		Paket	-	-	-	-	-	

3. Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 dokumens. Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, penggunaan kawasan hutan, sebanyak 4 paket per tahun Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun Pengembangan kelembagaan dan ketatausahaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik serta pengawasan melekat, sebanyak 6 paket per tahun Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 71 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80% Laporan keuangan Kementerian Kehutanan, dengan opini wajar tanpa pengecualian mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun) Laporan keuangan dan perbendaharaan sebanyak 33 propinsi Laporan SIMAK BMN Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Manggala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin) Status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan. Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas. Penyelenggaraan SMK Kehutanan 1.440 orang siswa Diklat teknis dan administrasi, 15.000 orang peserta Karya siswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa Sertifikat ISO 9001:2007, 5 unit SMK Kehutanan 	Dokumen	-	-	-	-	-	-
4. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan		%	-	-	-	-	-	-
5. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Pertengkapan Kementerian Kehutanan.		Judul / tahun	4	1	1	1	1	1
		Propinsi	26	8	6	6	6	8
		Orang	100	30	-	20	30	30
		Lokasi	-	-	-	-	-	-
		Propinsi	3	1	-	1	1	1
		Paket	-	-	-	-	-	-
6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya		Orang	300	300	-	-	-	-
		Orang	1.800	1.800	-	-	-	-
		Orang	-	-	-	-	-	-
		Unit	1	1	-	-	-	-

7. Penyuluhan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan 500 kelompok Masyarakat Produktif Mandiri 	Kelompok	100	25	25	25	25
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh Kehutanan 	Orang	1.300	300	400	300	300
	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye Indonesia Meranam (KIM) di 33 provinsi tiap tahun 	Propinsi	4	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket 	Paket	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan sebanyak 30 produk 	Produk	-	-	-	-	-
8. Pembinaan Standardisasi dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul 	Judul	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan pengelola hutan milik swasta dan milik rakyat terdamping untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sebanyak 40 unit 	Unit	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan kerja lingkup Kementerian kehutanan terdamping untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard internasional sebanyak 20 unit 	Unit	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket 	Paket	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-
9. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket 	Paket	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga 	Lembaga	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Dephut, pemberitaan issue-issue strategis dan jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat Dephut dengan media masa sejumlah 100 kali 	Kali	11	3	3	3	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali 	Kali	8	2	2	2	2
10. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali 	Kali	11	3	3	3	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan rapat Menteri Kehutanan pada acara rapat kerja dengan DPR RI dan DPD RI sejumlah 50 kali 	Kali	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan data dan informasi pembangunan kehutanan, 1 paket/tahun 	Paket	-	-	-	-	-

		Ha	57.587	10.801	16.618	6.845	23.323
11. Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat) seluas 324.625 ha 	Judul	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis dan anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak 5 judul 	Proposal	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kelayakan permohonan pinjaman sebanyak 570 proposal 	Judul	-	-	-	-	-
12. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-
13. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-

14. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-
15. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul. 	Judul	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-

**INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
PER PROGRAM PER PROPINSI REGIONAL IV SULAWESI-MALUKU-PAPUA**

ESELON / PROGRAM / KEGIATAN	Nasional		Regional IV										
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Regional IV	Sulut	Sul teng	Sultra	Sulsel	Sul bar	Gorontalo	Maluku	Mik Utara	Papua	Papua barat
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan Kegiatan :													
1. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun) Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 269 satuan kerja per tahun Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun. 	Judul Judul Saliter Judul Judul Paket	- - 62 -	- - 7 -	- - 7 -	- - 5 -	- - 12 -	- - 2 -	- - 3 -	- - 7 -	- - 3 -	- - 7 -	- - 9 -

2. Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi kepegawalan secara akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen 	Dokumen	10.118	1.365	1.006	965	2.785	77	220	1.151	145	1.460	944
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang 	Orang	3.525	451	354	326	999	27	68	386	53	502	358
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan instrumen pengelolaaan kepegawalan sebanyak 10 jenis • Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawalan (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun 	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 dokumens. 	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, penggunaan kawasan hutan, sebanyak 4 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kelembagaan dan kelatalaksanaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik serta pengawasan melekat, sebanyak 6 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 71 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80% 	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan Kementerian Kehutanan, dengan opini wajar tanpa pengecualian mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun) 	Judul / tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan dan perbendaharaan sebanyak 33 propinsi 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perangkat Kementerian Kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan SIMAK BMN Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun 	Saker	49	6	6	4	11	1	2	5	2	6	8																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panil/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang 	Orang	250	26	26	22	56	5	10	25	10	30	40																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramajati, dan Rumpin) 	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Status pencantolan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan. 	Propinsi	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas. 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan SMK Kehutanan 1.440 orang siswa 	Orang	520	-	-	-	320	-	-	-	-	-	200																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> a. Diklat teknis dan administrasi, 15.000 orang peserta 	Orang	3.660	-	-	-	1.890	-	-	-	-	-	1.770																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Karya siswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa 	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat ISO 9001:2007, 5 unit SMK Kehutanan 	Unit	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan 500 kelompok Masyarakat Produktif Mandiri 	Kelompok	120	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10																																																																																																									
6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh Kehutanan 	Orang	1.000	75	100	100	150	100	75	100	100	100	100																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi tiap tahun 	Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan sebanyak 30 produk 	Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
	7. Penyelenggaraan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh Kehutanan Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi tiap tahun Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan sebanyak 30 produk SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul 	Saker	49	6	6	4	11	1	2	5	2	6	8																																																																																																								
															5. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perangkat Kementerian Kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan SIMAK BMN Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun 	Orang	250	26	26	22	56	5	10	25	10	30	40																																																																																										
																													Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																													
																																										Propinsi	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-																																																																
																																																							Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
Orang																																																																				520	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	200																																							
																																																																																Orang	3.660	-	-	-	-	1.890	-	-	-	-	-	1.770																										
																																																																																													Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
																																																																																																										Unit	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Orang	1.000	75	100	100	150	100	75	100	100	100	100	100																																																																																																									
														Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																												
																											Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																															
																																								Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
																																																					Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																					
Saker																																																																		49	6	6	4	11	1	2	5	2	5	2	6	8																																								
																																																																															Orang	250	26	26	22	56	5	10	25	10	30	40																												
																																																																																											Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
																																																																																																							Propinsi	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-				
																																																																																																																			Paket	-	-	-
	Orang	520	-	-	-	-	320	-	-	-	-	200																																																																																																										
													Orang	3.660	-	-	-	-	1.890	-	-	-	-	1.770																																																																																														
																									Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																		
																																					Unit	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1																																																																						
																																																	Kelompok	120	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10																																																									
Orang																																																														1.000	75	100	100	150	100	75	100	100	100	100																																														
																																																																									Propinsi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																		
																																																																																					Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
																																																																																																	Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
																																																																																																													Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> Satuan pengelola hutan milik swasta dan milik rakyat terdamping untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sebanyak 40 unit Satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan terdamping untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard internasional sebanyak 20 unit Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket 	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun 	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Deputi, pemberitaan issue-issue strategis dan jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat Deputi dengan media masa sejumlah 100 kali Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali Peremuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali Menyampaikan bahan rapat Menteri Kehutanan pada acara rapat kerja dengan DPR RI dan DPD RI sejumlah 50 kali Pelayanan data dan informasi pembangunan kehutanan, 1 paket/tahun 	Kali	24	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Kali	21	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
		Kali	20	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
		Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat) seluas 324.625 ha 	Ha	138.531	26.576	9.188	29.582	19.795	13.235	-	2.925	9.156	28.074	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis dan anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kelayakan permohonan pinjaman sebanyak 570 proposal 	Proposal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul 	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-